



**LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2026**



GOVERNOR OF BANTEN

INTRODUCTION

Puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan dimaksud, LKPJ disampaikan ke DPRD untuk selanjutnya dibahas, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Banten.

LKPJ Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 ini memuat informasi pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Selain itu, dalam laporan ini juga disampaikan informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Banten.

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari semua pihak atas selesainya penyusunan LKPJ Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 ini, semoga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten pada masa yang akan datang.

Serang, Maret 2026

GOVERNOR OF BANTEN

Andra Soni

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 DASAR HUKUM	I-2
1.2 VISI DAN MISI	I-4
1.3 DATA UMUM DAERAH	I-4
1.3.1 Data Geografis Wilayah	I-4
1.3.2 Jumlah Penduduk	I-10
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk.....	I-12
1.3.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)	I-13
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I-17
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-18
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	I-19
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025	 II-1
2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	II-4
2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah	II-4
2.1.2 Strategi Pendapatan Daerah.....	II-7
2.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	II-10
2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	II-17
2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah	II-17
2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	II-19
2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH	II-25
2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah	II-25
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah.....	II-27
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	 III-1
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025	 III-1
3.1.1 Capaian Pelaksanaan Kinerja Makro Daerah.....	III-1

3.1.2	Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	III-15
3.1.3	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025	III-29
3.2	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025.....	III-220
3.3	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI BANTEN ATAS LKPJ GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024.....	III-231
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	IV-1
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUANKAN	IV-1
4.1.1	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya	IV-1
4.1.2	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran	IV-2
4.1.3	Satuan Kerja (Satker) yang Melaksanakan Tugas Pembantuan	IV-3
4.1.4	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah tingkat Bawahnya ..	IV-6
4.2	HAMBATAN / PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	IV-6
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Banten	I-5
Gambar 1.2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	I-7
Gambar 1.3 Sebaran Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota tahun 2025	I-11
Gambar 1.4 Komposisi Umur Produktif di Provinsi Banten Tahun 2025	I-12
Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk 2024-2025 Provinsi Banten	I-13
Gambar 1.6 ASN Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin	I-14
Gambar 1.7 ASN Provinsi Banten Berdasarkan Usia	I-15
Gambar 1.8 ASN Provinsi Banten Berdasarkan Golongan Ruang	I-16
Gambar 1.9 ASN Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan	I-17
Gambar 3.1 IPM Provinsi Banten Tahun 2025	III-3
Gambar 3.2 Capaian IPM Provinsi se-Indonesia Tahun 2025	III-4
Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Banten 2019-2025 (y on y)	III-6
Gambar 3.4 Struktur PDRB Lapangan Usaha tahun 2023-2025	III-7
Gambar 3.5 Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (y on y)	III-7
Gambar 3.6 Persentase Penduduk Miskin 2015-2025	III-8
Gambar 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023-2025 Provinsi Banten	III-10
Gambar 3.8 Distribusi Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	III-11
Gambar 3.9 Rasio Gini tahun 2015-2025 Provinsi Banten	III-13
Gambar 3.10 Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Banten	III-13
Gambar 3.11 PDRB Per Kapita Provinsi Banten Tahun 2023-2025	III-14

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Banten menurut Kabupaten/Kota	I-6
Tabel 1.2 Pembagian Wilayah Provinsi Banten menurut Kabupaten/Kota	I-6
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2025	I-10
Tabel 1.4 Sebaran Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2025	I-11
Tabel 1.5 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	I-18
Tabel 1.6 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	I-18
Tabel 1.7 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 ..	I-19
Tabel 2.1 Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	II-12
Tabel 2.2 Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	II-13
Tabel 2.3 Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	II-16
Tabel 2.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	II-20
Tabel 2.5 Target dan Realisasi Rincian Belanja Operasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	II-21
Tabel 2.6 Target dan Realisasi Rincian Belanja Modal APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	II-23
Tabel 2.7 Target dan Realisasi Rincian Belanja Transfer APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	II-24
Tabel 2.8 Target dan Realisasi Rincian Pembiayaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	II-27
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2025.....	III-2
Tabel 3.2 Capaian Tujuan dan Sasaran Provinsi Banten Tahun 2025.....	III-15
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025.....	III-19
Tabel 3.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-31
Tabel 3.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-69
Tabel 3.6 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan	III-127
Tabel 3.7 Pelaksanaan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan	III-137
Tabel 3.8 Pelaksanaan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	III-184
Tabel 3.9 Pelaksanaan Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan	III-214
Tabel 3.10 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	III-216
Tabel 3.11 Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025	III-220
Tabel 3.12 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Banten	III-220

Tabel 4.1	Kementerian dan Realisasi Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2025	IV-2
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2025 ...	IV-4

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, berkenaan dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya serta dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan strategis lainnya.

Sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penyusunan LKPJ 2025 merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan yaitu:

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025;
2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian atas hasil pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud merupakan bentuk kolaborasi dan sinergitas antara Gubernur dengan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga seluruh masyarakat Provinsi Banten.

1.1. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 dan Peraturan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025.

1.2. VISI DAN MISI

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 merupakan Visi Misi Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten yang tercantum adalah **“BANTEN MAJU ADIL MERATA TIDAK KORUPSI”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat bermoral pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh;
2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas;
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

Pada tahun pertama RPJMD, kebijakan Pembangunan daerah Banten tahun 2025 diarahkan pada tema pembangunan yaitu “Pembangunan yang Memperkokoh Inklusif Kolaboratif untuk Masyarakat Banten yang Modern Dalam Rangka Mencapai Banten yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Dari sisi astronomis, wilayah Provinsi Banten berada pada batas 105°01'11"-106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50"-07°01'01" Lintang Selatan. Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa (berbatasan langsung dengan wilayah Daerah Khusus Jakarta)

sehingga menambah posisi geostrategis Provinsi Banten sebagai pintu gerbang jalur perdagangan Pulau Jawa dan Sumatera. Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan bagian timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Banten Dalam Angka 2025

Gambar 1.1
Peta Wilayah Provinsi Banten

Provinsi Banten memiliki luas 9.352,77km² atau sekitar 0,51 persen dari luas daratan Indonesia. Berarti, Banten adalah provinsi dengan luas wilayah terkecil kelima di Indonesia setelah Kepulauan Riau (0,43%), Bali (0,30%), DI Yogyakarta (0,16%) dan DKI Jakarta (0,03%). Provinsi Banten secara umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 257,93 meter di atas permukaan laut (mdpl), serta memiliki beberapa gunung dengan ketinggian mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) wilayah kabupaten dan 4 (empat) kota dengan rincian luas daratan masing-masing kabupaten/kota, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang 2.771,414 km², Kabupaten Lebak 3.312,180 km², Kabupaten Tangerang 1.027,757 km², Kabupaten Serang 1.469,908 km², Kota Tangerang 178,347 km²,

Kota Cilegon 162,514 km², Kota Serang 265,787 km², dan Kota Tangerang Selatan 164,860 km². Rincian secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Provinsi Banten menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (kilo meter persegi)	Persen
1	Kabupaten Pandeglang	2.771,414	29,63
2	Kabupaten Lebak	3.312,180	35,41
3	Kabupaten Tangerang	1.027,757	10,99
4	Kabupaten Serang	1.469,908	15,72
5	Kota Tangerang	178,347	1,91
6	Kota Cilegon	162,514	1,74
7	Kota Serang	265,787	2,84
8	Kota Tangerang Selatan	164,860	1,76
	PROVINSI BANTEN	9.352,767	100,00

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

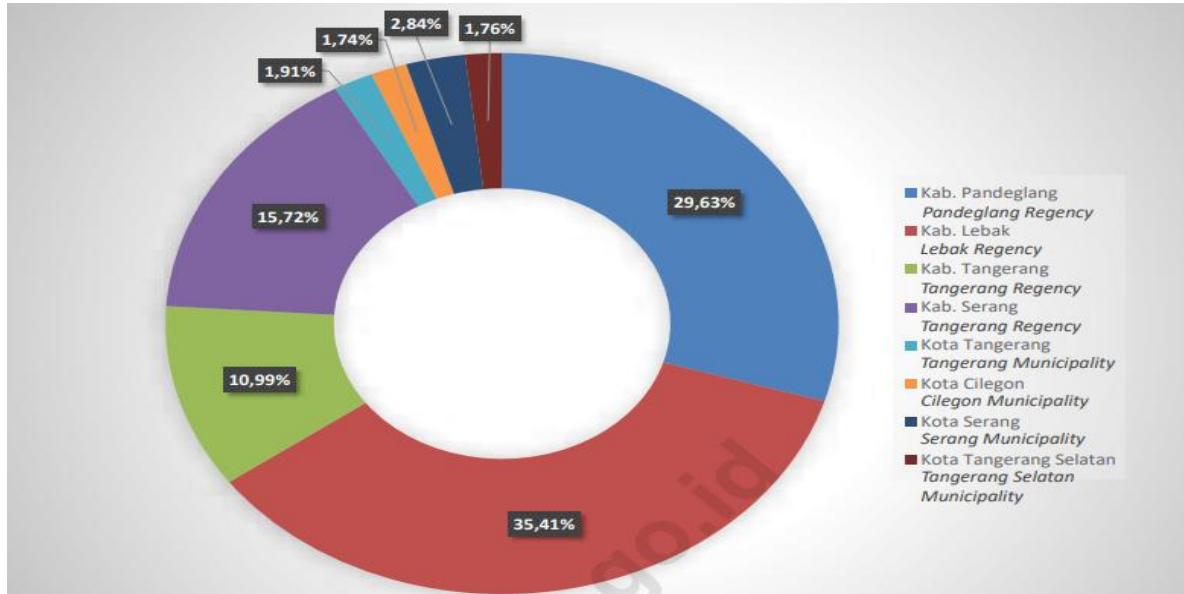
Rincian luas wilayah, jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Provinsi Banten menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Pusat Pemerintahan	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Kabupaten					
Pandeglang	2.771,414	Pandeglang	35	326	13
Lebak	3.102,180	Rangkasbitung	28	340	5
Tangerang	1.027,757	Tigaraksa	29	246	28
Serang	1.469,908	Ciruas Kota	29	326	-
Kota					
Tangerang	178,347	Tangerang	13	-	104
Cilegon	162,514	Purwakarta	8	-	43
Serang	265,787	Serang	6	-	66
Tangerang Selatan	164,860	Pamulang	7	-	55
Provinsi Banten	9.352,77	Kota Serang	155	1.238	314

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di Provinsi Banten adalah Kabupaten Lebak dengan persentase luas wilayah sebesar 35,46% dari luas Provinsi Banten. Sedangkan Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,76% dan 1,74%. Gambar berikut ini menyajikan proporsi luas masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Gambar 1.2
Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

Untuk kondisi topografi, wilayah Provinsi Banten bervariasi dari dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) hingga perbukitan terjal, dengan ketinggian berkisar antara 0 mdpl sampai 1.000 mdpl. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Provinsi Banten dikelompokkan dalam kelas ketinggian sebagai berikut:

- Ketinggian 0 – 200 mdpl (dataran rendah); meliputi daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang.
- Ketinggian 201 – 2.000 mdpl; meliputi daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang
- Ketinggian 501 – 2.000 mdpl; meliputi daerah Lebak Timur yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Sedangkan berdasarkan morfologinya, dataran rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 mdpl sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 mdpl. Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah – Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 mdpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 mdpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak

terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi. Kondisi kemiringan lahan di Provinsi Banten terbagi menjadi tiga kondisi yang ekstrim yaitu:

- a. Dataran (kemiringan 0 – 15%); sebagian besar terdapat di daerah Utara Provinsi Banten, yang tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yaitu di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang hingga Kabupaten Lebak.
- b. Perbukitan landai-sedang (kemiringan < 15% dengan tekstur bergelombang rendah-sedang); sebagian besar terdapat di bagian utara yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian utara Kabupaten Pandeglang.
- c. Daerah perbukitan terjal (kemiringan < 25%); terdapat di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.

Untuk klimatologi Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Muson dan Gelombang La Nina atau El Nino. Saat musim penghujan (November - Maret) cuaca didominasi oleh angin Barat (dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Sedangkan pada bulan Agustus cuaca didominasi oleh angin timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang cukup ekstrim terutama di wilayah bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino.

Struktur geologi Provinsi Banten terdiri dari formasi batuan dengan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter dimana tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200-800 meter. Formasi dengan satuan tertua ialah formasi Bojongmanik yang diperkirakan berusia Miosen akhir, dengan batuan yang terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasir, batu gamping, batu pasir tufaan, konglomerat dan breksi andesit, yang dimana umurnya diduga Pliosen awal. Berikutnya ditemukan Formasi Cipacar yang terdiri dari *tuff* batu apung berselingan dengan lempung tufaan, konglomerat dan napal glaukonitan, yang dimana umurnya diperkirakan Pliosen akhir. Di atas formasi ini ialah Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasir, lempung pasir, batu gamping kokina dan *tuff*.

Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan aluvium yang diperkirakan berumur mulai Miosen awal hingga Resen.

Adapun satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen dan terdiri dari tiga anggota yakni konglomerat, batu lempung dan batu gamping. Selanjutnya adalah Formasi Cicaruruep, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimapang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan Formasi Cikotok.

Batuan Gunung Api, dapat dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Plistosen Tua hingga Holosen. Batuan terobosan yang dijumpai bersusunan andesit hingga basal. Tuff Cikasungka diperkirakan berumur Plistosen, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuarter. Pada peta lembar Leuwidamar tersaji singkapan batuan metamorf yang diperkirakan berumur Oligo Miosen dan terdiri dari Sekis, Gneis dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Diorit Kuarsa diperkirakan berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit diperkirakan berumur Miosen akhir serta Basal berumur kuarter. Batuan endapan termuda ialah aluvium serta endapan pantai yang dapat berupa kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang kerangan, gosong pantai dan gamping terumbu.

Secara hidrologi di wilayah Provinsi Banten terdapat menjadi enam Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

- a. DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);
- b. DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
- c. DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
- d. DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- e. DAS Teluklada, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang;
- f. DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Selain itu, di wilayah Provinsi Banten terdapat 5 satuan Cekungan Air Tanah (CAT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, antara lain CAT Labuan, CAT Rawadano dan CAT Malingping dan lintas provinsi yang meliputi CAT Serang – Tangerang dan CAT Jakarta. Keberadaan CAT ini selain sebagai sumber air, tetapi juga memiliki potensi bahaya likuefaksi. Terjadinya likuefaksi tergantung pada kedalaman air tanah dan

porositas litologinya. Kejadian gempa dengan intensitas tertentu akan memicu terjadinya likuefaksi pada daerah cekungan air tanah yang memiliki kedalaman yang dangkal dengan litologi berupa material lepas (*porous*).

1.3.2. Jumlah Penduduk

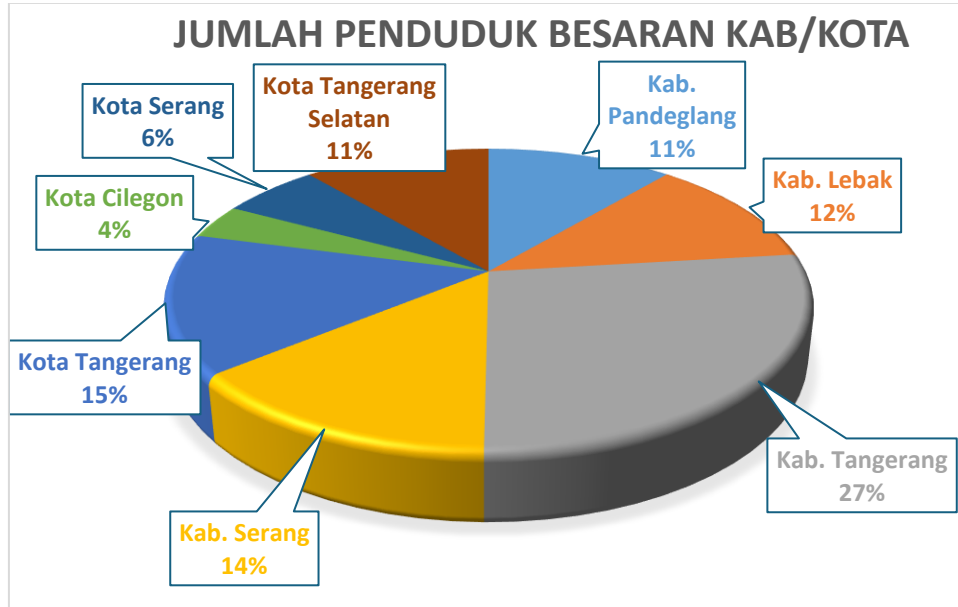
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Jumlah Penduduk Banten sampai dengan Semester II Tahun 2025 tercatat 13.173.618 jiwa terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya sejumlah 292.244 jiwa, terinci pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kabupaten Pandeglang	759.368	717.892	1.477.260
2	Kabupaten Lebak	804.849	761.686	1.566.535
3	Kabupaten Tangerang	1.814.357	1.753.174	3.567.531
4	Kabupaten Serang	936.721	899.356	1.836.077
5	Kota Tangerang	992.174	984.425	1.976.599
6	Kota Cilegon	245.617	240.151	485.768
7	Kota Serang	395.935	381.795	777.730
8	Kota Tangerang Selatan	739.541	746.577	1.486.118
	Provinsi Banten	6.688.562	6.485.056	13.173.618

Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten Semester II 2025

Menurut data tahun 2025, Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang tersebar pada 8 (delapan) kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten/Kota sebagai berikut: Jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjumlah 1.566.535 jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berjumlah 1.477.260 jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Serang berjumlah 1.836.077 jiwa; jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.567.531 jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang berjumlah 1.976.599 jiwa; jumlah penduduk Kota Cilegon berjumlah 485.768 jiwa; jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 777.730 jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.486.118 jiwa.



Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten

Gambar. 1.3
Sebaran Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota tahun 2025

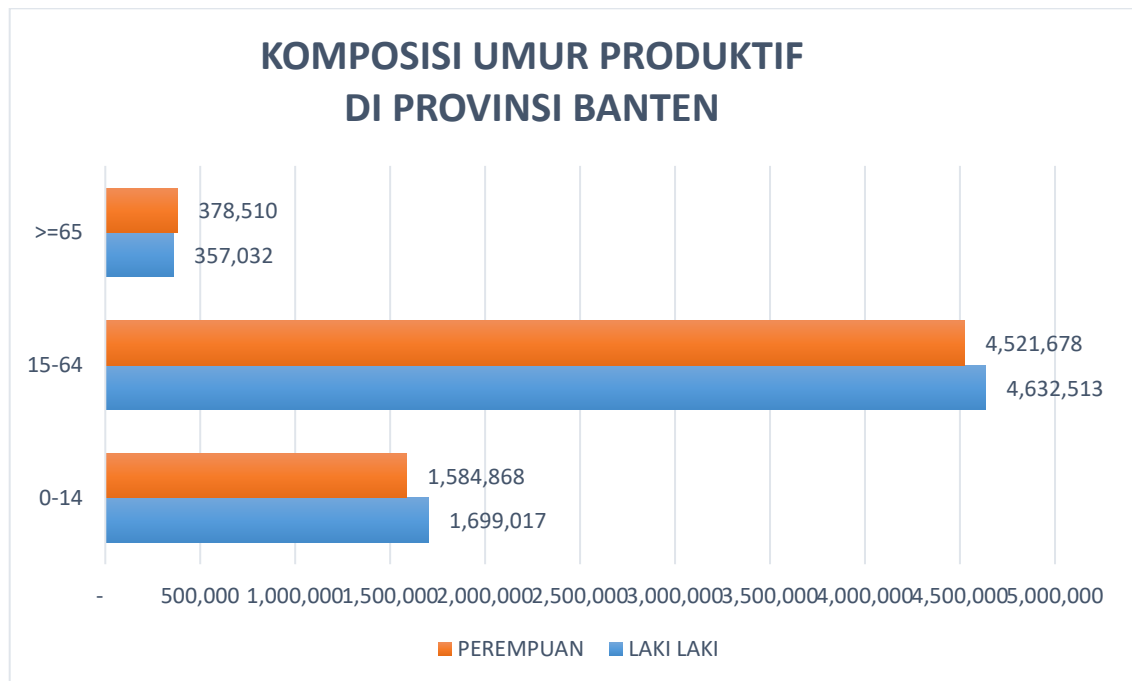
Komposisi penduduk berdasarkan wilayah Tahun 2025 menunjukkan kepadatan penduduk Banten yang didominasi oleh wilayah Kota Tangerang dengan kepadatan penduduk 11.040 jiwa/km². Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil berada pada Kabupaten Lebak dengan kepadatan penduduk 468 jiwa/km². Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut:

Tabel 1.4
Sebaran Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2025

PROVINSI/KAB/KOTA	PENDUDUK	LUAS WIL	KEPADATAN
36-BANTEN	13.173.618	9.352,77	1.409
36.01-PANDEGLANG	1.477.260	2.771,41	533
36.02-LEBAK	1.566.535	3.312,18	473
36.03-TANGERANG	3.567.531	1.027,76	3.471
36.04-SERANG	1.836.077	1.469,91	1.249
36.71-KOTA TANGERANG	1.976.599	178,35	11.083
36.72-KOTA CILEGON	485.768	162,51	2.989
36.73-KOTA SERANG	777.730	265,79	2.926
36.74-KOTA TANGERANG SELATAN	1.486.118	164,86	9.014

Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten

Pada tahun 2025, komposisi umur di Provinsi Banten terbagi menjadi 3 yaitu umur produktif, umur tua, dan umur muda. Untuk umur produktif di Banten jatuh pada usia 15 – 64 tahun dengan jumlah 9.154.191 jiwa, umur tua adalah penduduk dengan usia 65 tahun keatas dengan jumlah penduduk 735.542 jiwa, dan umur muda yang tergolong dari usia 0 – 14 tahun dengan jumlah penduduk 3.283.885 jiwa.

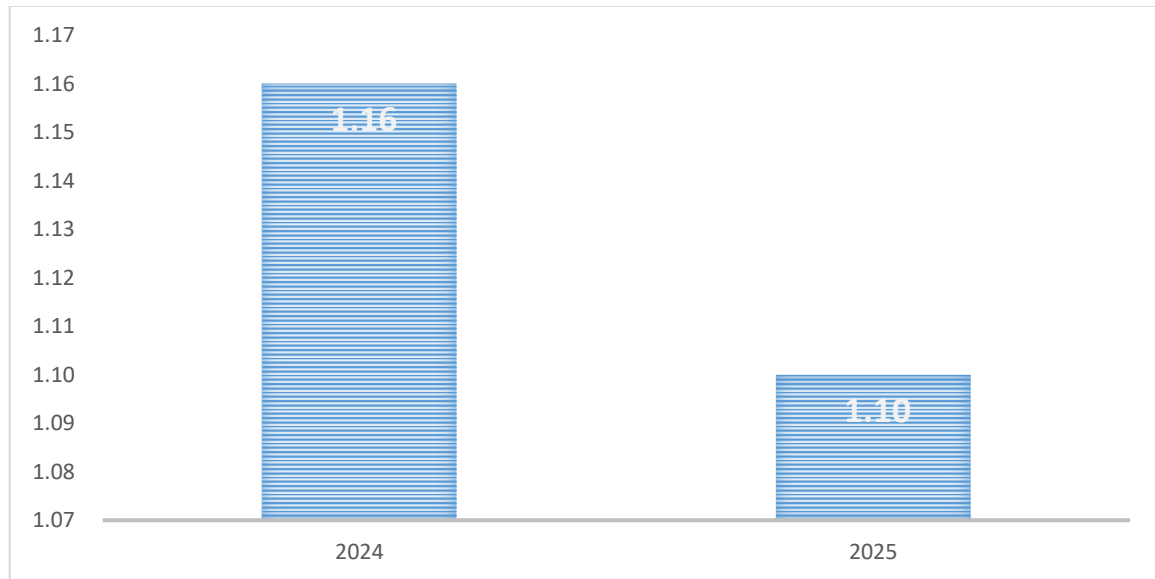


Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten

Gambar 1.4
Komposisi Umur Produktif di Provinsi Banten Tahun 2025

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di dua tahun terakhir menunjukkan terjadi penurunan pertumbuhan penduduk. Tahun 2025 pertumbuhan penduduk sebesar 1,10 persen menurun 0,06 persen dibandingkan tahun 2024 pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 persen, dapat dilihat dari gambar dibawah ini;



Sumber: BPS Banten (26 Februari 2025)

Gambar 1.5
Laju Pertumbuhan Penduduk 2024-2025 Provinsi Banten

Selain pertumbuhan penduduk, penggambaran kenaikan jumlah penduduk bisa dengan angka *Total Fertility Rate* (TFR) didefinisikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. Berikut gambaran TFR Provinsi Banten dan Kab/Kota. TFR Provinsi Banten tahun 2025 berdasarkan data dari siperindu BKKBN sebesar 1,98. TFR ini merupakan suatu ukuran bagi pemerintah untuk melihat jumlah kelahiran total.

Penambahan jumlah penduduk ini akan ditandai dengan adanya bonus demografi tentu dapat menjadi kesempatan dan tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Bonus demografi yang dimiliki dapat ditunjang dengan kenaikan cakupan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat di Provinsi Banten (pendidikan dapat diakses secara merata dengan kualitas yang mumpuni) serta peningkatan kesempatan bekerja dengan membuka lowongan pekerjaan di Provinsi Banten.

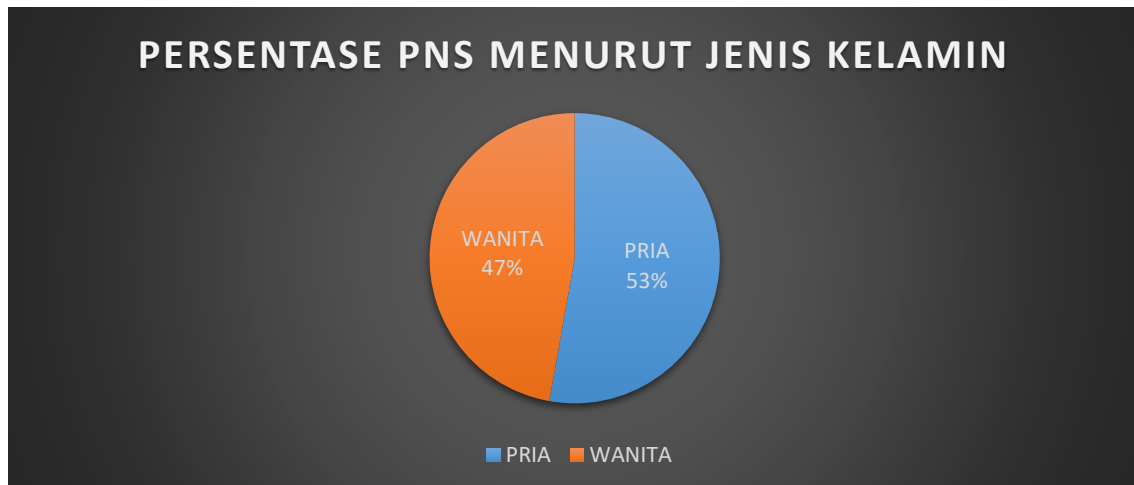
1.3.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Banten. Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada tahun 2025 **sebanyak 21.540 orang**. Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci ASN Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan dan tingkat pendidikan.

a. PNS Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin

Kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang. Pada tahun 2025, jumlah ASN di lingkup Provinsi Banten sebesar 21.540 orang, dengan rincian sebanyak 11.374 orang atau 52,8 persen berjenis kelamin Laki-laki dan 10.166 ASN atau 47,20 persen berjenis kelamin perempuan.

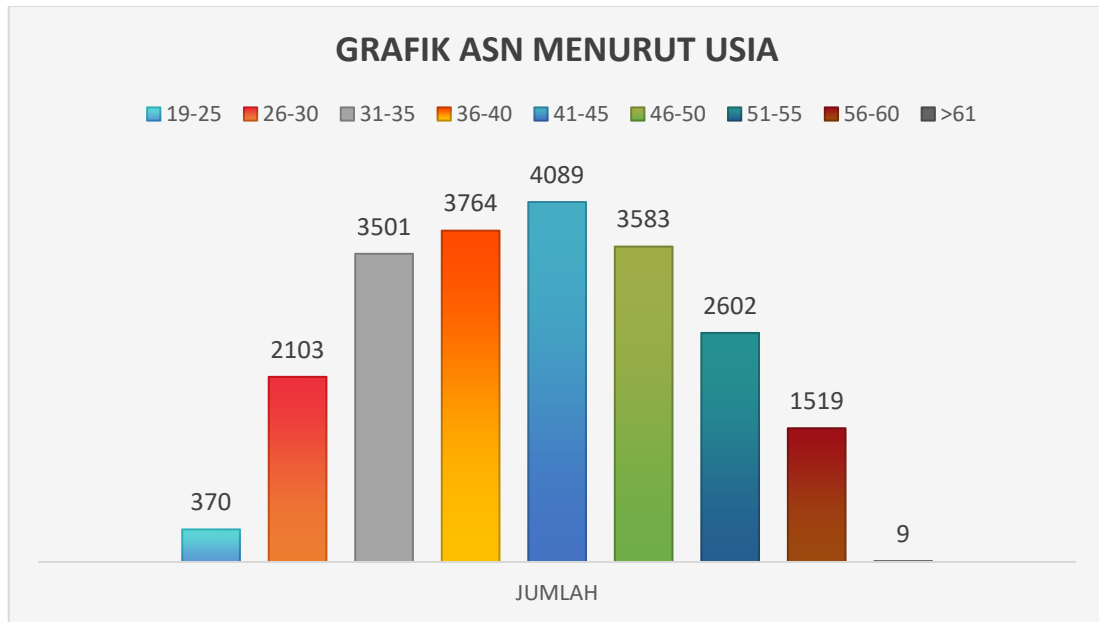


Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, diolah

Gambar 1.6
ASN Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin

b. ASN Provinsi Banten Berdasarkan Usia

ASN Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang berjumlah 21.540 orang terdistribusi di 33 Perangkat Daerah Provinsi Banten. Secara rinci data ASN Banten berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar berikut:



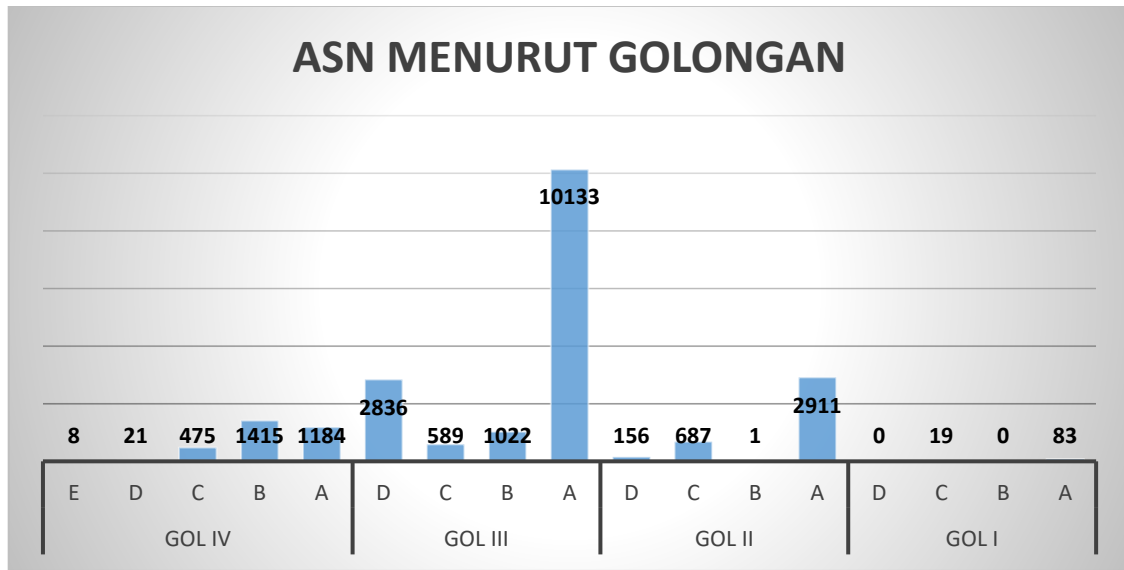
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, diolah

Gambar 1.7
ASN Provinsi Banten Berdasarkan Usia

Berdasarkan Gambar 1.7 ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten didominasi pada usia relatif muda yaitu usia 31-40 tahun keatas sebanyak 7.265 pegawai dan usia 41-50 tahun sebanyak 7.672. Kondisi ini menunjukkan adanya penambahan jumlah PPPK menjadi ASN di usia produktif dan yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kompetensi ASN di setiap kelompok usia ASN. ASN diharapkan dapat memiliki kualitas diri yang lebih inovatif, kreatif dan visioner dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong birokrasi yang ada menjadi birokrasi yang lebih responsif dan adaptif.

c. ASN Provinsi Banten Berdasarkan Golongan Ruang

Distribusi pegawai antar golongan secara proporsional dapat menunjang peningkatan profesionalisme ASN. Gambar 1.8 menunjukkan komposisi ASN Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan golongan ruang.



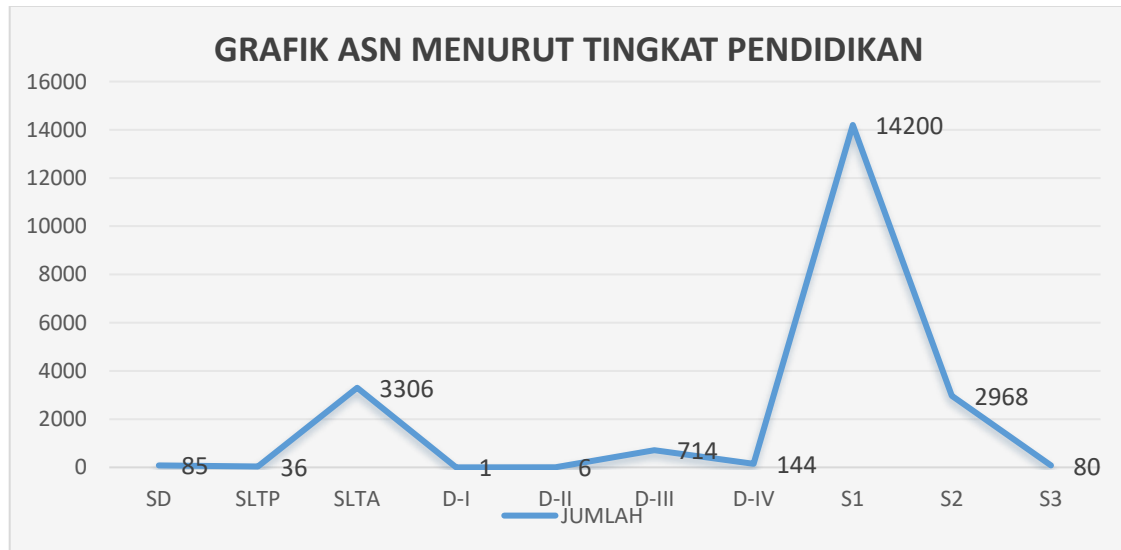
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, diolah

Gambar 1.8
ASN Provinsi Banten Berdasarkan Golongan Ruang

Berdasarkan Gambar 1.8, diketahui bahwa komposisi ASN Provinsi Banten sebagian besar merupakan pegawai golongan III dengan jumlah 14.580 ASN atau 68%, diikuti dengan golongan II sebanyak 3.755 ASN atau 17% dan golongan IV dengan jumlah 3.103 ASN atau 14%, dan golongan I berjumlah 102 ASN 1%.

d. ASN Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan

Secara umum kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai apabila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir. Kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten menurut tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagaimana gambar berikut:



Sumber: diolah BKD Provinsi Banten Tahun 2025

Gambar 1.9
ASN Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Gambar 1.9 sebagian besar tingkat pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten berpendidikan Sarjana (S1) dan hal ini terus mengalami kenaikan dimana di tahun 2025 tercatat sebanyak 14.200 ASN berpendidikan S1. ASN berpendidikan Magister/Pascasarjana (S2) sebanyak 2.968 orang. Dapat diketahui bahwa sebanyak 80 orang ASN telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Doktoral (S3) bertambah 18 orang ASN yang menyelesaikan pendidikan S3 nya di tahun 2025 ini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat potensial untuk memenuhi kinerja yang ditargetkan.

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Banten terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Adapun realisasi pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rupiah	%
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37
Pajak Daerah	6.253.493.581.987	5.720.173.537.866	91,47
Retribusi Daerah	287.906.730.367	326.976.698.150	113,57
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	49.444.843.000	51.598.879.729	104,36
Lain-lain PAD yang Sah	343.934.086.891	237.695.843.489	69,11
PENDAPATAN TRANSFER	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.519.935.189.000	3.400.338.371.671	96,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	6.489.293.000	6.489.293.000	100
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.346.763.490	6.383.604.000	100,58
Pendapatan Hibah	6.346.763.490	6.383.604.000	100,58
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Adapun realisasi belanja daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rupiah	%
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	7.137.130.606.275	6.811.493.649.366	95,44
Belanja Pegawai	2.695.013.553.512	2.646.895.743.593	98,21
Belanja Barang dan Jasa	3.883.634.692.693	3.613.529.758.488	93,05
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Hibah	520.643.952.320	513.376.712.647	98,60
Belanja Bantuan Sosial	37.838.407.750	37.691.434.638	99,61
BELANJA MODAL	1.189.126.004.461	1.035.290.994.628	87,06
Belanja Modal Tanah	186.613.886.304	117.739.329.059	63,09
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.196.494.582	360.524.589.489	90,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.096.580.988	205.562.940.358	87,81
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	318.031.145.447	299.116.983.041	94,05

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rupiah	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.707.402.140	48.089.349.908	100,80
Belanja Modal Aset Lainnya	4.480.495.000	4.257.802.773	95,03
BELANJA TIDAK TERDUGA	32.756.687.505	-	-
Belanja Tidak Terduga	32.756.687.505	-	-
BELANJA TRANSFER	2.414.524.730.906	2.170.012.551.548	89,87
Belanja Bagi Hasil	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56
Belanja Bantuan Keuangan	153.852.620.000	145.402.190.000	94,51
JUMLAH BELANJA DAERAH	10.773.538.029.147	10.016.797.195.542	92,98

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan Daerah terdiri atas 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah dan 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Adapun realisasi pembiayaan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rupiah	%
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	444.485.541.412	444.485.541.412	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	444.485.541.412	444.485.541.412	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	305.987.541.412	305.987.808.376,00	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2025

Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin sinkronisasi dan sinergitas arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas bidang pembangunan nasional antara pembangunan nasional telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025, yang di dalamnya telah memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan, isu strategis, prioritas, dan arah kebijakan serta kerangka pendanaan yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) TA 2025.

Selanjutnya untuk melaksanakan RKPD, secara operasional disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tahap sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya pelaksanaan APBD merupakan manifestasi kolaborasi kinerja unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka mengakomodasi permasalahan pembangunan yang dinamis dan pelaksanaan pembangunan yang adaptif dilakukan Perubahan APBD agar dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan. Perubahan APBD TA 2025, didasarkan pada pemenuhan kriteria untuk dilakukannya Perubahan APBD TA 2025, beberapa hal penting yang menjadi latar belakang perubahan APBD, antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun berjalan dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan

asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan, serta faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran.

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Adanya belanja lanjutan yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.
5. Keadaan darurat yaitu keadaan luar biasa, yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Pada saat Tahun Anggaran 2025 perlu dijelaskan bahwa implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai diterapkan pada pelaksanaan APBD 2025.

Berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya harus disesuaikan, sehingga perlu kiranya dilakukan perubahan atas Kebijakan Umum APBD (KUA) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target pendapatan, yang diakibatkan:
 - a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang mengintruksikan Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan PKB, BBNKB,

- Opsen PKB dan Opsen BBNKB, agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan Pengurangan Anggaran Pendapatan akibat kebijakan pengurangan atas dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- b. Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, yang memberikan pembebasan atau keringanan bagi wajib pajak yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten sehingga merubah target pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Penyesuaian target dan indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2025, yang diakibatkan:
- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2025 berupa:
- 1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 - 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas 50% (lima puluh persen);
 - 3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan Publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
 - 7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, berupa penambahan alokasi dana transfer untuk Provinsi Banten sebesar Rp141.360.000, sehingga perlu penyesuaian Belanja yang bersumber dari dana transfer tersebut.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, berupa pengurangan alokasi dana transfer untuk Provinsi Banten sebesar Rp70.039.187.000, sehingga perlu penyesuaian Belanja yang bersumber dari dana transfer tersebut.
 - d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA. 2025 yang mengintruksikan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.
3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran;
 4. Adanya kewajiban pembayaran pada pihak ketiga;
 5. Penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2024 hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan APBD TA 2025, antara lain sebagai berikut:

2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber

pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan antara lain Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Insentif Fiskal. Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari pendapatan hibah, Sumbangan Pihak Ketiga, dana darurat serta lain-lain pendapatan sesuai ketentuan lainnya.

Dengan melihat realisasi makro ekonomi Provinsi Banten Tahun 2024, proyeksi makro ekonomi Banten Tahun 2025 serta melihat performa Pendapatan Daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan Daerah tidak mengalami penurunan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Kebijakan terkait Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a) Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- d) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- e) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- f) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- g) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- h) Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
- i) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;

- j) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- k) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- l) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Provinsi Banten;
- b) Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2025;
- c) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Provinsi Banten;
- d) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian; dan
- e) Berlakunya ketentuan opsen yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, cukup menekan pendapatan asli daerah oleh karena itu diperlukan upaya pembiayaan kreatif dan penggalian sumber pendapatan baru.

2. Dana Perimbangan/Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- a) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk setiap objek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;

- c) Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Upaya peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi penyaluran hibah berdasarkan MoU dengan PT. Jasa Raharja. Pendapatan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 tersebut, disusun berdasarkan kondisi terkini sampai dengan Triwulan I dengan memperhatikan capaian realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan trend positif dan potensi Pendapatan yang akan menjadi sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang terus diupayakan guna memenuhi target Pendapatan Daerah.

2.1.2 Strategi Pendapatan Daerah

Untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dinamis dan cenderung meningkat, maka penggalan potensi pendapatan daerah harus senantiasa dilakukan. Untuk meningkatkan pendapatan Daerah, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - a. Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor Bersama kepolisian dan PT. Jasa raharja;
 - b. Pemberlakuan Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, yang memberikan pembebasan atau keringanan bagi wajib pajak yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten. Program pembebasan pajak ini berlangsung mulai 10 April 2025 hingga 30 Juni 2025, kemudian diperpanjang melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2025. Dalam keputusan tersebut, pemutihan pajak kendaraan bermotor diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor diberikan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor

mulai dari tahun 2024 dan sebelum tahun 2024, untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan masa pajak 2025 sampai dengan 2026.

- 2) Pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor diberikan kepada wajib pajak untuk tahun pajak 2025.
- 3) Keputusan ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang melakukan mutasi kendaraan keluar dari wilayah Provinsi Banten.
- c. Pemerintah Provinsi Banten meminta seluruh petugas Samsat, baik dari Pemprov Banten, Jasaraharja, maupun anggota Polda Banten dan Polda Metro Jaya, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- d. Sebagai bagian dari peringatan HUT ke-25 Provinsi Banten, Pemprov Banten menyiapkan program apresiasi khusus bagi warga yang secara konsisten membayar pajak tepat waktu.
- e. Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;
- f. Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat melalui SAMSAT Keliling (SAMLING), SAMSAT *Long Distance* (SAMLONG), SAMSAT *Online* (SAMSON), SAMSAT *Kolektif*, drive thru dan Samsat *goes to factory*;
- g. Sosialisasi dan Publikasi pelayanan dan pengelolaan Pajak Daerah kepada Masyarakat secara luas baik secara virtual, Media Sosial, media cetak, WA blast, Media luar ruang dan tatap muka;
- h. Optimalisasi pembayaran secara digital (SIGNAL, SAMBAT, CERIA, EDC, QRIS);
- i. Melaksanakan sinergitas Pelayanan dengan Stakeholder melalui: Kerjasama dengan Koperasi Perusahaan, Samsat Desa, Kecamatan;
- j. Peningkatan Kerjasama dengan pihak swasta (Perbankan, Mall dll) dalam penyediaan sarana Gerai SAMSAT di lokasi strategis;
- k. Penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, operasionalisasi penagihan pajak daerah, dan mengoptimalkan penagihan pajak daerah dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada, pelayanan dengan mobil samsat keliling, pelayanan pada *event* tertentu di kabupaten/kota.
2. Peningkatan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - a. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Dealer dan Leasing;
 - b. Koordinasi dengan Kepolisian terkait percepatan proses kendaraan baru;

- c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan.
- 3. Peningkatan Pendapatan Pajak Air Permukaan, melalui:
 - a. Penetapan potensi baru Wajib Pajak Air Permukaan;
 - b. Koordinasi dan sinergitas dengan instansi teknis terkait serta para Wajib Pajak Air Permukaan;
 - c. Pengembangan sistem Pajak Air Permukaan;
 - d. Pelaksanaan pemungutan kepada Perusahaan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan tanpa ijin.
 - e. Kepercayaan masyarakat dalam mengolah dan penggunaan Air Permukaan memiliki harapan yang cukup baik untuk kegiatan usaha;
- 4. Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, melalui:
 - a. Pengembangan aplikasi pelaporan PBBKB untuk mempermudah Wajib Pungut PBBKB dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai tahapan dalam penyetoran dan pelaporan PBBKB;
 - b. Pendataan Wajib Pungut Baru yang melakukan kegiatan usaha penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di Wilayah Provinsi Banten namun belum terdaftar sebagai wajib pungut di Provinsi Banten;
 - c. Penetapan potensi baru wajib PBBKB melalui pendataan potensi penyedia dan importir BBM di wilayah Provinsi Banten;
 - d. Koordinasi dan sinergitas dengan instansi teknis terkait (Dinas ESDM, BPH Migas, PT. Pertamina selaku wajib PBBKB terbesar).
- 5. Pajak Alat Berat (PAB)
 - a. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana perda tersebut mengamanatkan tahun 2024 pajak alat berat mulai dipungut;
 - b. Melaksanakan pendataan ke Perusahaan-preusahaan yang memiliki alat berat dan ditetapkan sebagai wajib pungut;
- 6. Peningkatan Pendapatan Pajak Rokok, melalui:
 - a. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI;
 - b. Percepatan pelaksanaan penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kab./Kota sebagai syarat penyaluran Pajak Rokok.

7. Retribusi Daerah

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal peningkatan retribusi daerah;
- b. Melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui tatap muka, media cetak dan elektronik terkait layanan-layanan yang dimiliki Perangkat Daerah di Provinsi Banten;
- c. Mengoptimalkan retribusi pemanfaatan aset yang ada di Perangkat Daerah.

2.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, dan dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya Provinsi Banten menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Banten Nomor 581 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan, Surat Gubernur Banten Nomor B.900.114/ 1344-DP3AKKB/2025 tanggal 22 Agustus 2025 Perihal Dana Alokasi Khusus Fisik Renovasi Gedung UPTD PPA Provinsi Banten mohon diluncurkan di TA. 2026, serta nota dinas Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Nomor 400.4/634-Dispora/2025 tanggal 10 November 2025 hal Usulan Pergeseran Uraian Dalam Sub Rincian Objek Belanja.

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp10.467.550.487.735, yang berkurang sebesar Rp(1.370.148.869.525) dari target pendapatan pada APBD Murni yaitu sebesar

Rp11.837.699.357.260. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.749.656.227.905 atau **93,14 persen** dari anggaran. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ringkasan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Daerah APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	11.837.699.357.260	10.504.586.429.735	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.319.775.525.770	6.934.779.242.245	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.511.577.068.000	3.563.460.424.000	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.346.763.490	6.346.763.490	6.346.763.490	6.383.604.000	100,58

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (*unaudit*).

Pada kelompok **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp8.319.775.525.770 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp6.934.779.242.245 sedangkan realisasinya tercapai sebesar Rp6.336.444.959.234 atau 91,37 persen dari target yang telah ditetapkan. Sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar **91,47 persen** terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.319.775.525.770	6.934.779.242.245	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37
4.1.01	Pajak Daerah	6.229.870.863.437	6.253.493.581.987	6.253.493.581.987	5.720.173.537.866	91,47
4.1.02	Retribusi Daerah	284.752.691.760	287.906.730.367	287.906.730.367	326.976.698.150	113,57
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.058.600.000	49.444.843.000	49.444.843.000	51.598.879.729	104,36
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.743.093.370.573	343.934.086.891	343.934.086.891	237.695.843.489	69,11

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (*unaudit*).

Realisasi pendapatan pada tahun 2025 tidak mencapai target terutama karena belum optimalnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu khususnya Pajak kendaraan bermotor tercapai 96,75%, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tercapai 78,17%, Pajak Rokok tercapai 95%, serta Lain-lain PAD yang sah tercapai 69,11%, yang diantaranya disebabkan oleh:

1. Pemprov Banten memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025, berlaku 10 April hingga 30 Juni 2025, mencakup penghapusan denda, pokok tunggakan tahun-tahun sebelumnya, dan BBNKB II (balik nama). Kebijakan ini meringankan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak 2024 ke bawah dengan syarat melunasi pajak tahun 2025.
2. Penurunan daya beli Masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru, disebabkan oleh perlambatan ekonomi global yang turut berdampak pada daya beli masyarakat di dalam negeri. Meski berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemberian insentif untuk mobil *hybrid* dan dukungan dari perusahaan pembiayaan, penurunan tetap terjadi;
3. Adanya insentif Pajak kepada Masyarakat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai bentuk insentif kepada masyarakat dan upaya peningkatan kepatuhan pajak di wilayah Provinsi Banten. Pembebasan Pokok dan Sanksi diberikan kepada Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor sejak tahun 2024 dan sebelumnya; Berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan masa pajak tahun 2025 sampai dengan 2026. Pembebasan Sanksi Saja diberikan kepada Wajib Pajak untuk tahun pajak 2025.

Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah. Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp326.976.698.150 atau 113,57 persen dari target sebesar Rp287.906.730.367. terjadi kelebihan sebesar Rp 39.069.967.783,260. Terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 104%.

Pada **Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan**, diperoleh dari pembagian laba pada BUMD. Pada APBD 2025 pendapatan dari sektor

BUMD ditargetkan Rp49.444.843.000 dan terealisasi Rp51.598.879.729 atau 104,36 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024 dimana hasil BUMD mencapai Rp.51.909.734.739,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp 310.855.010,00.

Pada kelompok **Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang sah** merupakan Pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 ditargetkan pada APBD sebesar Rp1.743.093.370.573 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp343.934.086.891 tercapai sebesar Rp237.695.843.489 atau 69,11 persen, hal ini lebih tinggi dari tahun kemarin yang hanya mencapai 54%. Adapun realisasi masih jauh dari yang ditetapkan karena dihapusnya denda pajak kendaraan sehingga masyarakat tidak membayar denda dari penunggakan pajak PKB tersebut. Pendapatan Denda Pajak Daerah pada APBD perubahan ditargetkan Rp 137.355.870.027,00 dan terealisasi Rp 23.366.145.489,00 atau hanya 17,01 persen.

Pada **Pendapatan Transfer** yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian ditargetkan pada APBD 2025 sebesar Rp3.511.577.068.000 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp3.526.424.482.000 tercapai sebesar Rp3.406.827.664.671 atau 96,61 persen. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.511.577.068.000	3.563.460.424.000	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.511.577.068.000	3.563.460.424.000	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Realisasi Pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 sebesar Rp3.406.827.664.671 atau 96,61 persen dari target sebesar Rp3.526.424.482.000.

Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan pendapatan transfer mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, disesuaikan dengan prognosis, serta sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa kebijakan pendapatan DBH memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.

Kelompok **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** menampung penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 sebesar Rp6.383.604.000 atau 100,58 persen dari target sebesar Rp6.346.763.490. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Realisasi Hibah dari PT. Jasa Raharja.

2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, maka evaluasi terhadap capaian realisasi belanja hingga Triwulan I menjadi dasar perumusan kebijakan belanja daerah yang disesuaikan dengan dinamika regulasi dan kondisi terkini. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Komponen belanja disusun dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah;
2. Terjadi penyesuaian komponen belanja transfer bagi hasil ke Kab/Kota sebagai dampak implementasi opsen sesuai amanat UU HKPD dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
3. Komponen belanja tidak terduga disesuaikan dengan ketentuan regulasi;
4. Belanja transfer bantuan keuangan ditentukan berdasarkan ketentuan regulasi dan kemampuan keuangan daerah;

5. Pembiayaan untuk pembangunan daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

Beberapa hal yang mendasari perubahan kebijakan belanja pada tahun 2025 tersebut antara lain:

1. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib, mengikat, mendesak serta prioritas, antara lain:
 - a. Pemenuhan alokasi anggaran belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN;
 - b. Pemenuhan kewajiban pengalokasian anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota;
2. Penyesuaian dengan Juknis terhadap belanja-belanja yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat;
3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024;
4. Pemenuhan kewajiban pembayaran belanja tahun sebelumnya;
5. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga;
6. Penyesuaian belanja-belanja lainnya dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan Provinsi Banten tahun 2025, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh;

2. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif;
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana.

Dengan mempertimbangkan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I, serta dalam rangka percepatan pencapaian target-target kinerja pembangunan, serta upaya peningkatan pelayanan publik, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pos-pos Belanja Daerah. Penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Daerah dilakukan untuk Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat berupa belanja pegawai dan kebutuhan rutin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, memanfaatkan hasil efisiensi belanja, optimalisasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, serta penambahan target kinerja pada beberapa perangkat daerah yang harus dilaksanakan.

2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp11.841.736.991.497 yang selanjutnya pada Pergeserans setelah Perubahan APBD TA 2025 telah ditetapkan menjadi sebesar Rp 10.773.538.029.147. Anggaran Belanja Daerah tersebut terealisasi sebesar Rp10.016.797.195.542 atau sebesar 92,98 persen. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	%
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
5	BELANJA DAERAH	11.841.736.991.497	10.810.573.971.147	10.773.538.029.147	10.016.797.195.542	92,98
5.1	BELANJA OPERASI	8.019.522.158.684	7.169.161.051.275	7.137.130.606.275	6.811.493.649.366	95,44
5.2	BELANJA MODAL	1.525.026.595.733	1.190.899.653.461	1.189.126.004.461	1.035.290.994.628	87,06
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.094.898.331	38.988.535.505	32.756.687.505	0	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.237.093.338.749	2.411.524.730.906	2.414.524.730.906	2.170.012.551.548	89,87

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Secara terperinci, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Operasi

Belanja Operasi, yaitu belanja dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan, mendorong aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja operasi ditargetkan pada APBD sebesar Rp8.019.522.158.684 dan Pergeseran Setelah Perubahan APBD sebesar Rp7.137.130.606.275 dengan realisasi sebesar Rp6.811.493.649.366 atau 95,44 persen. Target dan realisasi rincian Belanja Operasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Rincian Belanja Operasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	%
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
5,1	BELANJA OPERASI	8.019.522.158.684	7.169.161.051.275	7.137.130.606.275	6.811.493.649.366	95,44
5.1.01	Belanja Pegawai	2.675.338.274.770	2.730.275.846.512	2.695.013.553.512	2.646.895.743.593	98,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.614.456.611.914	3.880.402.844.693	3.883.634.692.693	3.613.529.758.488	93,05
5.1.05	Belanja Hibah	689.127.272.000	520.643.952.320	520.643.952.320	513.376.712.647	98,60
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.600.000.000	37.838.407.750	37.838.407.750	37.691.434.638	99,61

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Realisasi **Belanja Pegawai** TA 2025 sebesar Rp2.646.895.743.593 atau 98,21 persen dari target sebesar Rp2.695.013.553.512. Belanja pegawai tidak terserap karena adanya silpa dari tunjangan kinerja pegawai yang disebabkan dari predikat kinerja pegawai.

Belanja Barang meliputi **Belanja Barang dan Jasa** sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp3.613.529.758.488 atau 93,05 persen dari target sebesar Rp3.883.634.692.693. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari: Belanja Barang, Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; Belanja Barang dan Jasa BOS; dan Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Dana BOS, serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp513.376.712.647 atau 98,60 persen dari target sebesar Rp520.643.952.320.

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp37.691.434.638 atau 99,61 persen dari target sebesar Rp37.838.407.750.

- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.096.499.850 pada Dinas Sosial;
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp23.770.500.000 pada Dinas Sosial;
- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp12.824.434.788 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan untuk perolehan aset dengan manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana publik ditargetkan pada APBD sebesar Rp1.525.026.595.733 dan Perubahan APBD sebesar Rp1.189.126.004.461 dengan realisasi sebesar Rp1.035.290.994.628 atau 87,06 persen. Target dan realisasi rincian Belanja Modal APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Rincian Belanja Modal APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	%
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
5,2	BELANJA MODAL	1.525.026.595.733	1.190.899.653.461	1.189.126.004.461	1.035.290.994.628	87,06
5.2.01	Belanja Modal Tanah	286.401.439.550	186.613.886.304	186.613.886.304	117.739.329.059	63,09
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.554.642.957	398.196.494.582	398.196.494.582	360.524.589.489	90,54
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.079.364.646	235.870.229.988	234.096.580.988	205.562.940.358	87,81
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	549.628.775.060	318.031.145.447	318.031.145.447	299.116.983.041	94,05
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.119.399.520	47.707.402.140	47.707.402.140	48.089.349.908	100,80
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.242.974.000	4.480.495.000	4.480.495.000	4.257.802.773	95,03

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (*unaudit*).

3. Realisasi Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tak Terduga ditargetkan pada APBD sebesar Rp60.094.898.331 dan Perubahan APBD sebesar Rp32.756.687.505 dengan realisasi sebesar Rp0 atau 0,00 persen.

4. Realisasi Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Belanja Transfer TA 2024 terdiri dari belanja transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan, ditargetkan pada APBD Murni sebesar Rp2.237.093.338.749 dan Perubahan APBD sebesar Rp2.414.524.730.906 dengan realisasi sebesar Rp2.170.012.551.548 atau 89,87 persen. Target dan realisasi rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Rincian Belanja Transfer APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	%
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
5,4	BELANJA TRANSFER	2.237.093.338.749	2.411.524.730.906	2.414.524.730.906	2.170.012.551.548	89,87
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.113.293.338.749	2.260.672.110.906	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123.800.000.000	150.852.620.000	153.852.620.000	145.402.190.000	94,51

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan seluruhnya merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 tahun 2021 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp2.170.012.551.548 atau 89,87 persen dari target sebesar Rp2.414.524.730.906.

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pada Tahun Anggaran 2025 realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar Rp3.000.000.000 atau 100 persen, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar Rp25.257.620.000 atau 100 persen, dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa sebesar Rp115.059.570.000 atau 93,17 persen dari target sebesar Rp123.500.000.000.

2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Munculnya rekening pembiayaan dalam struktur APBD dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi:

1. Penggunaan SILPA tahun 2024 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
2. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari skema dana cadangan dan pembiayaan kreatif lainnya;
3. Pengeluaran pembiayaan dapat diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ketentuan regulasi;

4. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah APBD Murni dianggarkan sebesar Rp4.037.634.237 dan pada Pergeseran setelah Perubahan APBD TA 2025 ditetapkan menjadi sebesar Rp305.987.541.412. Pembiayaan Daerah netto terealisasi sebesar Rp305.987.541.412 atau 100 persen. Rincian Pembiayaan Daerah secara rinci tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Rincian Pembiayaan APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	%
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
6	PEMBIAYAAN DAERAH	4.037.634.237	305.987.541.412	305.987.541.412	305.987.808.376	100,00
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147.535.634.237	444.485.541.412	444.485.541.412	444.485.541.412	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.535.634.237	444.485.541.412	444.485.541.412	444.485.541.412	100,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	143.498.000.000	138.498.000.000	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	0	0	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.498.000.000	138.498.000.000	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	38.846.840.739	

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp444.485.541.412 atau 100,00 persen dari target sebesar Rp444.485.541.412.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00 persen dari target sebesar Rp138.498.000.000.

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp138.497.733.036 berupa Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT. SMI untuk Periode Tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7.2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pembangunan daerah jangka menengah daerah Provinsi Banten pada tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029, dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Banten yaitu “BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI”.

Pada tahun Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 memiliki tema yaitu **“Pembangunan yang Memperkokoh Inklusif Kolaboratif Untuk Masyarakat Banten Yang Modern Dalam Rangka Mencapai Banten Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing”** Kebijakan tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh;
2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas;
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berjenjang, dimulai dari evaluasi Kinerja Makro, Evaluasi Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, Evaluasi sasaran Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah.

3.1.1. Capaian Pelaksanaan Kinerja Makro Daerah

Indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,

dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Realisasi Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Nasional
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,35	76,50	77,25	75,90
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,79	5,20	5,37	5,11
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,68	7,24	6,63	4,74
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,70	5,50	5,51	8,25
5	Rasio Gini	Poin	0,359	0,37	0,312	0,363
6	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	70,28	72,35	74,67	83,7

Sumber: BPS Provinsi Banten 2025

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) indikator kunci Pembangunan Manusia, mencerminkan rata-rata berapa lama seseorang diharapkan hidup sejak lahir, dan terus membaik dari tahun ke tahun, pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*), pada RPJMD 2025-2029 kualitas SDM memiliki indikator lainnya yaitu Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index/HCI*) Bank Dunia mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas generasi pekerja masa depan, dengan skala 0-1. Skor Indonesia pada 2020 adalah 0,54, artinya anak yang lahir saat ini hanya akan mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimalnya.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Gambar 3.1
IPM Provinsi Banten Tahun 2025

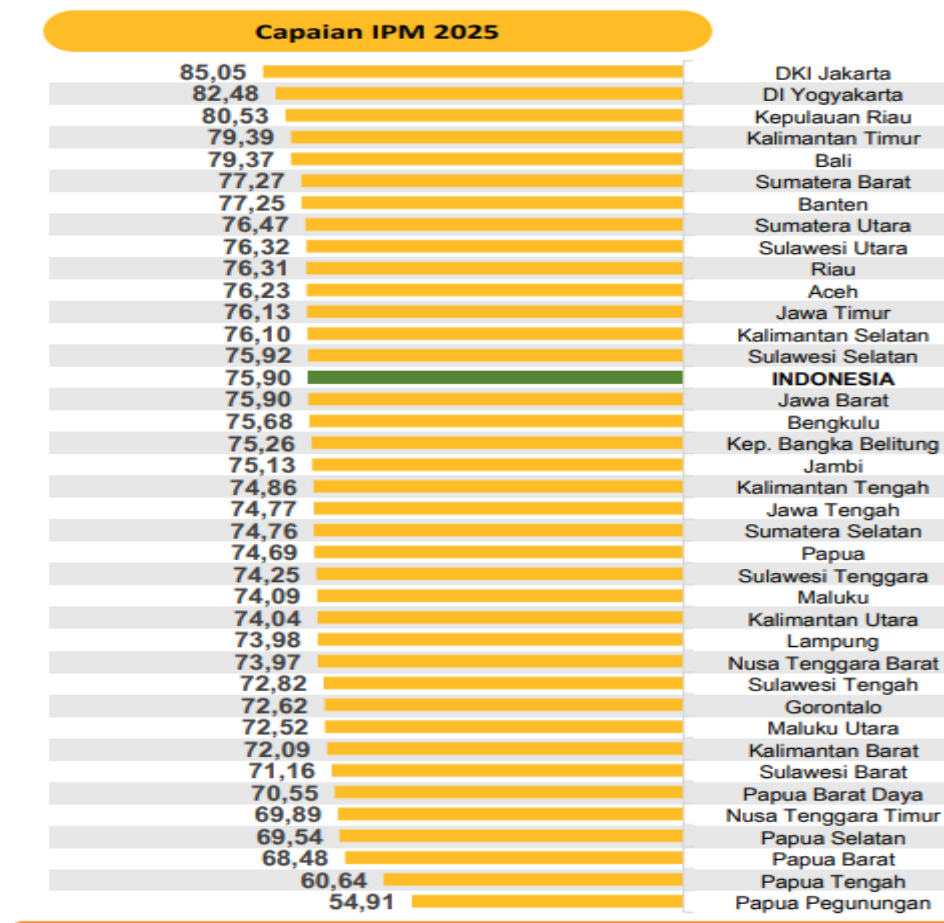
Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten salah satunya terpresentasikan melalui capaian IPM. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang rilis pada no. 57/11/36/Th. XIX, 5 November 2025, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2025 sangat baik yaitu sebesar 77,25 poin, meningkat 0,90 poin atau 1,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 76,35. jika dibandingkan dengan target IPM tahun 2025 yaitu 76,50, maka kinerja IPM telah tercapai. Jika dibandingkan capaian Nasional IPM Banten berada di atas nasional sebesar 1,35 poin, IPM nasional sendiri berada di angka sebesar 75,90.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2025 termasuk pada klasifikasi “tinggi”, secara peringkat Banten menempati peringkat ke-7 dengan status IPM tertinggi dari 38 Provinsi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Melihat capaian pada Kab/Kota di Banten capaian IPM di Kota Tangerang Selatan paling tinggi yaitu sebesar 84,81 dengan status pembangunan manusia “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Selain Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang juga memiliki status pembangunan manusia yang sama, dengan capaian sebesar 82,41. Sementara itu, lima kabupaten/kota di Provinsi Banten berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$). Kabupaten/kota yang memiliki status pembangunan manusia “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) yaitu Kabupaten Lebak dengan nilai IPM mencapai 69,24.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2025 terus meningkat, pada tahun 2025 ditargetkan UHH sebesar 70,69 dan terealisasi 75,33 tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH telah

meningkat sebesar 1,21 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,32 persen per tahun. Pada 2020, UHH Provinsi Banten adalah 74,12 tahun dan pada 2025 mencapai 75,33 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,36 tahun atau 0,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,27 persen pertahun.

Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 telah mencapai 13,11 tahun. Realisasi ini naik sebesar 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Target HLS pada dokumen perencanaan 2025 sebesar 14,12. Dengan demikian bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2025, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.



Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 3.2
Capaian IPM Provinsi se-Indonesia Tahun 2025

Rata-rata Lama Sekolah di Banten menunjukkan perkembangan positif, RLS Banten pada tahun 2025 telah mencapai 9,56 tahun. Sementara itu, RLS pada 2025 meningkat 0,33 tahun atau 3,58 persen dibandingkan 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024. Capaian kinerja RLS pada tahun 2025 telah mencapai target 101,7 persen atau sesuai target 9,40 poin dengan pertumbuhan yang selalu positif. Hal ini artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2025 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari 20% dari APBD (ketentuan minimal 20 persen); 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai 10% APBD (ketentuan minimal); 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Pada tahun 2025 telah berjalan operasional RSUD Ciligrang, RSUD Labuan sebagai bentuk pemerataan layanan kesehatan di wilayah Banten Selatan.

Namun ada juga banyak faktor penghambat dari peningkatan IPM di Banten beberapa faktor antara lain: Kualitas Pendidikan masih terjadi adanya kesenjangan akses dan mutu pendidikan antara Banten selatan dan utara. Faktor kesehatan terjadi layanan kesehatan yang tidak merata di seluruh wilayah Banten mempengaruhi Angka Harapan Hidup. Ketimpangan wilayah terdapat kesenjangan pembangunan dan kualitas hidup antara wilayah utara yang industri dan selatan yang cenderung agraris/kurang berkembang. Isu Lingkungan: Degradasi lingkungan dan pengelolaan limbah industri yang belum maksimal memengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bencana juga menyebabkan kualitas hidup menurun dengan bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor dimana akan banyak masalah sosial yang akan muncul pasca bencana.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2025, berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor No. 10/02/36/Th. XX, 5 Februari 2026, realisasi laju Pertumbuhan Ekonomi Banten di Tahun 2025 sebesar 5,37 persen. LPE dibandingkan dengan tahun kemarin mengalami peningkatan sebesar 0,58 persen dimana tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2024 yang hanya tumbuh 4,79 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,60 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,27 persen. Banten telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 3,96 persen dan pada kontribusi di pulau jawa sebesar 6,96 persen.

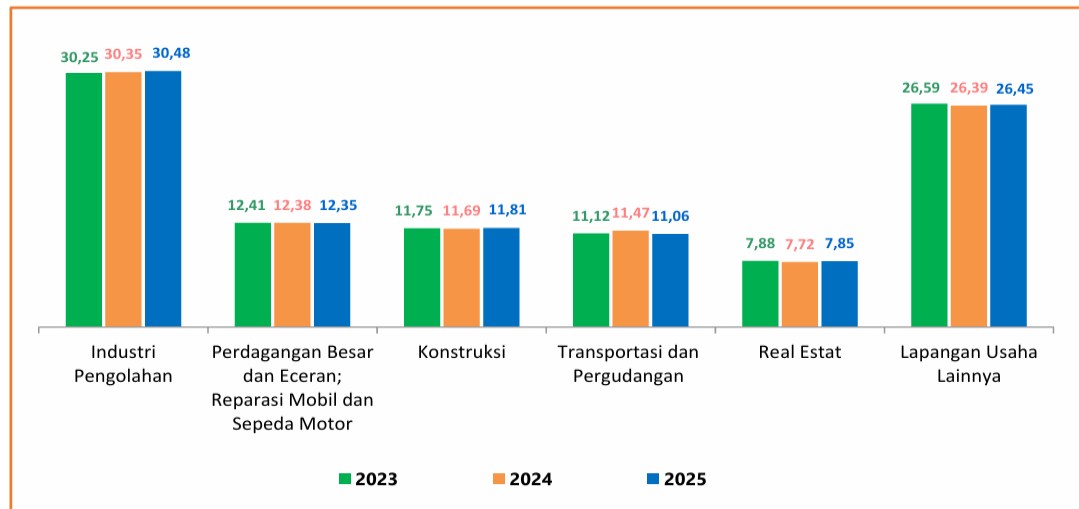


Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Gambar 3.3.
Pertumbuhan Ekonomi Banten 2019-2025 (y on y)

Peningkatan Perekonomian Banten pada tahun 2025 terjadi dikarenakan lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Banten ikut meningkat, yang pada tahun 2025 ini yang mengalami pertumbuhan di antaranya adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 5,37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,61 persen; Konstruksi sebesar 5,89 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,20; serta Real Estat sebesar 5,94 persen. Hal ini dikarenakan pada sektor Industri makanan minuman lebih banyak memproduksi di triwulan IV 2025, penyebabnya karena momen Bulan Ramadhan jatuh pada Februari 2026 sehingga produksi barang dan jasa ikut meningkat.

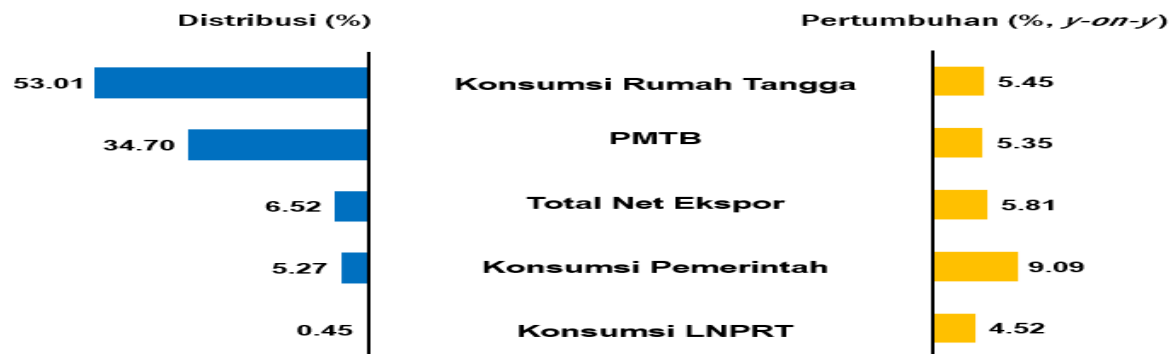
Struktur perekonomian Provinsi Banten menurut lapangan usaha pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,48 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,35 persen; Konstruksi sebesar 11,81 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,06 persen; serta Real Estat sebesar 7,85 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Banten mencapai 73,55 persen.



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Gambar 3.4
Struktur PDRB Lapangan Usaha tahun 2023-2025

Dari sisi pengeluaran seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Komponen Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 9,09 persen, didorong oleh peningkatan realisasi anggaran pemerintah khususnya di belanja pegawai, barang, dan jasa. Komponen dengan share terbesar yaitu Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 5,45 persen, didorong oleh adanya libur Nataru yang mendorong mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, serta aktivitas konsumsi lainnya.



Sumber: BPS Banten 2025

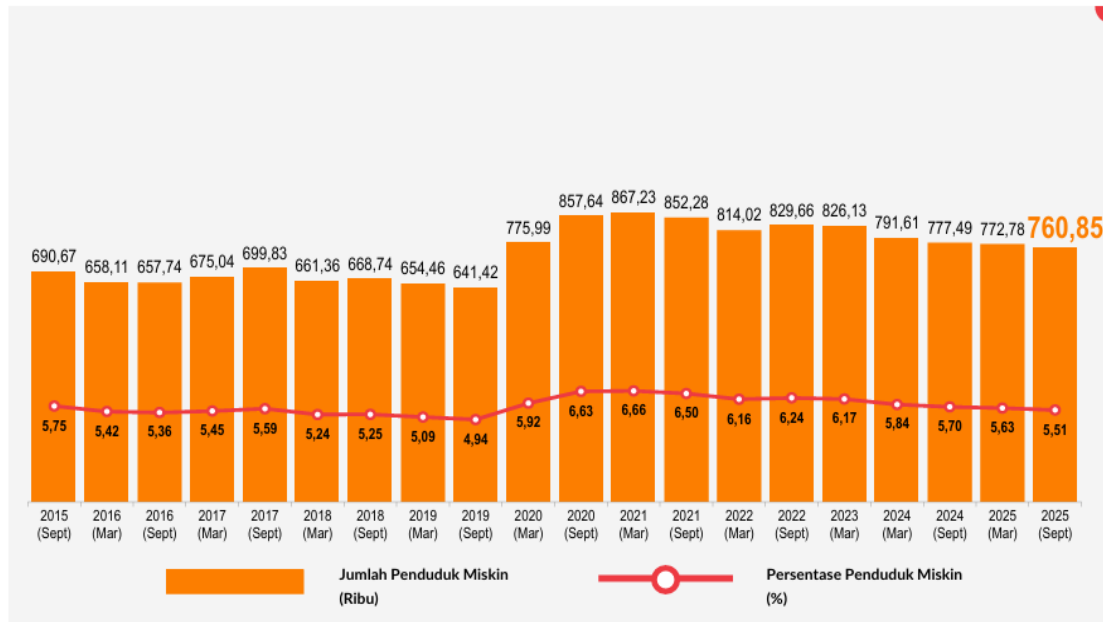
Gambar 3.5
Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (y on y)

Secara umum yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Banten adalah industri pengolahan yang berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap PDRB. Kebijakan hilirisasi industri kimia dan logam di wilayah Cilegon dan Serang mulai menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Sektor konstruksi juga menjadi motor pertumbuhan signifikan, bahkan tumbuh dua digit pada beberapa triwulan didorong oleh percepatan Proyek Strategis

Nasional (PSN) serta perbaikan konektivitas lokal, seperti pembangunan Tol Serang–Panimbang, program jalan desa sejahtera, dan jalan usaha tani. Selain itu nilai investasi juga pada posisi yang semakin bertambah dari tahun sebelumnya dan berhasil mencapai nilai sebesar 130,2 triliun.

c. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 11/07/36/Th. XX, 5 Februari 2026 menunjukkan bahwa Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2025 turun sebesar 5,51 persen, turun 0,12 persen poin terhadap Maret 2025 dan turun 0,19 persen poin terhadap September 2025. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 760,85 ribu orang, turun 11,9 ribu orang terhadap Maret 2025.



Sumber: BPS Banten 2025

Gambar 3.6
Persentase Penduduk Miskin 2015-2025

Hal lain yang perlu diperhatikan selain dari persentase penduduk miskin adalah Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan. Pada periode September 2025 Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah 1,028 naik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,847. Penyebab tingginya indeks kedalaman kemiskinan adalah besarnya rata-rata **kesenjangan pengeluaran penduduk miskin** terhadap garis kemiskinan, untuk garis kemiskinan pada september 2025 adalah sebesar Rp715.288 per kapita per bulan yang berarti konsumsi mereka jauh di bawah standar layak peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 5,17 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.698.039/rumah tangga miskin/bulan. Menurut data indeks kedalaman

kemiskinan baik di perkotaan dan di perdesaan sama-sama mengalami kenaikan, namun yang paling besar adalah di perdesaan yaitu 1,033 dan di perkotaan adalah 1,027. Penyebab utamanya terjadi inflasi pada daerah Lebak dan Pandeglang. Berdasarkan rilis BPS pada semester I Juni Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,79 persen dan Lebak 2,04 persen dan di Desember 2025 inflasi tertinggi ada di Kabupaten Pandeglang sebesar 3,18 persen dan disusul Lebak 2,97 persen. ada September 2025.

Selain itu Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,154 pada September 2024 menjadi 0,317 pada September 2025. Indeks keparahan kemiskinan menurut daerah terjadi lebih besar di perkotaan yaitu 0,322 sedangkan di perdesaan hanya sebesar 0,290. Penyebab tingginya indeks keparahan kemiskinan adalah **melebarnya jarak pendapatan** kelompok masyarakat termiskin di bawah garis kemiskinan. Dari ke dua data tersebut maka intervensi pemerintah dalam menangani kemiskinan di wilayah perdesaan dan perkotaan perlu lebih melihat strategi kemiskinan, dimana strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat harus lebih banyak di wilayah perdesaan dan sedangkan Strategi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat perlu lebih banyak intervensi di perkotaan.

Faktor penyebab kemiskinan antara lain:

1. Pada September 2025, secara rata-rata 1 rumah tangga miskin di Banten memiliki 5,17 anggota rumah tangga. Artinya rumah tangga miskin banyak menanggung jumlah anggota keluarga yaitu memiliki anak lebih dari 2 orang.
2. Proporsi Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2025, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,35 persen pada garis kemiskinan. Beras dan rokok menyumbang paling banyak.
3. Terjadi Inflasi di Banten dimana dua daerah yaitu Pandeglang dan Lebak mengalami inflasi tertinggi dibandingkan 6 daerah lainnya. Menyebabkan kemiskinan wilayah perdesaan menjadi lebih tinggi.
4. TPT perkotaan sebesar 7,19 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan sebesar 4,46 persen. Lapangan usaha yang mengalami penurunan terbanyak adalah Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (101,86 ribu orang); Konstruksi (30,77 ribu orang); dan Pendidikan (28,32 ribu orang).

Pemerintah Provinsi Banten juga telah berupaya menurunkan kemiskinan dengan berbagai intervensi yaitu:

1. Adanya kebijakan berupa KEPMENKO PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, selain itu terdapat Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 050/1609-Bapp/2023, perihal Percepatan Penangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.
2. Penguatan program dan anggaran dalam penanganan kemiskinan melalui 3 strategi yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan

kantong kemiskinan dimana sub kegiatan terkait tematik kemiskinan dilakukan tagging di SIPD.

3. Menginstruksikan kepada Kabupaten Kota se-Banten penggunaan data kemiskinan yang sama yaitu melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) .
4. Pemberian Akses dan Perlindungan bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.
5. Pemberian akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan nasional (JKN).
6. Pemberian bantuan pangan, pemenuhan gizi seimbang dan makanan sehat.
7. Menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi daerah.

d. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2025 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten No. 13/02/36/Th. XX, 5 Februari 2026. TPT Provinsi Banten pada periode November 2025 sebesar 6,63 persen, turun 0,05 poin dari tahun sebelumnya yaitu 6,68 persen di Agustus 2024 dan turun 0,06 poin dibandingkan Agustus 2025 yaitu 6,69 persen. Pada dokumen perencanaan di tahun 2025 TPT ditargetkan sebesar 7,24 persen yang artinya capaian melebihi target. Namun kondisi TPT Banten tetap perlu diperhatikan karena jika dibandingkan nasional dengan TPT nasional yaitu sebesar 4,74persen maka TPT Provinsi Banten masih jauh dibawah realisasi nasional. Untuk TPT ini ranking Banten berada di peringkat 3, dimana selalu berada di peringkat teratas dengan jumlah pengangguran terbesar.

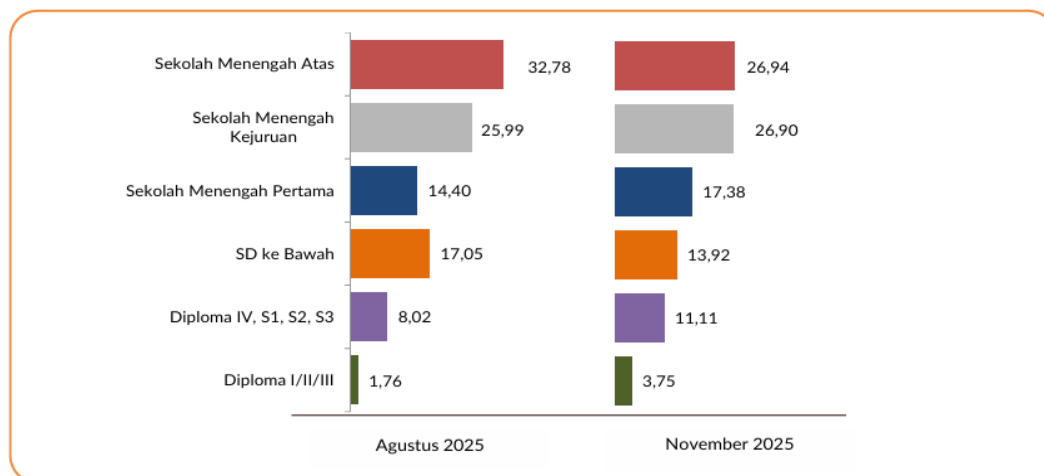


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Gambar 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023-2025 Provinsi Banten

Penduduk usia kerja pada November 2025 sebanyak 9.567.770 orang, dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 6.482,28 ribu orang dan bukan Angkatan kerja sebanyak 3.085,49 ribu orang dan sebanyak 430,02 ribu orang menganggur. Pada November 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 50,10 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yaitu sebesar 2,62 persen. Periode November 2025 jika dibandingkan Agustus 2025, status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase adalah berusaha sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar, Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar, Pekerja Bebas di Pertanian Berusaha Dibantu Buruh. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar terdapat pada status Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Non pertanian.

Pada November 2025, Selama periode Agustus 2025–November 2025, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yang pada November 2025 mencapai 26,90 persen. Sementara itu, distribusi pengangguran terendah adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 3,75 persen pada November 2025.



Sumber: BPS Banten 2025

Gambar 3.8
Distribusi Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Faktor Penyebab Pengangguran di Banten antara lain:

1. TPT perkotaan mengalami peningkatan sebesar 1,00 persen poin, dimana banyaknya pabrik yang merelokasi usahanya ke wilayah lain atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) mengurangi penyerapan tenaga kerja.
2. Investasi (98,1%) dan kawasan industri sangat terpusat di Banten Utara (Tangerang, Serang, Cilegon), sementara Banten Selatan (Lebak, Pandeglang) minim lapangan kerja dan memiliki infrastruktur terbatas.

3. Distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah kejuruan yang pada November 2025 mencapai 26,94 persen. Lulusan SMK dan vokasi di Banten memiliki keahlian yang tidak relevan dengan kebutuhan industri padat modal di wilayah tersebut.

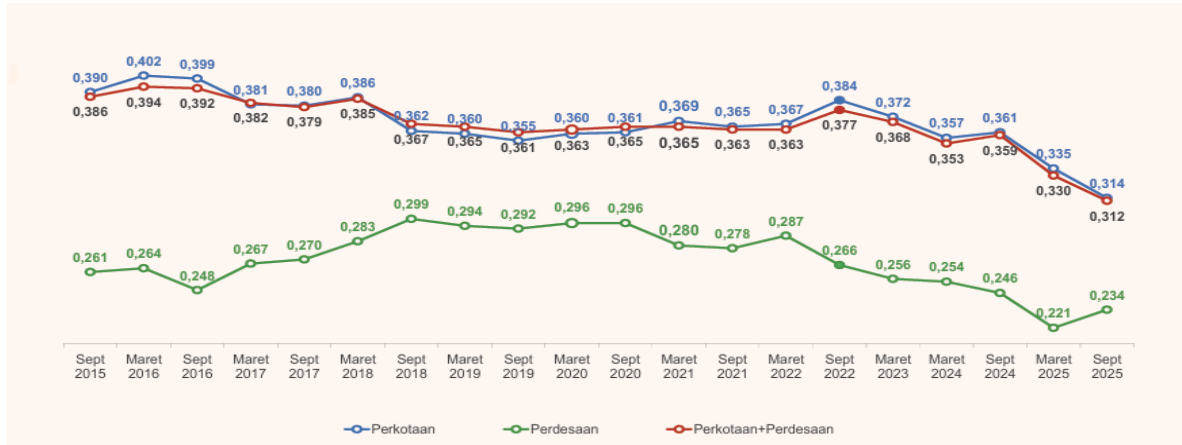
Faktor Pendukung Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah:

1. Melakukan pengurangan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial
2. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan investasi
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas BLKI serta peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja. Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT Latihan Kerja dan Peningkatan Saranan dan Prasarana Pelatihan di UPT Latihan Kerja (BLK) Mendapat lulusan bersertifikat dan berkeahlian sesuai kebutuhan industri
4. Program Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan (SILOKER) dalam rangka meningkatkan keakuratan informasi lowongan kerja dan Program Job Fair sebagai jembatan bagi lulusan yang belum bekerja

e. Rasio Gini

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten No. 12/02/36/Th. XX, 5 Februari 2026, bahwa Rasio Gini Provinsi Banten Periode September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur menggunakan Rasio Gini adalah sebesar 0,312. Angka ini menurun 0,018 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2024 yang sebesar 0,330 dan menurun 0,023 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2024 yang sebesar 0,047. Rasio Gini di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,314 dan Rasio Gini di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,234.

Selain Rasio Gini, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2025, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,84 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Gambar 3.9
Rasio Gini tahun 2015-2025 Provinsi Banten

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2025–September 2025 di antaranya distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada Maret 2025 mengalami penurunan 1,55 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,10 poin persen dan sebesar 0,45 poin persen.

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2025	20,39	37,37	42,24	100,00
September 2025	21,82	37,49	40,69	100,00
Perdesaan				
Maret 2025	25,77	41,31	32,92	100,00
September 2025	25,77	40,06	34,16	100,00
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2025	20,74	37,27	41,98	100,00
September 2025	21,84	37,72	40,44	100,00

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Gambar 3.10
Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Banten

f. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota) selama periode tertentu, dimana **PDRB Per Kapita** akan dihitung dengan membagi total Produk Domestik Regional Bruto (nilai tambah barang/jasa) provinsi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB menjadi indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan.

Komponen	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Per Kapita			
- Nilai (Juta Rupiah)	66,15	70,28	74,67
- Nilai (US\$)	4.341,07	4.434,02	4.532,45

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Gambar 3.11
PDRB Per Kapita Provinsi Banten Tahun 2023-2025

PDRB per Kapita di Provinsi Banten pada tahun 2025 sebesar 74,67 (juta rupiah) angka ini jika dilihat dari tahun 2024 selalu mengalami kenaikan dimana tahun 2023 PDRB per Kapita 70,28 Juta naik sebesar 4.39 Juta rupiah. Adapun faktor pendorong naiknya PDRB Per Kapita adalah pertumbuhan ekonomi yang konsisten, didukung oleh peningkatan produktivitas, investasi, teknologi, dan ekspor bersih, disertai dengan pengelolaan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Di Indonesia, faktor pendorong utamanya mencakup konsumsi rumah tangga, industri pengolahan, serta investasi infrastruktur dan sektor keuangan. Menjadi tantangan saat ini bahwa bonus demografi di Banten sudah mulai terjadi sedangkan Pendapatan per kapita meningkat jika PDB tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu bukan hanya faktor ekonomi saja dengan meningkatkan pendapatan masyarakat atau dengan peningkatan sektor industri, namun pengendalian jumlah penduduk dan pengurangan pengangguran juga merupakan faktor kunci keberhasilan dari peningkatan PDRB Per Kapita ini.

3.1.2. Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan LKPJ tidak terlepas dari hasil seluruh kinerja yang telah menjabarkan penjenjangan kinerja/*cascading* berkesinambungan dimulai dari realisasi kinerja output pada sub kegiatan, kinerja outcome level Program sampai pada level kinerja final outcome pada level Tujuan/Sasaran Daerah. Pada LKPJ tahun anggaran 2025 penetapan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah telah berdasarkan RPJMD 2025-2029. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut IKU Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga telah menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (SIMAKIP) untuk menyusun LKPJ pada menu pengukuran kinerja baik di level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah hal ini bertujuan agar lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Adapun hasil rincian capaian Tujuan/Sasaran Daerah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Capaian Tujuan dan Sasaran Provinsi Banten Tahun 2025

Tujuan / Sasaran			Indikator	Sifat Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintah yang Kolaboratif, Kapabel, dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat							
			Indeks Reformasi Birokrasi	P	Indeks	89,50	87,49	97,75
	1	Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	P	Indeks	3,84	4,35	113,28
			Indeks Kualitas Kebijakan	P	Indeks	66,77	84,71	126,87
	2	Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit	Indeks Sistem Merit	P	Indeks	331,00	330,50	99,71
	3	Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincuh organisasi	Nilai SAKIP/SAKP	P	Nilai	70,10	69,50	99,14
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	P	Indeks	78,00	79,89	102,42
	4	Terwujudnya Transformasi Digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	P	Nilai	65,00	64,72	99,57
	5	Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif	Indeks Integritas Nasional	P	Indeks	72,74	73,22	100,66
			Indeks Inovasi Daerah	P	Indeks	55,20	63,35	114,76
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi							

Tujuan / Sasaran		Indikator	Sifat Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	P	Persen	5,20	5,37	103,27
	1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	P	Triliun	559,39	560,27	100,16
	2	Meningkatnya Kualitas Investasi	P	Triliun	176,20	173,50	98,47
	3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	P	Persen	67,30	63,25	93,98
	4	Meningkatnya Lingkungan Kondusif dan Demokratis	P	Indeks	80,68	76,87	95,28
3	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat						
		Rasio Gini	N	Persen	0,37	0,31	116,22
	1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan	P	Persen	17,08	17,22	100,82
		Tingkat Kemiskinan	N	Persen	5,50	5,51	99,82
	2	Meningkatnya Keberfungsian Sosial, Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat	N	Indeks	0,75	1,02	64,00
	3	Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan	N	Persen	5,99	6,27	95,33
4	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						
		Indeks Modal Manusia	P	Indeks	0,56	Data belum rilis	
		Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	N	Persen	7,24	6,63	108,43
	1	Meningkatnya Intelektual dan Karakter Masyarakat	P	Tahun	9,66	9,56	98,96
		Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (RLS)	P	Tahun	13,20	13,11	99,32
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	P	Indeks	53,63	56,70	105,72
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	P	Indeks	62,10	48,59	78,24
	2	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	P	Tahun	75,20	75,33	100,17
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	N	Persen	20,30	21,10	96,06
	3	Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga	P	Indeks	64,30	62,00	96,42
	4	Meningkatnya Peran Serta Penduduk Usia Angkatan Kerja dalam Pembangunan	N	Persen	66,41	67,75	102,02
5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas						
		Indeks Williamson	N	Indeks	0,75	0,63	116,00
	1	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur	P	Indeks	3,00	3,14	104,67

Tujuan / Sasaran			Indikator	Sifat Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian
	2	Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	P	Persen	67,08	69,14	103,07
	3	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas transportasi	P	Rasio	0,70	1	144,29
6	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan							
			Penurunan Intensitas Emisi GRK	P	Persen	39,45	37,52	95,10
	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	P	Indeks	66,92	69,12	103,29
	2	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	P	Indeks	79,50	77,78	97,84
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	N	Indeks	105,17	103,58	101,51
	3	Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan	Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif	P	Persen	2,26	2,80	123,89
			Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan	P	Persen	8,93	2,72	30,46

Sumber: Olahan Bappeda Provinsi Banten, 2025

Berdasarkan tabel 3.2. misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten tahun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dilengkapi parameter yang menjadi ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. Sesuai peraturan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, predikat atau kategori tingkat ketercapaian kinerja sebagai berikut: 1) Sangat Tinggi: $\geq 91\%$; 2) Tinggi: 76 – 90,99%; 3) Sedang: 66 – 75,99%; 4) Rendah: 51 – 65,99%; dan 5) Sangat Rendah : $\geq 50,99\%$. Pada Misi 1 terdapat 1 tujuan dan 5 sasaran daerah terdapat 9 Indikator dengan rata-rata kinerja 106,01 persen, pada Misi 2 ada 2 tujuan dan 7 sasaran daerah dengan 10 indikator dengan rata-rata kinerja 98.96 persen, pada misi 3 terdapat 1 tujuan 4 sasaran dengan 10 indikator dengan rata-rata kinerja 98.37 persen, misi 4 ada 1 tujuan 3 sasaran dengan 4 indikator dengan rata-rata kinerja 113.07 persen dan misi 5 ada 1 tujuan dengan 3 sasaran dengan 6 indikator dengan rata-rata kinerja 92.51 persen. Adapun total indikator IKU Pemerintah daerah **adalah 39 indikator** dengan total rata-rata kinerja **IKU adalah 101,78 persen**. Rekapitan rincian hasil sebagai berikut:

- Sangat Tinggi sebanyak 35 Indikator
- Tinggi sebanyak 1 Indikator
- Rendah sebanyak 1 indikator
- Sangat rendah sebanyak 1 indikator
- Tidak rilis sebanyak 1 indikator

Hasil pengukuran kinerja terdapat indikator yang memperoleh nilai Rendah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan capaian 62,67 persen dimana faktor permasalahannya adalah besarnya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, untuk garis kemiskinan pada September 2025 adalah sebesar Rp715.288 per kapita per bulan yang berarti konsumsi mereka jauh di bawah standar layak peranan, komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Menurut data indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan dan di perdesaan sama-sama mengalami kenaikan, namun yang paling besar adalah di perdesaan yaitu 1,033 dan di perkotaan adalah 1,027. Penyebab utama lainnya terjadi inflasi pada daerah Lebak dan Pandeglang. Berdasarkan rilis BPS pada semester I Juni Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,79 persen dan Lebak 2,04 persen dan di Desember 2025 inflasi tertinggi ada di Kabupaten Pandeglang sebesar 3,18 persen dan disusul Lebak 2,97 persen. Hal lain juga disebabkan karena rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 5,17 orang anggota rumah tangga, artinya dalam 1 rumah terdapat lebih dari 2 anak atau jumlah tanggungan kepala keluarga. Tindak lanjut kedepan Provinsi Banten akan fokus melalui 3 (tiga) strategi kemiskinan Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, selain itu terdapat Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 050/1609-Bapp/2023, perihal Percepatan Penangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, menginstruksikan kepada Kabupaten Kota se-Banten penggunaan data kemiskinan yang sama yaitu melalui pemanfaatan data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Pemberian Akses dan Perlindungan bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar, menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi daerah.

Indikator lain yang memperoleh nilai sangat rendah adalah Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan dengan capaian 30,46 persen hal ini dikarenakan belum semua upaya pembangunan rendah karbon yang telah terdokumentasi dengan baik sehingga proses pelaporan kinerja melalui aplikasi Aksara Bappenas perlu di tingkatkan. Selain itu kegiatan untuk tutupan lahan tahun 2025 masih belum maksimal padahal kegiatan ini merupakan salah satu sektor penyerap emisi karbon. Selanjutnya kedepan perlu adanya upaya-upaya tambahan dalam melakukan mitigasi perubahan iklim pada semua sektor, terutama sektor kehutanan dengan melibatkan pihak swasta dan dengan Kementerian Kehutanan. Upaya-upaya tersebut harus terdokumentasi dan tercatat dengan baik pada Aplikasi AKSARA sehingga hasilnya dapat terhitung dan dipertanggungjawabkan.

Capaian kinerja pada tahun 2025 ini didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang menjadi prioritas pada Pemerintah Provinsi Banten yaitu pada **Bidang Pendidikan** membangun sekolah baru, membangun ruang kelas baru, membangun laboratorium dan membangun fasilitas pendidikan lainnya. Pada **Bidang Kesehatan** telah berjalan operasional Rumah Sakit Labuan dan Rumah Sakit Ciligrang, melengkapi peralatan medis terkini di RS Banten dan RS Malingping, Penguatan Sumber Daya Kesehatan, Peningkatan Jaminan sosial Kesehatan melalui BPJS, penguatan program cek kesehatan gratis dan penguatan program dalam rangka penurunan angka stunting. Pada **Bidang Infrastruktur** Pembangunan jalan desa dengan prioritas Keseluruhan Penanganan pada 5 Kab/Kota

dengan total sebanyak 71.84 km, membangun rumah layak huni, rehabilitasi jaringan irigasi. Pada **Bidang Ekonomi** penguatan pengendalian inflasi, peningkatan realisasi investasi, penguatan gerakan pangan murah dan stabilisasi harga komoditas sembako. Pada **Bidang Sosial** menyalurkan bantuan sosial, menyalurkan bantuan keuangan dana desa, bantuan jaminan sosial keluarga, penguatan data Administrasi kependudukan (Admindak), penguatan penurunan kemiskinan ekstrem. Pada **Bidang Tata Kelola Pemerintahan** penguatan kualitas kebijakan, penguatan merit sistem, penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui RB general dan RB tematik serta penguatan digitalisasi melalui peningkatan SPBE.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, tidak terlepas dari capaian kinerja masing-masing perangkat daerah, yang di rinci sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan/bidang urusan
				2024	2025	2025	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8
Misi 1:								
MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS								
Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan	1	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	94.01	94.02	94.01	99.99	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Organisasi dan RB)
Meningkatnya Pelayanan Pimpinan	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan	Indeks	N/A	3.2	3.46	108.12	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Adpimpro)
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima	3	Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks	N/A	3.2	3.45	107.81	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemenuhan Dokumen Kependudukan serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	4	Indeks Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	59.09	73	84.73	116.07	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Layanan Penghubung	5	Persentase Lembaga yang Dihubungkan Dengan Pemerintah Daerah	Persen	N/A	100	100	100	Unsur Pengelolaan Penghubung

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten
Tahun Anggaran 2025

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan/bidang urusan
				2024	2025	2025	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	6	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	3.2	3.2	3.5	109.38	Unsur Sekretariat DPRD
Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi	7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99.4	99.41	99.64	100.23	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	8	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Ekbang)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	9	Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Ekbang)
Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan	10	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sistem Province	Jumlah	6	7	9	128,57	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Meningkatnya Impelentasi Sistem Merit	12	Indeks sistem merit	Nilai	330.5	331	330.5	99.85	Unsur Kepegawaian
Meningkatnya Kompetensi Aparatur	13	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	N/A	32	49.08	153.39	Unsur Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif	14	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	10.72	11.1	10.76	96.94	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Organisasi dan RB)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3.45	3.49	3.45	98.85	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja	16	Nilai Komponen Evaluasi Kinerja	Nilai	15.37	15.5	15.48	99.87	Unsur Pengawasan
Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan	17	Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	43.15	43.65	43.25	99.08	Unsur Perencanaan

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan/bidang urusan
				2024	2025	2025	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8
Pengukuran Kinerja Daerah		dan Pengukuran Kinerja						
	18	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Provinsi	Indeks	90.92	91.5	87.92	96.09	Unsur Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	19	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Urusan Keuangan (BPKAD)
Meningkatnya akselerasi transformasi pemerintah berbasis digital di Provinsi Banten	20	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	3.47	3.48	3.69	106.03	Urusan Kominfo
Meningkatnya pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi	21	Indeks Satu Data Indonesia	Indeks	64.95	65.2	85,87	131.7	Urusan Statistik
Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah	22	Indeks Pemerintahan Digital (Aspek Keamanan Siber)	Indeks	2	2	100	100	Urusan Persandian
Meningkatnya Penggunaan Arsip Berbasis Digital	23	Tingkat Digitalisasi Arsip	Persen	93.46	93.66	97.08	103.65	Urusan Kearsipan
Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas	24	Jumlah Unit Kerja Lolos WBK/WBB M	Unit	1	2	2	100	Unsur Pengawasan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	25	Maturitas SPIP	Nilai	3.403	3.4	2.97	87.35	Unsur Pengawasan
Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	26	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	89.23	89.3	89.23	99.92	Unsur Sekretariat Daerah (Biro PBJ Dan LPSE)
Meningkatnya Budaya Kerja ASN	27	Indeks ASN BerAkhlak	Indeks	75.8	76	76,05	100,33	Unsur Sekretariat Daerah (Biro Organisasi dan RB)
Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Mendukung	28	Persentase Riset Inovasi yang Termanfaatkan	Persen	100	100	100	100	Unsur Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA)

Sasaran Peringkat Daerah	Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan/bidang urusan
				2024	2025	2025	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8
Pembangunan Daerah								
Misi 2:								
MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL								
Meningkatnya daya saing industri	1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	30.35	33.48	30.48	91.04	Urusan Perindustrian
Meningkatnya daya saing Perdagangan	2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13.06	12.83	12.36	96.34	Urusan Perdagangan
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Triliun rupiah	14.22	15.15	15.16	100.07	Urusan Pariwisata
	4	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif	Triliun Rupiah	66.92	69.52	70.51	101.42	Urusan Pariwisata
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	5	Nilai PDRB Subkategori Perikanan	Triliun Rupiah	2.3	2.5	2.36	94.4	Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Produktivitas Petani	6	Nilai PDRB Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Triliun Rupiah	24.284	25.418	26.798	105,39	Urusan pertanian
Meningkatnya Realisasi Investasi	7	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	105.6	107.44	130.2	121.18	Urusan penanaman modal
Meningkatnya Pelayanan Perizinan	8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91.4	91.55	92.69	101.25	Urusan penanaman modal
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	9	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	72.76	66.33	64.99	97.98	Urusan keuangan (bapenda)
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Kepatuhan Masyarakat terhadap	10	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin mas Sub Urusan Trantibum	Nilai	N/A	44	44,24	100.55	Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Satpol PP)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten
Tahun Anggaran 2025

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan/bidang urusan
				2024	2025	2025	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8
Perda/Perkada	11	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin mas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	N/A	22	22,50	102.27	Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Satpol PP)
Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI	12	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	6.5	6.57	101.08	Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Kemandirian Sosial	13	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	57.42	57.42	100	Urusan sosial
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	14	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	96.8	101	99.21	98.23	Urusan kelautan dan perikanan
	15	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	96.8	101	98.28	97.31	Urusan kelautan dan perikanan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	16	Nilai Tambah Pertanian Per Tenagakerja menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/Peternakan/Perikanan/Kehutanan	Rupiah	73.952.000	77.393.000	85.946.028	111.05	Urusan pertanian
Meningkatnya Pembangunan Wilayah Perdesaan	17	Persentase Desa Mandiri	Persen	8	15.67	11.07	70.64	Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi	18	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB	Persen	N/A	0.76	0,86	113.16	Urusan UKM dan koperasi
Meningkatnya Pemberdayaan UMKM	19	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2.04	2.14	4,03	188,32	Urusan UKM dan Koperasi
Misi 3:								
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF								
Terpenuhinya Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	1	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	70.18	75, 20	70.18	93.32	Urusan pendidikan

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan/bidang urusan
				2024	2025	2025	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	2	IPK Dimensi Warisan Budaya	Nilai	50.98	52.21	57,33	109.81	Urusan kebudayaan
Meningkatnya Pelestarian Tradisi Kearifan Daerah	3	IPK Dimensi Ekspresi Budaya	Nilai	27.84	29.31	42,91	146.4	Ursuan kebudayaan
Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan untuk Mewujudkan Kegemaran Membaca Masyarakat yang Kuat	4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	70.66	72.07	56.53	78.43	Urusan perpustakaan
Menurunnya Angka Kematian Ibu	5	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Persen	N/A	101	56.92	143.64	Urusan kesehatan
Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	6	Presentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	Persen	N/A	62	100	161.29	Urusan kesehatan
Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	7	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	persen	90	95,00	111.9	117.79	Urusan kesehatan
Meningkatnya 4 Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi	8	Persentase 4 Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi Berklasifikasi Utama	persen	N/A	25	25	100	Urusan kesehatan
Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	9	Persentase atlet yang memperoleh medali tingkat regional dan nasional	persen	48.24	32.14	35.42	110.21	Urusan kepemudaan dan olahraga
	10	Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang	persen	0.19	0.195	0.548	281.03	Urusan kepemudaan dan olahraga

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan/bidang urusan
				2024	2025	2025	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8
		melakukan olahraga selama seminggu terakhir						
Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender	11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0.453	0.44	0.45	97.05	Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatnya Perlindungan Anak	12	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	71.77	72.56	71.68	98.79	Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	13	Angka Kelahiran Total TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun	nilai	1.98	1,98	1.98	100	Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Terlatih di Pasar Kerja dalam Negeri dan Luar Negeri	14	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan dan Ditempatkan	persen	76.22	77.5	80.06	103.3	Urusan tenaga kerja
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Sesuai Norma Dan Hukum Ketenagakerjaan yang Berlaku	15	Tingkat Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	persen	53.93	59.73	57.5	96.27	Urusan tenaga kerja
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	16	Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan	indeks	37,09	37.14	37.09	99.87	Urusan kepemudaan dan olahraga
	17	Indeks Ketenagakerjaan Layak	indeks	62,61	62.71	62.61	99.84	Urusan kepemudaan dan olahraga
Misi 4:								
MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	persen	95.18	95.98	96.27	100.3	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	2	Persentase Tingkat Konektivitas Infrastruktur Jalan	persen	74.47	75.13	75,11	99.97	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Sasaran Peringkat Daerah	Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan/bidang urusan
				2024	2025	2025	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8
	3	Persentase Capaian Infrastruktur Keciptakarya an	persen	16	17.59	17.36	98.69	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	4	Persentase Capaian Infrastruktur Sumber Daya Air	persen	23.17	23.64	24.52	103.72	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	5	Persentase Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi	persen	9.91	20.97	17.43	83.12	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	6	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	persen	24.96	36.32	48.79	134.33	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	7	Rasio Elektrifikasi	persen	99.99	100	99.99	99.99	Urusan energi dan sumber daya mineral
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	8	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	persen	100	100	100	100	Urusan pertanahan
Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	9	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	persen	65.42	65.72	69.14	105.2	Urusan perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatnya Penataan Kawasan Permukiman	10	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangan	persen	0.65	2.33	2.33	100	Urusan perumahan dan kawasan permukiman
Terpenuhinya Penyediaan PSU Permukiman	11	Persentase Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	persen	100	100	99.58	99.58	Urusan perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	12	Rasio Konektivitas Darat	rasio	N/A	0,70	0,65	92,86	Urusan perhubungan
Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Laut	13	Konektivitas Laut	unit	N/A	10	10	100	Urusan perhubungan
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	14	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	persen	100	100	100	100	Urusan perhubungan

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan/bidang urusan	
			2024	2025	2025	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Misi 5;								
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA								
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54.32	67.53	71.3	105.58	Urusan lingkungan hidup
	2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	85.46	83.06	85.73	103.21	Urusan lingkungan hidup
	3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	69.84	64.27	65.58	102.04	Urusan lingkungan hidup
	4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	43.03	61.84	62.59	101.21	Urusan kehutanan
Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	5	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92.16	92.16	96	104.17	Urusan pangan
Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana untuk Mewujudkan Resilensi Berkelanjutan	6	Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	Persen	-2.58	13.11	10.49	80.02	Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (bencana)
Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	7	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persen	9.3	9.8	10.06	102.65	Urusan lingkungan hidup
Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses	8	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	33.33	41.67	39.31	94.34	Urusan kehutanan
Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	Persen	3.93	5.53	4.27	77.22	Urusan energi dan sumber daya mineral
Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	10	Persentase Pelayanan Kegeologian	Persen	29.96	35.91	36.11	100.56	Urusan energi dan sumber daya mineral
Meningkatnya Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	11	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persen	8.36	16.71	16.71	100	Urusan energi dan sumber daya mineral

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan/bidang urusan
				2024	2025	2025	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	12	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	1.03	1.14	0,84	73,68	Urusan energi dan sumber daya mineral

Sumber data: Olahan Bappeda 2025

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah yang memiliki andil dalam setiap pencapaian misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten. Misi 1 dengan 28 indikator rata-rata capaian sebesar 107,47%. Misi 2 terdapat 19 indikator rata-rata capaian 105,30%, Misi 3 terdapat 17 indikator rata-rata capaian 119.82%, Misi 4 ada 14 indikator rata-rata capaian 101,75% dan misi 5 terdapat 12 indikator dengan capaian rata-rata 97,36%. Adapun rata-rata hasil Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara keseluruhan adalah **104.99 persen** yang dihitung dari total 90 indikator, dengan hasil sebagai berikut;

- Sangat Tinggi sebanyak 83 Indikator
- Tinggi sebanyak 5 Indikator
- Sedang sebanyak 2 indikator

Indikator yang memperoleh predikat sedang terdapat pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan indikator persentase desa mandiri capaian 70,64 persen, penyebab permasalahannya adalah kualitas infrastruktur desa belum memadai pada sebagian wilayah, menghambat indikator layanan dasar, ketergantungan pada kemampuan fiskal desa, terutama di desa berkembang yang membutuhkan dukungan APBD/APBDes untuk naik status, belum optimalnya sinergi lintas OPD dalam mendukung indikator layanan dasar (kesehatan, pendidikan, ekonomi, akses internet), Penyerapan program pusat (Kemendesa) terkadang tidak seragam sehingga mempengaruhi progres desa mandiri di lapangan. Bantuan keuangan desa dari Provinsi Banten belum sinergi untuk penguatan ke arah pengembangan desa mandiri. Selanjutnya tindaklanjut kedepan akan berfokus pada penyusunan roadmap percepatan Desa Mandiri 2026–2027, dengan penetapan lokus prioritas kabupaten/kota, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui Bimtek terpadu, penguatan BUMDes melalui program kemitraan, penyertaan modal, dan pelatihan manajemen usaha dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Indikator selanjutnya yang mendapatkan predikat sedang adalah Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) dengan capaian kinerja 78,43 persen. Penurunan nilai dikarenakan terdapat perubahan instrumen dan tata cara perhitungan TKM yang disampaikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang dirilis pada tanggal 26 Februari 2026 dengan menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak pada turunnya seluruh nilai TKM Provinsi di seluruh Indonesia karena

terjadinya ketidaksesuaian antara target dalam renstra yang memproyeksikan TKM dengan menggunakan metode yang lama sedangkan realisasi TKM tahun 2025 telah menggunakan metode dan instrumen yang terbaru. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen. Provinsi Banten mendapatkan peringkat ke 2 Nasional, namun karena telah ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah maka target 2025 tetap mengikuti dokumen Renstra 2025-2029.

3.1.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi baik urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 17 (tujuh belas) bidang urusan pemerintahan, yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, serta perpustakaan dan kearsipan. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan terdiri atas 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian. Adapun penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas 5 (lima) bidang urusan yakni perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan penghubung. Penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas 2 (dua) bidang urusan yakni bidang urusan sekretariat DPRD, dan sekretariat daerah. penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan terdiri atas 1 (satu) bidang urusan yakni inspektorat daerah. Penyelenggaraan unsur pemerintahan umum terdiri atas 1 (satu) bidang urusan yakni kesatuan bangsa dan politik. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 meliputi 309 (tiga ratus sembilan) Program, 671 (enam ratus tujuh puluh satu) Kegiatan dan 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) Sub Kegiatan. Hasil kinerja Program yang dilaksanakan dengan menghitung indikator kinerja program yang berjumlah 421 (empat ratus dua puluh satu) pada tahun 2025. Adapun rata-rata hasil Capaian indikator kinerja program secara keseluruhan adalah 97.63 persen yang dihitung dari total 421 indikator.

Dengan hasil sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi sebanyak 366 Indikator
- b. Tinggi sebanyak 27 Indikator
- c. Sedang sebanyak 9 indikator

- d. Rendah sebanyak 3 indikator
- e. Sangat rendah sebanyak 16 indikator.

Kinerja rendah dan sangat rendah sebanyak 19 indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan pada indikator Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah dengan capaian 41,65 persen disebabkan rendahnya capaian karena sampai saat ini belum tersedianya Data Pendidikan Menengah jenjang SMK yang telah menjalankan kurikulum Muatan lokal.
 2. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang pada indikator Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional capaian 56,94 persen disebabkan Penyediaan fasilitas persampahan Regional di Provinsi Banten masih dalam tahap perencanaan, telah melalui 4 tahapan dari 7 tahapan yang harus dilalui sampai dengan selesai untuk sampai pada tersedianya prasarana TPS regional
 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada indikator Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi seluas 2.500 Hektar pertahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Ha) dengan capaian 57,71 persen disebabkan oleh masih belum optimalnya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dimana daerah yang dilakukan adalah pemeliharaan sumber mata air 1 lokasi, penyediaan kebun bibit desa 2 lokasi dan pembangunan hutan rakyat hanya ada di 1 lokasi. Penyebab lain adalah terdapat kasus pembabatan hutan dan penambangan liar sehingga proses rehabilitasi menjadi lebih sulit. Program ini krusial untuk mencegah bencana alam, menargetkan jutaan hektar untuk rehab di area kritis hutan lindung dan tambang.
 4. Dinas Pehubungan pada indikator Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian dengan capaian 64 persen disebabkan terdapat pekerjaan yang tidak jadi dilaksanakan karena bukan kewenangan Provinsi yaitu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada indikator Persentase penyediaan IPAL D yang tersambung dengan capaian 16,66 persen disebabkan masih dalam tahap perencanaan, penyediaan SPAL Regional di Provinsi Banten baru melalui 1 tahapan yaitu penyusunan Dokumen RISPAL.
 6. Dinas perhubungan pada indikator Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas dengan capaian 33,45 persen disebabkan oleh terdapat pembayaran Premi pekerja rentan/Ojol tidak dibayarkan dikarenakan data Penerima Premi tidak lengkap.
 7. Badan Pendapatan Daerah pada 1 Dinas induk dan 12 UPTD Persentase Peningkatan Pajak Daerah dengan capaian minus 268, 2 persen disebabkan oleh Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; BBNKB tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya
- Adapun rincian kinerja program diuraikan pada tabel berikut.

Tabel.3.4
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (UNIT INDUK)									
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.67	99.67	SANGAT TINGGI			
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
				Kualitas Pengelolaan Pendidikan Khusus (Kinerja)	91.00	90.79	99.77	SANGAT TINGGI	indeks kinerja yang digunakan pada aplikasi adalah Sangat Baik, merujuk penggunaan skala penilaian diatas 90%.		
				Persentasi SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B (Persen)	83.00	98.10	118.19	SANGAT TINGGI	Perhitungan berdasarkan cutoff dapodik januari 2025		
				Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah /	82.78	97.90	118.27	SANGAT TINGGI	Sumber Data APK NPD 2024		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Sederajat (Persen)							
				Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah / Sederajat (Persen)	61.67	70.40	114.16	SANGAT TINGGI	Sumber Data APM NPD 2024		
				Persentase lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan selama 1 tahun setelah kelulusan (Persen)	34.78	43.50	125.07	SANGAT TINGGI	Laporan tracer study dari aplikasi tracer study		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								
				Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Khusus (Persen)	83.96	78.13	93.06	SANGAT TINGGI	Berdasarkan kumpulan SK sejak 2019		
				Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah (Persen)	100.00	41.65	41.65	SANGAT RENDAH	Rendahnya Capaian Karena Belum Adanya Data Pendidikan Menengah Smk Yang Menjalankan Mulok	Segera menyusun data saji untuk SMK	
	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
				Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidik per mata pelajaran (Persen)	78.00	77.60	99.49	SANGAT TINGGI	Ketersediaan guru belum sepenuhnya terdistribusi sesuai kebutuhan mata pelajaran	Perlu ada pemetaan kebutuhan sesuai mapel sebelum terdistribusi	
	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase sekolah yang mendapatkan izin (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Pengajuan perizinan melalui aplikasi perizinan DPTMPSP, terkendala setiap proses izin yang keluar akan terhapus setelah terbit izin. Sehingga pencatatan berdasarkan arsip spreadsheet masing masing bidang.		
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lebak									
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	76.16	76.16	TINGGI	kegiatan terealisasi tapi beberapa lewat target bulan	sistem membaca aktivitas pada realisasi bulannya saja	
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Lebak (Persen)	54.66	67.64	123.75	SANGAT TINGGI	Belum ada rilis resmi bps terkait aps wilayah	dihitung berdasarkan data dukcapil dan peserta didik dapodik	
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pandeglang									
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	95.71	95.71	SANGAT TINGGI	-	-	
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Pandeglang (Persen)	59.30	74.10	124.96	SANGAT TINGGI			
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang									
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	95.00	95.00	SANGAT TINGGI	capaian rendah karena banyak realisasi aktivitas bulanan terlewat bulan	mempersiapkan laporan lebih cepat	
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon (Persen)	72.64	81.76	112.56	SANGAT TINGGI	Belum ada rilis BPS	Data bersumber dari data jumlah penduduk dukcapil dan dapodik	
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Tangerang									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	73.12	73.12	SEDANG	Banyak realisasi aktivitas terlewat bulan	Mempersiapkan template laporan	
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Tangerang (Persen)	70.89	64.67	91.23	SANGAT TINGGI			
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan									
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	74.34	74.34	SEDANG			
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang (Persen)	78.05	84.93	108.81	SANGAT TINGGI			
		UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan									
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	90.69	90.69	TINGGI	sumber data realisasi sakip bulanan sampai desember		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
				Cakupan Ketersediaan dan Penggunaan TIK Pendidikan (Persen)	25.00	65.27	261.08	SANGAT TINGGI	Data beasal dari olahan berikut terlampir link data 1. SMA : https://drive.google.com/file/d/1y5V16Vyrp2TKtBtq9zM0_23ZD4iFx-Cz/view 2. SMK : https://drive.google.com/file/d/16Z8_KaUzM10mUawzf9c2-v5aBMS7DHJ2/view?usp=drive_open 3. SKh : https://drive.google.com/file/d/1UgFijaRs72sNBRYC8wriRpeHD47ux5CU/view		
1.2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		DINAS KESEHATAN									
		DINAS KESEHATAN (UNIT INDUK)									
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Program penunjang urusan pemerintahan pada Dinas Kesehatan tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Efisiensi di awal triwulan 1 dan 2 menyebabkan beberapa kegiatan sempat terhambat	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di trwulan IV khususnya untuk kegiatan pengadaan	
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
				Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu (Unit)	242.00	261.00	107.85	SANGAT TINGGI	1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana, SDM, Alkes yang memadai dan dimiliki oleh Fasyankes sehingga menghambat Fasyankes untuk melakukan Akreditasi. 2. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dalam menjaga Kualitas Mutu Fasyankes	Jumlah Puskesmas 253 Unit dan Labkesda Pemerintah 8 Unit Se Provinsi Banten yang sudah terakreditasi, Sesuai Peraturan Menkes (Permenkes) Nomor 34 Tahun 2022 Yaitu : 1. Adanya Bantuan Pemenuhan Alat Kesehatan dari	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										Kementrian Kesehatan (Sophie) 2. Adanya Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi di 8 Kab/Kota	
				Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Program pemberian Jaminan kesehatan masyarakat banten membutuhkan anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya untuk menjaga keberlangsungan UHC (Universal health coverage) yang sampai saat ini sudah tercapai	melakukan rencana penganggaran tahun selanjutnya (2026) untuk menjaga keberlangsungan UHC sesuai kebutuhan.	
				Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Persen)	100.00	101.00	101.00	SANGAT TINGGI	1. Kepatuhan Kabupaten / Kota dalam mengisi Rencana Kebutuhan Obat masih kurang 2. Beberapa obat yang dibutuhkan hanya tersedia di trw III - IV	1. Membuat surat edaran kepala Dinkes Provinsi Banten terkait RKO e Monev setiap tahun 2. Mensubstitusi obat yang sulit dicari di katalog	
				Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Keterlambatan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota saat kejadian bencana, data tidak lengkap.	1. Sosialisasi Pelaporan kejadian bencana kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas 2. Monitoring dan Pembinaan Ke Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Puskesmas dalam penanggulangan krisis kesehatan 3. Melakukan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										edukasi kepada masyarakat yang terdampak atau berisiko krisis kesehatan akibat bencana 4. Rekap laporan per kejadian bencana di Kabupaten/Kota	
				Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. Terlambat dalam deteksi dan pelaporan kejadian KLB 2. Keterbatasan Obat/APD di kab/kota	1. Sosialisasi laporan KLB (Surveilans aktif, pelaporan cepat) 2. Pembinaan/edukasi serta keterlibatan peran tokoh lokal dalam penanganan KLB 3. Monitoring kejadian KLB di kab/kota 4. Usulan bantuan logistik ke pusat (Buffer stock)	
				Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular. Penyakit Tidak Menular. dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. Pelaporan kasus belum real time 2. logistik di kabupaten / Kota belum terpenuhi	1. Koordinasi dengan Kabupaten / Kota terkait pelaporan data 2. Mendorong kabupaten / kota untuk pemenuhan logistik	
				Rasio Daya Tampung RS Rujukan (Rasio)	0.14	0.14	100.00	SANGAT TINGGI	Data jumlah penduduk tahun 2025 masih menggunakan data semester I dikarenakan Dukcapil di DP3AKKB belum merelease jumlah penduduk		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									provinsi banten terbaru sampai dengan Desember		
				Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (Persen)	80.16	97.05	121.07	SANGAT TINGGI	Pada Tahun 2025, RS di Provinsi Banten yang terakreditasi berjumlah 132 Rumah Sakit dari total jumlah RS se Provinsi Banten sebanyak 136 RS	Melaksanakan pembinaan terhadap RS yang belum terakreditasi	
				Cakupan Kualitas Keluarga Sehat (Persen)	64.00	87.50	136.72	SANGAT TINGGI	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat pada tahun 2025 telah mencapai target, tetapi dari 16 Indikator Kesehatan Keluarga Sehat, Kesehatan Kerja dan Gizi yang belum mencapai target adalah : 1. Pelayanan Kesehatan kepada usia produktif 2. Persentase ibu hamil kurang energi kronik yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Meningkatkan kembali capaian ke - 2 indikator tersebut yang belum maksimal agar tercapai 16 indikator seluruhnya	
				Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban) (Persen)	90.00	96.79	107.54	SANGAT TINGGI	Belum optimalnya Kabupaten / Kota dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penuntasan BABS	1. Monitoring atau mengkoordinasikan dengan Dinkes Kab/Kota dan puskesmas yang akan melaksanakan deklarasi desa ODF (Open Defecation Free) untuk capaian di tahun 2025. 2. Adanya pemeriksaan rutin dan Pengawasan Perawatan fasilitas terhadap sarana sanitasi untuk	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										memastikan bahwa fasilitas tersebut dalam kondisi baik dan bersih. 3. Membuat surat edaran Gubernur terkait percepatan penuntasan BABS	
	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
				Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan (Orang)	470.00	905.00	192.55	SANGAT TINGGI	Kurangnya rencana kebutuhan tenaga kesehatan	tenaga kesehatan yang direkrut dan didistribusikan bukan hanya sebatas tenaga kesehatan penugasan khusus tetapi juga termasuk dalam rekrutmen pegawai BLUD RS milik pemprov Banten, menambahkan dokumen rencana kebutuhan tenaga kesehatan di Fasyankes Provinsi dan Kabupaten / Kota.	
	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Belum optimalnya pengawasan sarana distribusi kefarmasian dan Penyalur Alat Kesehatan secara langsung	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan secara langsung sekaligus pembinaan ke sarana distribusi kefarmasian dan Penyalur Alat Kesehatan	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Kurangnya pelaksanaan pengawasan UKOT dan Kosmetik secara langsung	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan UKOT dan Kosmetik secara langsung	
	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
				Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Kelompok)	15.00	15.00	100.00	SANGAT TINGGI	Kegiatan Kerjasama dengan 15 kelompok Masyarakat sudah Terlaksana dalam Kegiatan FGD bersama kelompok Masyarakat	Meningkatkan kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam mendukung program kesehatan	
		UPTD RSUD Banten									
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. belum optimalnya sistem digitalisasi secara terintegrasi di rsud banten 2. belum optimalnya penataan ruang layanan contoh ruang operasi, ruang igd, serta parkir 3. belum optimalnya kualitas SDM manajemen dan tenaga kesehatan	1. meningkatkan sistem digitalisasi secara terintegrasi 2. menyusun penataan ruang layanan sesuai dengan standar 3. penguatan pembinaan kompetensi SDM manajemen dan tenaga kesehatan	
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
				Persentase standar bagian penunjang sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. belum optimalnya sarpras di rsud banten 2. kurangnya tenaga kesehatan dokter spesialis 3. belum optimalnya kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan	1. mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana 2. mengusulkan penambahan tenaga kesehatan dokter spesialis 3. optimalisasi kerjasama terhadap institusi pendidikan kesehatan	
		UPTD RSUD Malingping									
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.43	99.43	SANGAT TINGGI	1. untuk pengajuan belanja menggunakan sistem Tambahan Uang Persediaan (TU-P) 2. Untuk sementara Belum ada Surat Tanda Setoran (STS) TUP dikarenakan Belanja TUP selesai per tanggal 31 Desember 2025 3. Anggaran yang terealisasi untuk sementara tetapi belum masuk ke dalam laporan realisasi, dikarenakan masih ada beberapa belanja yang belum di belanjakan. 4. estimasi sisa rencana belanja BLUD (Belanja Pegawai, Belanja Barjas dan Belanja Modal)	1. Koordinasi dengan bendahara pengeluaran dan BPKAD Provinsi Banten 2. Dokumen Rekapitulasi Belanja BLUD terlampir	
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
				Capaian variabel indikator Penunjang, Keperawatan dan Pelayanan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping (%)	100.00	75.00	75.00	SEDANG	1. belum optimalnya pelayanan dokter spesialis dan farmasi (waktu tunggu) 2. keterbatasan SDM dokter spesialis dan dokter umum dalam memberikan pelayanan 3. pelaksanaan ews (early warning system) masih kurang dan belum optimalnya respon tim	1. penguatan pembinaan pelayanan 2. usulan penambahan tenaga medis 3. peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga lainnya 4. melakukan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									keawatdaruratan (tim code blue) 4. masih terdapat pasien pulang paksa 5. belum optimalnya kompetensi komunikasi SDM	evaluasi terhadap pasien pulang paksa	
		UPTD Pelatihan Kesehatan									
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persesn)	100.00	98.08	98.08	SANGAT TINGGI	Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, terdapat kesalahan saat pembobotan pada pengadaan peralatan mesin lainnya yang seharusnya target 5 alat peraga tetapi diinput 7 alat peraga sehingga mempengaruhi realisasi program penunjang keseluruhan	Ke depan akan lebih teliti lagi dalam melaksanakan pembobotan target kinerja	
	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat (Orang)	480.00	480.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. kurangnya fasilitator, maaster of training di UPELKES 2. Masih kurangnya ruangan pelatihan 3. Sarana prasarana pendukung masih kurang optimal dalam rangka mendukung akreditasi Pelkes	1. melaksanakan TOT dan mengusulkan widyaiswara khusus untuk Pelkes 2. mengusulkan penambahan ruang kelas dan sarana prasarana upelkes	
		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah									
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persesn)	100.00	99.74	99.74	SANGAT TINGGI	Secara keseluruhan permasalahan pada TW-IV ada dipelaksanaan realisasi kegiatan karena tidak selarasnya realisasi fisik dengan realisasi keuangan menyebabkan target fisik dan keuangan tidak sesuai dengan rancangan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditentukan. Adapun untuk realisasi keuangan dan fisik kegiatan, jika dilihat dari target 1 tahun ini semua kegiatan dilaksanakan dan dibayarkan	Tindak lanjut dari permasalahan tersebut sebagai berikut : - Penguatan Perencanaan dan Penjadwalan Kegiatan - Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Berkala - Penguatan Koordinasi Pelaksana Kegiatan - Peningkatan Kepatuhan terhadap Rencana Pelaksanaan Kegiatan - Perbaikan Administrasi dan Dokumentasi Kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
				Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Parameeter)	128.00	154.00	120.31	SANGAT TINGGI	1. Kebutuhan Reagen/BHP yang tidak selalu tersedia, dikarenakan barang tersebut merupakan barang produk luar negri (import) yang membutuhkan waktu lama untuk proses pengadaannya, waktu Exipre date yang pendek, bila tdp perubahan rincian pkt ASB harus mengajukan SHSBJ baru. 2. Terdapat Proses Validasi/verifikasi metode yang membutuhkan waktu dan pemilihan metode pengujian 3. Dalam pengembangan parameter uji yang terakreditasi diperlukan pelatihan teknis	1. Melakukan identifikasi ulang kebutuhan BHP dan pemilihan pemasok secara selektif sehingga bisa memastikan dalam pengadaan reagen/BHP bisa tepat waktu shg pengujian tidak terkendala untuk reagen/bhp yang dibutuhkan tersebut. 2. Melakukan pemilihan metode dan menentukan waktu Valid/Verif dan kbthn BHP 3. Melakukan identifikasi pelatihan untuk peningkatan kompetensi petugas yang mendukung dalam pengembangan parameter	
		UPTD RSUD Labuan									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	96.06	96.06	SANGAT TINGGI	Kegiatan pada Program ini sudah dilakukan guna meningkatkan capaian untuk indikator ini, namun terdapat kendala diakibatkan karena SK terbaru terkait Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP)	Koordinasi dengan BKAD terkait pengajuan TUP	
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
				Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (Persen)	100.00	97.29	97.29	SANGAT TINGGI	1. masih kurangnya dokter umum dan dokter spesialis untuk menangani kasus di ruang icu 2. masih kurangnya tenaga keperawatan yang belum bersertifikat di ruang icu 3. belum adanya HCU (high care unit)	1. mengusulkan penambahan dokter umum dan dokter spesialis 2. peningkatan kompetensi tenaga keperawatan di ruang icu 3. melakukan pengadaan HCU (high care unit)	
		UPTD RSUD Ciligrang									
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	97.55	97.55	SANGAT TINGGI	Kegiatan pada Program ini sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian untuk indikator ini, namun terdapat kendala di akibatkan karena SK Terbaru terkait Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP)	Koordinasi dengan BPKAD terkait pengajuan TUP	
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
				Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (Persen)	100.00	96.08	96.08	SANGAT TINGGI	1. belum adanya tenaga pemulasaran jenazah 2. tenaga keperawatan yg memiliki sertiikat icu hanya 3 orang dari 15 orang 3. belum optimalnya SDM dokter spesialis 4. belum optimalnya sarpras penunjang medis	1. mengusulkan tenaga pemulasaran jenazah 2. peningkatan kompetensi tenaga keperawatan di icu 3. pembinaan dokter spesialis 4. mengusulkan ketersediaan sarpras penunjang medis	
1.3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UNIT INDUK)									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	98.27	98.27	SANGAT TINGGI	Tidak terdapat permasalahan.	-	
	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
				Persentase penanganan banjir (%)	52.30	42.05	80.40	TINGGI	Sepanjang 281,501 km2 luas kawasan banjir di Provinsi Banten, baru tertangani sebesar 118,368 km2.	Akan terus ditingkatkan pada tahun 2026 dengan pembangunan tanggul sungai dan revitalisasi situ.	
				Persentase penanganan situ/embung (%)	8.03	6.57	81.82	TINGGI	Pada tahun 2025 tidak terdapat pekerjaan penanganan embung, dari total 137 embung kewenangan provinsi baru 9 embung yang tertangani.	Akan dilaksanakan pada tahun 2026 pembangunan Embung Aryana dan Pembangunan Embung BIP	
				Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	73.51	62.45	84.95	TINGGI	Dari panjang jaringan irigasi kewenangan provinsi sebesar 370.805 meter, dalam kondisi baik adalah 243.614 meter.	Akan ditingkatkan pada tahun 2026 dengan Rehabilitasi Irigasi Desa Pangkalan Teluknaga dan Rehabilitasi Irigasi Cilampe	
	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
				Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota (%)	18.00	15.43	85.72	TINGGI	Masih dalam tahap perencanaan. Proses penyediaan SPAM Regional di Provinsi Banten telah melalui 6 tahapan dari 7 tahapan yang harus dilalui.	Akan dilaksanakan pada tahun mendatang	
	1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								
				Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (%)	2.09	1.19	56.94	RENDAH	Penyediaan fasilitas persampahan Regional di Provinsi Banten masih dalam tahap perencanaan, telah melalui 4 tahapan dari 7 tahapan yang harus dilalui.	Akan terus dilaksanakan pada tahun mendatang	
	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
				Persentase penyediaan IPAL D yang tersambung (%)	58.93	9.82	16.66	SANGAT RENDAH	Masih dalam tahap perencanaan, penyediaan SPAL Regional di Provinsi Banten baru melalui 1 tahapan yaitu penyusunan Dokumen RISPAL.	Akan terus dilaksanakan pada tahun mendatang	
	1.03.07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	66.67	66.67	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak terdapat permasalahan.	Akan ditingkatkan pada tahun mendatang.	
	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
				Persentase Pengelolaan Gedung strategis Provinsi (%)	95.24	90.48	95.00	SANGAT TINGGI	Terdampak kebijakan efisiensi	Akan ditingkatkan pada tahun 2026 melalui pemeliharaan gedung strategis.	
	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								
				Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (%)	90.91	90.91	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak terdapat permasalahan.	Sesuai Target	
	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
				Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	98.00	96.35	98.32	SANGAT TINGGI	Dari total panjang ruas jalan kewenangan Provinsi yaitu 856,993 Km, kondisi jalan mantap adalah 825,690 Km, masih tersisa 31,303 Km jalan dalam kondisi rusak.	Akan terus ditingkatkan pada tahun 2026, melalui rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan dan pemeliharaan jalan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	98.00	88.30	90.10	SANGAT TINGGI	Dari panjang jembatan kewenangan Provinsi Banten sepanjang 8.555,48 meter, jembatan dalam kondisi mantap adalah 7.554,38 meter dan masih terdapat 1.001,10 meter jembatan rusak.	Akan ditingkatkan pada tahun 2026 melalui pekerjaan pembangunan jembatan, penggantian jembatan dan rehabilitasi jembatan.	
				Persentase Jalan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	85.10	85.75	100.76	SANGAT TINGGI	Sepanjang 734,83 km jalan kewenangan provinsi sudah sesuai standar, masih terdapat 122,163 km jalan yang belum sesuai standar.	Akan terus ditingkatkan pada tahun 2026 melalui Pelebaran Jalan Menambah Lajur dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	
				Persentase Penyelesaian Jalan Baru (%)	70.00	67.28	96.11	SANGAT TINGGI	Pembangunan jalan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 merupakan jalan konektivitas desa. Terdapat 1 pembangunan jalan yang pelaksanaannya lewat tahun.	Akan terus ditingkatkan pada tahun 2026 melalui pembangunan jalan konektivitas desa lainnya.	
	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
				Persentase pembinaan tenaga ahli konstruksi (%)	33.37	27.89	83.58	TINGGI	Dikarenakan adanya kebijakan efisiensi, target pelaksanaan pelatihan yang semula ditargetkan sebanyak 250 orang hanya terlaksana sebanyak 170 orang.	Akan terus di tingkatkan pada tahun 2026.	
	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
				Persentase Ketidaksesuaian	57.00	57.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	Sesuai Target	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemanfaatan Ruang (%)							
				Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Pada Triwulan IV Forum Penataan Ruang Provinsi Banten tidak mengadakan rapat. Rapat Forum Penataan Ruang pada anggaran murni dianggarkan sebanyak 4 (empat) kali, pada anggaran efisiensi berkurang menjadi 1 (satu) kali rapat. Rapat FPR sudah dilaksanakan pada triwulan I sampai dengan triwulan III		
				Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang (%)	20.00	20.00	100.00	SANGAT TINGGI	Pada tahun anggaran 2025 ini disusun 4 kajian teknis dan 1 laporan yaitu: 1. Kajian Teknis KSP Perbatasan Wilayah Kerja Pembangunan I 2. Kajian Teknis KSP Perbatasan Wilayah Kerja Pembangunan II 3. Kajian Teknis KSP Perbatasan Wilayah Kerja Pembangunan III 4. Kajian Teknis KSP Perbatasan Provinsi antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta 5. Laporan Updating Sistem Informasi Penataan Ruang (Gistaru)		
		UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau									
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak Ada		
	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
				Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak Ada		
				Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak Ada		
		UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisdane									
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	tidak ada kendala	-	
	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			SUMBER DAYA AIR (SDA)								
				Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	tidak ada kendala	-	
		UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna									
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100.00	100.01	100.01	SANGAT TINGGI	tidak ada		
	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
				Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
				Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
		UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.99	99.99	SANGAT TINGGI			
	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Tangerang (%)	100.00	98.71	98.71	SANGAT TINGGI			
		UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon									
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Serang Cilegon (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
		UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100.00	98.15	98.15	SANGAT TINGGI			
	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang (%)	100.00	430.00	430.00	SANGAT TINGGI			
		UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak									
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100.00	99.99	99.99	SANGAT TINGGI			
	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
		UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Konstruksi									
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak ada		
	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
				Persentase layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak Ada		
1.4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100.00	98.82	98.82	SANGAT TINGGI	Target belum tercapai 100%, terdapat 3 item pengadaan barang Pengadaan barang tidak dilaksanakan karena harga peralatan tersebut tidak sesuai dalam DPA	Untuk selanjutnya 3 item pengadaan barang akan dilanjutkan tahun 2026 dengan menyesuaikan harga barang tersebut	
	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PERUMAHAN								
				Persentase Penyediaan Rumah korban bencana skala provinsi (Persen)	81.17	81.17	100.00	SANGAT TINGGI			
				Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi (%)	75.00	75.00	100.00	SANGAT TINGGI			
	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
				Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Ha)	89.62	89.62	100.00	SANGAT TINGGI			
	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
				Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman (Persen)	97.24	96.88	99.63	SANGAT TINGGI	Target belum tercapai, pekerjaan peningkatan PSU Permukiman tahun 2025 target 1895 lokasi terealisasi 1988 lokasi, sehingga ada 7 lokasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesalahan dalam penginpitan di sistem (SIPDRI)	Untuk selanjutnya akan lebih cermat lagi	
	1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
				Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ut (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
1.5	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Persentase Ketercapaian Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdapat pada penilaian AKIP 2024 yang dinilai oleh inspektorat untuk tahun 2024, untuk penilaian AKIP 2025 menunggu LHE 2025 yang sudah selesai di periksa inpektorat.	sehubungan dengan program penunjang urusan menunggu laporan hasil evaluasi dari inspektorat	
	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			UMUM								
				Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. permasalahan kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional sehingga sedikit menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan	1. mengajukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk operasional kegiatan	
				Persentase Penegakan Perda dan Perkada (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Terkait Perda 1 th 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah seringkali permasalahan yang ditemukan di lapangan ketika ada badan usaha yang seharusnya sudah membayar pajak tetapi karena perizinannya masih dalam proses atau belum ada izin susah untuk di tagih pajaknya.	Solusinya dengan adanya Pergub no 1 tahun 2025 Tetang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perusahaan atau badan usaha yang sedang dalam proses perizinan sudah bisa di tagihkan pajak nya	
	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
				Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	97.59	97.59	SANGAT TINGGI	1. Dari Segi Target keseluruhan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dari 40 sub kegiatan ada 1 yang tidak tercapai yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (1 unit), karena termasuk kedalam perdiksi silpa yang dilaporkan ke BPKAD Provinsi Banten pada tanggal 5 November 2025; 2. adanya efisensi anggaran belanja makan minum pada Sub kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	Dari 40 Sub Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,	
	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
				Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Dokumen Keputusan Gubernur tentang Rencana Kontijensi, rapergub tentang petunjuk pelaksanaan rehabilitasi dan renkonstruksi Pasca Bencana dan dokumen Kegub tentang Sekber SPAB belum dilegalkan oleh Biro Hukum	BPBD Provinsi Banten sudah membuat surat yang ditujukan ke Biro Hukum terkait Legal drafting Kegub Renkon Kekerangan, Rapergub tentang petunjuk pelaksanaan rehab/renkon pasca bencana, untuk disahkan oleh Kepala Daerah dan BPBD akan selalu berkoordinasi ke Biro Hukum sampai	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										dokumen tersebut dilegalkan	
				Persentase Penanganan Pra Bencana (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	tidak ada permasalahan target sesuai dengan rencana	-	
				Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
				Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
1.6	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
		DINAS SOSIAL									
		DINAS SOSIAL (UNIT INDUK)									
	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	104.34	104.34	SANGAT TINGGI	-	-	
	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
				Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial (Persen)	100.00	153.60	153.60	SANGAT TINGGI	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								
				Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. Sebagian Besar WNM Korban Tindak Kekerasan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada instansi terkait; 2. Banyaknya WNM korban Tindak Kekerasan merupakan WNM ilegal.		
	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
				Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
				Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. Pengangkatan anak antar WNI lebih banyak dibanding Pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal	Berkoordinasi dengan Subbag PEP dan BAPPEDA agar target Pengangkatan anak Antar WNI ditambah dan Target Pengangkatan Anak oleh orang Tua Tunggal dikurangi	
				Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Belum seluruhnya keluarga miskin ekstrem tercover oleh program jaminan sosial	Perlu penambahan alokasi anggaran bantuan sosial untuk keluarga miskin	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Pegelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Pemutakhiran DTSEN oleh Kabupaten/Kota belum optimal	Koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk updating DTSEN melalui Ground Checking	
				Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Masyarakat tidak mampu yang memiliki embrio usaha belum mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Diperlukan penambahan anggaran untuk bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	
	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
				Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana, diantaranya: 1. Kondisi Gudang Bufferstock yang dimiliki saat ini belum memadai baik dari segi luasnya, standar bangunan Gudang, ataupun dari peralatan pendukung pergudangan. 2. Kendaraan operasional pendukung kebencanaan sudah dalam kondisi rusak berat/tidak layak pakai. Kendaraan yang ada saat ini merupakan kendaraan operasional dari Kemensos RI sebagai aset pinjam pakai.		
		UPTD Perlindungan Sosial									
	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	98.69	98.69	SANGAT TINGGI	Kegiatan sudah dilaksanakan dan realisasi keuangan final sedang diproses pada LRA	Berkoordinasi dengan sub bag keuangan dan bendahara	
	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	tidak ada		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Kegiatan sudah dilaksanakan. Realisasi keuangan final menunggu proses pencatatan pada LRA.	Berkoordinasi dengan Subbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.	
		UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial									
	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Seluruh Kegiatan telah dilaksanakan, sudah terealisasi anggaran sampai dengan periode ini	proses nihil dari operator bendahara pembantu pengeluaran UPTD PSRTS	
	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100.00	85.00	85.00	TINGGI	-	-	
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	

Tabel.3.5
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.1	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (UNIT INDUK)									
	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	71.95	71.95	SEDANG	-	-	
	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								
				Persentase Perencanaan Tenaga Kerja (Persen)	9.00	9.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
				Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja (Persen)	10.00	30.00	300.00	SANGAT TINGGI	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Produktivitas Tenaga Kerja (Persen)	5.06	5.06	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
				Persentase Kesempatan Kerja (Persen)	14.00	14.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
				Persentase Hubungan Industrial (Persen)	4.48	4.48	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
				Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja (Persen)	10.00	10.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
				Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persen)	10.00	10.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
	2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
				Persentase Kondisi Lingkungan Kerja (Persen)	10.00	10.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
		UPTD Latihan Kerja									
	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
				Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja (Persen)	10.00	10.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
2.2	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA									
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)									
	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD (%)	12.50	25.96	207.68	SANGAT TINGGI	Capaian Kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender Pada Tahun 2025 sebesar 25,96 % melebihi target yang ditetapkan sebesar 12.50 %, walaupun secara capaian sudah melebihi target, penyusunan GAP GBS dalam proses perencanaan dan penganggaran belum optimal dan belum menjadi dasar dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)	Penguatan dalam penyusunan GAP GBS dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah	
				Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	18.82	14.00	74.39	SEDANG	Keterwakilan Perempuan Parlemen di DPRD Provinsi Banten belum mencapai 30% , jumlah Perempuan Parlemen untuk periode 2025-2029 sebanyak 14 orang atau sebesar 14 % dari jumlah seluruh anggota parlemen yang berjumlah 100 orang	1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. 2. Meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif. 3. Memberikan pendidikan dan pelatihan politik kepada perempuan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Kontribusi Perempuan dalam pemberdayaan Ekonomi (%)	38.13	32.34	84.82	TINGGI	1. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sumbangan pendapatan perempuan di Provinsi Banten sebesar 32,34% dan masih berada di bawah capaian nasional sebesar 37,31%, hal ini menggambarkan bahwa kontribusi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi di provinsi banten belum optimal. 2. Evaluasi pelatihan ekonomi perempuan belum dilakukan secara konsisten, sehingga belum terukur sejauhmana keberhasilan dan efektivitas program pelatihan tersebut	Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan, sehingga apa yang menjadi kendala pasca pelatihan dapat diberikan solusi yang tepat, misalnya terkait dengan kendala permodalan, packing produk dsb. Sehingga kedepannya dapat dikolaorasikan dengan dinas atau stakeholder lainnya	
	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
				Cakupan peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan (%)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (Persen)	45.45	39.06	85.94	TINGGI	Capaian Kinerja persenetase peningkatan penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga belum sesuai target, yang mana realisasi sebesar 39.06 dari target 45.45 pada tahun 2025, dari 64 lembaga pembedayaan perempuan di provinsi banten baru 25 lembaga yang memiliki layanan peningkatan kualitas keluarga	Penguatan lembaga pemberdayaan perempuan agar dapat berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan layanan peningkatan kualitas keluarga	
	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
				Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	74.20	69.07	93.09	SANGAT TINGGI	Data Capaian IPHA yang disajikan merupakan capaian Tahun 2024, dikarenakan utk capaian tahun 2025 masih belum dirilis KemenPPPA, berdasarkan capaian tersebut, capaian kinerja IPHA di Provinsi Banten Belum	Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam menyusun dan melaksanakan program perlindungan anak	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									sesuai target, hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain :		
	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	86.12	83.13	96.53	SANGAT TINGGI	Data capaian IPKA masih menggunakan capaian tahun 2024, dikarenakan capaian tahun 2025 belum dirilis oleh KemenPPPA. Angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Banten dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, berdasarkan data Simfoni PPA jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 772 kasu dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 690 kasus	Adanya upaya masif dari stakeholder terkait untuk secara bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak									
	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD PPA (Persen)	100.00	69.78	69.78	SEDANG	aktivitas kinerja yang telah direncanakan dalam 1 tahun banyak mengalami keterlambatan sehingga nilai kinerja nya menjadi kurang optimal		
	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
				Persentase cakupan perempuan korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
				Persentase cakupan anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
2.3	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
		DINAS KETAHANAN PANGAN									
		DINAS KETAHANAN PANGAN (UNIT INDUK)									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	97.92	97.92	SANGAT TINGGI	- Beban kerja administratif yang tinggi, terutama pada periode penyusunan perencanaan dan pelaporan. - Kendala teknis sistem informasi, seperti gangguan akses aplikasi keuangan, perencanaan, atau persuratan. - Variasi kompetensi SDM, sehingga beberapa unit memerlukan peningkatan kapasitas.	- Ketersediaan SDM yang kompeten dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan perencanaan. - Koordinasi internal yang solid antarbidang/subbagian. - Pemanfaatan teknologi informasi yang mempercepat proses administrasi dan pelaporan. - Kepatuhan terhadap regulasi dan SOP, sehingga proses kerja lebih terarah.	
	2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	- Kurang optimalnya sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam dan bencana sosial. - Lemahnya Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan cadangan komoditas lainnya selain beras	- Mengembangkan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam dan bencana sosial. - Penguatan Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan cadangan komoditas lainnya selain beras - Pengembangan Sistem cadangan pangan melalui lembaga usaha ekonomi produktif atau lembaga usaha lainnya	
	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
				Skor Pola Pangan Harapan (Persen)	88.00	88.00	100.00	SANGAT TINGGI	- 'Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan masyarakat; - 'Kurangnya promosi akan pentingnya konsumen pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); - 'Terbatasnya	- 'Meningkatkan promosi dan sosialisasi pola konsumsi dan beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA) ke semua lapisan masyarakat; - 'Meningkatkan peran BUMD/Koperasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, yang berakibat pada tingginya ongkos angkut.	atau badan lainnya untuk menyerap hasil produksi petani pada saat panen. - 'Penguatan kelembagaan lembaga distribusi pangan masyarakat - 'Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat melalui impor pangan antar daerah - 'Peningkatan keterjangkauan pangan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah	
	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
				Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Persen)	72.00	72.00	100.00	SANGAT TINGGI	Masih rendahnya produksi pangan di wilayah rawan pangan dibandingkan dengan kebutuhan dan Masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut	Penanganan wilayah rawan pangan memerlukan pendekatan terpadu antara peningkatan produksi pangan dan pengentasan kemiskinan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										perbaikan akses sumber daya	
	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Persen)	75.00	75.00	100.00	SANGAT TINGGI	- belum terpenuhinya tenaga fungsional uji mutu hasil pangan segar asal tumbuha (PSAT) yang ada, sampai dengan tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten baru memiliki 1 (satu) orang tenaga fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian; - Perubahan Sistem dalam pendafaran dari manual ke online, dimana para pelaku usaha kecil tidak mempunyai teknologinya sehingga sulit untuk mengaksesnya	- Penguatan kelembagaan dan SDM pengawas mutu pangan - Perbanyak sosialisasi cara pendaftaran PSAT secara online di OSS baik secara cetak dan elektronik	
		UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan									
	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	- Beban kerja administratif yang tinggi, terutama pada periode penyusunan perencanaan dan pelaporan. - Kendala teknis sistem informasi, seperti gangguan akses aplikasi keuangan, perencanaan, atau persuratan. - Variasi kompetensi SDM, sehingga beberapa unit memerlukan peningkatan kapasitas.	- akan melaksanakan - Koordinasi internal yang solid antarbidang/subbagian. - Pemanfaatan teknologi informasi yang mempercepat proses administrasi dan pelaporan. - Kepatuhan terhadap regulasi dan SOP, sehingga proses kerja lebih terarah	
	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Persen)	75.00	75.00	100.00	SANGAT TINGGI	jika merujuk pada target rekomendasi perizinan PSAT sebesar 75 maka capaiannya menjadi 134 rekomendasi perizinan PSAT yang dilayani oleh Provinsi Banten dan 35 rekomendasi perizinan PSAT yang dilayani Kabupaten/Kota, sehingga total perizinan PSAT di Provinsi Banten menjadi 169 rekomendasi (sertifikat dan register).	akan terus meningkatkan Pelayanan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Provinsi Banten dilaksanakan melalui OSS dan SIPEKA.	
2.4	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG										

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	PERTANAHAN										
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM								
				Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (Persen)	100.00	200.00	200.00	SANGAT TINGGI			
	2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
				Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Persen)	100.00	200.00	200.00	SANGAT TINGGI			
	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								
				Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota (Persen)	100.00	200.00	200.00	SANGAT TINGGI			
2.5	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)									
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Indikator Program Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah 100%, realisasi tahun 2025 adalah 100%, adalah Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	Perhitungan Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : = $\frac{\text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Kegiatan yang diampu}} \times 100\%$ = 100%	
	2.11.02		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								
				Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Program Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang Berkualitas adalah 100%, realisasi tahun 2025 adalah 100%,	Perhitungan persentase dokumen perencanaan LH yang berkualitas adalah Jumlah dokumen perencanaan LH yang disusun yang sudah	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									adalah persentase dokumen perencanaan LH yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	mengintegrasikan TPB dibagi Jumlah dokumen perencanaan yang divalidasi dikali 100% = $5/5 \times 100\%$ = 100%	
	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
				Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Persen)	71.00	71.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup sampai pada triwulan IV adalah 71 persen, seluruh kegiatan pada triwulan I s/d IV sudah dilaksanakan sesuai target yang meliputi pemantauan udara ambien, pemantauan laut, pemantauan sungai, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta rapat inventarisasi GRK.	Terus berupaya dalam meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Persen)	14.00	14.00	100.00	SANGAT TINGGI	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati pada triwulan 4 sudah sesuai target, dan realisasi fisik kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati sudah mencapai 100%	Merealisasikan program pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai dengan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati	
	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
				Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Laporan Triwulan IV Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sudah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 54,05 %. Hal ini dikarenakan adanya anggaran tambahan di perubahan, sehingga realisasi keuangannya belum terupdate di bagian keuangan	akan segera dilakukan rekon dengan bagian keuangan, agar realisasi keuangan meningkat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
				Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup (Persen)	90.00	90.00	100.00	SANGAT TINGGI	Realisasi kegiatan tidak mengalami kendala. Meskipun terjadi efisiensi anggaran, pelaksanaan pengawasan tetap tercapai sesuai target melalui penyesuaian metode menjadi pengawasan langsung dan tidak langsung.	Memastikan penyesuaian metode pengawasan (langsung dan tidak langsung) tetap diperkuat melalui perencanaan yang lebih efisien, serta meningkatkan konsolidasi data dan pelaporan agar capaian pengawasan terdokumentasi secara lengkap dan akurat.	
	2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (Persen)	11.76	11.76	100.00	SANGAT TINGGI	Target Capaian Kinerja Triwulan-4 sebesar 11,76 % tercapai sebesar 29,41 % yang berasal dari pelaksanaan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH di 5 MHA yaitu MHA Cibedug, MHA Cisungsang, MHA Cirompang, MHA Citorek dan MHA Cisititu .	Perhitungan Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH adalah = Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100% = $5/17 \times 100\%$ = 29,41%	
	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Presentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target capaian kinerja TW-4 sebesar 100 % terealisasi 100 % berasal dari Pelaksanaan : 1. Sub keg Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye LH target 50 org realisasi 50 org, berlokasi di Pasar Anyar Kampung Berkilir Kota Tangerang. 2. Sub Keg Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH target 2 lembaga realisasi 2 lembaga yaitu Bank Sampah Ciceri Jaya Berseri (Sumurpecung Kec Serang) dan Bank Sampah Al Malik (Kec Pontang, Kab Serang).	Menyampaikan Laporan pelaksanaan Program ke Ketua Tim PEP untuk dijadikan bahan LKIP DLHK Prov Banten	
	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaga/7)	68.00	68.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. Target tahunan sebesar 68 tercapai sebesar 99 atau setara (145%) yang berasal dari SAP 56 sekolah, SAN 30 sekolah dan SAM 13 sekolah; 2. Target Capaian Kinerja Triwulan-4 sebesar 0 (tidak ada target) dengan realisasi 17 berasal 43 lembaga berasal SAN dan SAM tahun 2025 (Target di TW 3); 3. Target Capaian Kinerja TW-3 sebesar 17 (tertunda) tercapai sebesar 43 sesuai undangan penerima penghargaan SAN dan SAM dari KLHK	Menyampaikan laporan capaian program ke Ketua Tim PEP untuk dijadikan bahan LAKIP DLHK Prov Banten.	
	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
				Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala. Meskipun terjadi efisiensi anggaran, pengelolaan pengaduan tetap berjalan optimal. Pendekatan yang digunakan tidak hanya melalui perjalanan dinas, tetapi juga melalui audiensi, koordinasi, dan	Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan pengaduan, mengoptimalkan metode non-perjudin untuk menjaga efisiensi, serta meningkatkan kualitas dokumentasi dan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									kolaborasi.	pelaporan evidence agar lebih tertata dan akuntabel.	
	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
				Persentase penanganan sampah sesuai kewenangan provinsi (Persen)	100.00	108.32	108.32	SANGAT TINGGI	Realisasi anggaran Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional tahun anggaran 2025 sampai dengan Triwulan IV (Minggu ke 2 bulan Desember) Sebesar Rp. 6.151.213.938,- (97,12%) dan ditargetkan realisasi pada akhir bulan desember sebesar 6,305,664,000 (99,56%).	Tindak lanjut Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional adalah akan dilakukan evaluasi dan monitoring pada tahun 2026 untuk memastikan bahwa bantuan kendaraan roda 3 digunakan sesuai peruntukannya	
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang									
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	91.70	91.70	SANGAT TINGGI	Pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala, semua kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan target kinerja.	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP	
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	105.10	105.10	SANGAT TINGGI	Tidak ada	Tidak ada	
		UPTD Laboratorium Lingkungan									
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Triwulan IV adalah 97.85% dengan realisasi sebesar 97.85%. Hasil pencapaian dari masing-masing 5 Sub Kegiatan pendukung; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Triwulan IV adalah 99.32% dengan realisasi sebesar 99.32%. Hasil pencapaian dari masing-masing sub kegiatan pendukung;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Kegiatan Administrasi Umum dan Keg. Pemeliharaan BMD telah dilaksanakan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
				Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan (Persen)	22.50	22.50	100.00	SANGAT TINGGI	Target Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada TW IV adalah 57.62% dengan realisasi sebesar 57.62%. Hasil pencapaian dari masing-masing sub kegiatan pendukung : 1. Sub Keg. pengambilan contoh uji telah tercapai 100% (124 paket) 2. Sub Keg. Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Prov.i telah tercapai 100% (6 Unit) 3. Sub Keg. Pengelolaan Lab. telah tercapai 100% (2 doK) 4. Sub Keg. Pemberian Informasi telah tercapai 100% (2 doK)	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup telah dilaksanakan.	
		UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan									
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			DAERAH PROVINSI								
				Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	77.86	77.86	TINGGI	Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prov pada TW 4 dgn indikatorb Peningkatan Ketercapaian dari seluruh keg pada program penunjang urusan pemerintahan daerah prov adlh 38.71% dgn reakisasi 35.88%. Hal ini di kmkn Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air & Listrik, Subkeg penyelenggaraan rapat koordinasi, Subkeg Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Lapangan Perorangan belum optimal melaksanakan kegiatan karena adanya kendala teknis.	Anggaran yang tidak terserap dijadikan silpa pada akhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaanya koordinasi dan konsultasi dengan Subbag Keuangan dan Subbag PEP induk	
		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten									
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Triwulan IV adalah 92,39% dengan realisasi sebesar 90,04%. Hal ini dikarenakan pada Kegiatan Pengadaan BMD dari Target 100% hanya terealisasi 97,46% akan tetapi seluruh target capaian kinerja pada TW IV ini telah terealisasikan secara fisik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Kegiatan Administrasi Umum, Keg. Penyediaan Jasa Penunjang, Keg. Pemeliharaan BMD dan Keg. Pengadaan BMD telah dilaksanakan sesuai target dan jadwal.	
2.6	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA									
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)									
	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
				Persentase Cakupan layanan pendaftaran penduduk (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun (Persen)	99.00	96.47	97.44	SANGAT TINGGI	Capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun belum memenuhi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain : 1. Belum optimalnya kerjasamanya antara faskes dengan dukcapil kab/kota dalam penerbitan dokumen akta kelahiran 2. Belum optimalnya layanan jemput bola bagi daerah yang capaian kepemilikan dokumen akta kelahiran masih rendah (daerah terluar, tertinggal)	1. Penguatan kerjasama antara faskes dan dukcapil kab/kota dalam penerbitan dokumen akta kelahiran 2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan layanan jemput bola dengan lokus daerah terluar, tertinggal	
				Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian (Persen)	100.00	99.79	99.79	SANGAT TINGGI	Capaian kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian belum sesuai target, dikarenakan adanya gap atas pembatalan akta kematian. Pembatalan akta kematian lebih dikarenakan adanya pemalsuan dokumen oleh oknum tidak bertanggung untuk keperluan tertentu, misal terkait hutang piutang dsb	Penguatan pengawasan dalam penerbitan akta kematian dan penerbitan sanksi hukum bagi penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen kematian	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	=	
	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
				Persentase Cakupan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan (Persen)	29.27	30.76	105.09	SANGAT TINGGI	Dibutuhkan sedikitnya 7 (tujuh) dokumen yang harus dipersiapkan, di antaranya (1) PKS, dilanjutkan dengan (2) penyusunan petunjuk teknis (juknis), (3) dibuatkan pertanggungjawaban menjaga kerahasiaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) untuk pimpinan OPD/BHI dan (4) non-disclosure agreement (NDA) untuk penanggung jawab, tim teknis dan para operator), (5) membuat surat penunjukan jaringan, (6) sertifikat ISO 27001	Optimalisasi Pemanfaatan DTSEN oleh Perangkat Daerah dalam proses perencanaan dan Penganggaran, yang mana data DTSEN tersebut merupakan data kompilasi SIAK, DTKS, P3KE agar dalam pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran dan meminimalisir data exclusion dan inclusion error	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									(7) not(7) nota dinas untuk pengajuan hak akses.		
	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								
				Ketersediaan Profil Kependudukan (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
2.7	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.18	99.18	SANGAT TINGGI	o Secara umum sampai dengan Triwulan IV (empat) pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi tidak menemui kendala, permasalahan yang bersifat penyelesaian administrasi (keterlambatan SPJ, proses pengadaan barang/jasa).	o Dari permasalahan yang ada pada tahun 2025 ini, sebagai bahan koreksi atau upaya perbaikan pada tahun yang akan, yaitu mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										(SPJ) dan proses pengadaan barang/jasa.	
	2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA								
				Cakupan Jumlah Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (Desa)	69.00	73.00	105.80	SANGAT TINGGI	o Secara umum sampai dengan Triwulan IV (empat) pelaksanaan program Penataan Desa tidak menemui permasalahan.	- Dari permasalahan yang ada pada tahun 2025 ini, telah dijadikan catatan sebagai bahan koreksi dan upaya perbaikan pada tahun yang akan; - Capaian kinerja program melebihi target yang ditetapkan, dari target 69 Desa yang difasilitasi, sampai dengan akhir triwulan IV terdapat 73 Desa yang telah difasilitasi atau 105,80%.	
	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase desa yang melakukan kerjasama (Persen)	1.19	1.19	100.00	SANGAT TINGGI	o Secara umum pada program Peningkatan Kerjasama Desa tidak terdapat kendala yang substantive, tetapi pada tindak lanjut atas hasil kesekatan kerjasama yang sudah dilakukan tahun sebelumnya, masih perlu dilakukan pendampingan oleh DPMD Provinsi dan DPMD Kabupaten; o Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga, masih sebatas agenda pertemuan.	o Perlunya koordinasi dan komunikasi lanjutan, guna menindaklanjuti hasil kerjasama antar desa yang sudah dilakukan, melalui pertemuan/fasilitasi oleh DPMD Provinsi/Kabupaten serta perangkat daerah terkait. o Perlunya fasilitasi yang intens terkait kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga oleh DPMD Provinsi/Kabupaten, asosiasi/lembaga profesi maupun pihak lembaga swadaya masyarakat/NGO. o Perlunya meningkatkan peran LKD/BUMDes/BUMDesma sebagai sumber peningkatan PADes.	
	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang (Persen)	6.41	26.95	420.44	SANGAT TINGGI	o Secara umum pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan Desa tidak menemui kendala	o Untuk penetapan target indikator kinerja program (outcome) pada tahun yang akan datang akan disesuaikan dengan kondisi capaian tahun ini.	
	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
				Cakupan jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat di desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang (Desa)	69.00	84.00	121.74	SANGAT TINGGI	o Even Gelar TTG Tingkat Nasional Tahun 2025 dimana Provinsi Banten ditunjuk sebagai tuan rumah, yang anggarannya teralokasi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, belum terlaksana; o Penyerapan anggaran pada sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, masih rendah.	o Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal RI, terkait kepastian jadwal pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional Tahun 2025; o Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Ketua TP-PKK Provinsi Banten, terkait percepatan agenda kegiatan TP-PKK Tahun 2025.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
2.8	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA									
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)									
	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
				Median kawin pertama perempuan pada kelompok umur 10-49 tahun (Tahun)	22.20	21.00	94.59	SANGAT TINGGI	1. Target Kinerja Untuk Indikator Median Usian Kawin Pertama (MUKP) dihitung per tahun, sehingga capaian triwulan IV belum ada. 2. Berdasarkan data tahun 2024, MUKP Provinsi Banten masih berada di bawah angka nasional sebesar 22.00 dibandingkan capaian nasional sebesar 22,3	1. Peningkatan edukasi terkait kesehatan reproduksi serta pendewasaan usia perkawinan 2. Bersinergi dengan pengadilan agama dalam menekan dispensasi perkawinan anak	
	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Angka prevalensi kontrasepsi moden/ Modern Contraceptive (mCPR) (Persen)	61.87	66.00	106.68	SANGAT TINGGI	1. Capaian Angka prevalensi kontrasepsi moden/ Modern Contraceptive (mCPR) dihitung per tahun, sehingga capaian triwulan IV tahun 2025 belum ada. 2. Berdasarkan data Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU), capaian mCPR Provinsi Banten sebesar 63.6 berada di atas capaian angka nasional sebesar 61.7, hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat dalam kesertaan ber-KB dan penggunaan kontrasepsi moden/ Modern Contraceptive (mCPR) meningkat.	1. Peningkatan Edukasi dan Advokasi tentang kesertaan ber KB 2. Kolaborasi lintas sektor dalam pembinaan keluarga berencana	
	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Specific Fertility Rate/ASFR) (Nilai)	8.00	13.90	173.75	SANGAT TINGGI	1. Capaian Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Specific Fertility Rate/ASFR) dihitung per tahun, sehingga capaian TW IV Tahun 2025 belum tersedia 2. Berdasarkan data Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU), capaian ASFR Provinsi Banten sebesar 13.9, masih berada di bawah capaian angka nasional sebesar 18, hal ini menggambarkan kinerja yang positif, dikarenakan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun mengalami penurunan. Akan tetapi, target PD belum tercapai.	1. Advokasi dan Edukasi tentang dampak perkawinan dini serta kesehatan reproduksi 2. Kolaborasi lintas sektor dan stake holder dalam upaya meningkatkan pembinaan keluarga sejahtera 3. Reformulasi target ASFR untuk dokumen perencanaan periode berikutnya	
2.9	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
		DINAS PERHUBUNGAN									
		DINAS PERHUBUNGAN (UNIT INDUK)									
	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan	100.00	100.97	100.97	SANGAT TINGGI	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)							
	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
				Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Persen)	100.00	93.67	93.67	SANGAT TINGGI	Tidak dapat permasalahan	Melakukan GAKUM bersama instansi berwenang.....	
				Persentase pelaksanaan MRL dan penyediaan, pemeliharaan jalan (Persen)	100.00	86.08	86.08	TINGGI	Tidak ada..		
				Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi (Persen)	50.00	56.76	113.52	SANGAT TINGGI	Tidak Ada	-	
				persentase perencanaan transportasi yang diterapkan (Persen)	50.00	85.65	171.30	SANGAT TINGGI	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
				Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas (Persen)	20.00	6.69	33.45	SANGAT RENDAH	Terdapat pembayaran Premi pekerja rentan/Ojol tidak dibayarkan dikarenakan data Penerima Premi tidak lengkap	Koordinasi dengan Dinas Sosial terkait Data Penerima Premi Pekerja Rentan	
				Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (Persen)	40.00	29.04	72.60	SEDANG	Tidak adan masalah	Tidak ada	
	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PELAYARAN								
				Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (Persen)	100.00	87.05	87.05	TINGGI	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
				Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Persen)	100.00	97.30	97.30	SANGAT TINGGI	Ada beberapa SPJ yang masih dalam proses keuangan	Menunggu realisasi keuangan	
	2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								
				Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (Persen)	100.00	64.00	64.00	RENDAH	Ada pekerjaan yang tidak diizinkan untuk dilaksanakan oleh BPKAD karena bukan kewenangan Provinsi yaitu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Tidak akan dilaksanakan pada tahun perencanaan selanjutnya	
		UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan									
	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	98.43	98.43	SANGAT TINGGI	Tidak ada	Tidak ada	
	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			(LLAJ)								
				Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi (Persen)	75.00	95.80	127.73	SANGAT TINGGI	Tidak ada	Tidak ada	
2.10	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN									
	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak Ada	kegiatan yang telah dilaksanakan: 1. Penyusunan DPA Perubahan TA 2025 2. Pengumpulan data sektoral kominfo 3. Penyusunan SKM 4. Penyusunan LKIP 5. Penyusunan DOKumen Keuangan Akhir Tahun 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 9. Pengadaan Mebel (Kursi, Backdrop dan Hordeng) 10. Pengadaan Mesin Lainnya (Printer)	
	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah (Persen)	100.00	96.67	96.67	SANGAT TINGGI	Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 96,6 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa terpenuhi kebutuhannya terhadap informasi yang disampaikan. * Kepuasan publik bersifat dinamis. Harapan masyarakat terus naik. Ketika layanan membaik, standar penilaian ikut naik. * Tidak semua kanal informasi menjangkau warga dengan kondisi dan kebutuhan yang sama. Ada segmen kecil yang butuh	Mengidentifikasi segmen responden yang belum puas. Kanal, wilayah, atau kelompok usia. * Memperdalam umpan balik kualitatif. Bukan menambah angka, tapi mendengar alasan. * Menyesuaikan pesan dan medium agar lebih tepat sasaran. * Menjadikan hasil ini sebagai baseline, bukan garis akhir.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									pendekatan berbeda. * Waktu dan situasi memengaruhi persepsi.		
				Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF (Persen)	48.48	82.50	170.17	SANGAT TINGGI	Tidak Ada	Berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN Nomor: 009/Kep/KI-Banten/X/2025 tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025 terdapat 33 OPD yang mendapatkan Kualifikasi INFORMATIF dari 40 OPD.	
	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet (Persen)	96.97	100.00	103.12	SANGAT TINGGI	Tidak Ada		
				Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
2.11	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (persen)	100.00	98.42	98.42	SANGAT TINGGI			
	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Koperasi Aktif (persen)	25.00	25.00	100.00	SANGAT TINGGI	koperasi aktif karena masih banyak koperasi yang tidak menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, tidak melaksanakan RAT, serta memiliki tata kelola dan kapasitas pengurus yang lemah, sementara di sisi lain OPD terbatas oleh jumlah dan kompetensi SDM pengawas, keterbatasan anggaran, luasnya wilayah binaan, serta belum optimalnya pemanfaatan data dan sistem informasi koperasi, sehingga pengawasan dan pembinaan belum dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.	dilakukan melalui penguatan pengawasan dan pembinaan koperasi secara terarah dengan memprioritaskan koperasi tidak aktif, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi melalui pelatihan tata kelola dan manajemen, optimalisasi pendataan dan pemutakhiran database koperasi berbasis sistem informasi, penguatan peran pendamping koperasi, serta sinergi lintas OPD dan pemangku kepentingan guna mendukung efektivitas pengawasan, sehingga mendorong peningkatan jumlah koperasi yang aktif dan sehat.	
	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PERKOPERASIAN								
				Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	masih rendahnya partisipasi pengurus dan pengelola koperasi dalam mengikuti pelatihan, keterbatasan anggaran dan kuota peserta, belum meratanya jangkauan pelatihan hingga ke wilayah tertentu, serta kurangnya pemetaan kebutuhan kompetensi yang spesifik. Selain itu, keterbatasan tindak lanjut pasca-diklat dan monitoring hasil pelatihan menyebabkan peningkatan kapasitas SDM koperasi belum sepenuhnya terukur dan berkelanjutan.	melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi SDM koperasi secara lebih terarah, memperluas jangkauan dan metode pelatihan melalui sistem blended learning atau kerja sama dengan lembaga diklat, serta meningkatkan sosialisasi agar partisipasi pengurus dan pengelola koperasi lebih optimal. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan dan monitoring pasca-diklat untuk memastikan penerapan hasil pelatihan di koperasi serta mengukur dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
				Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan) (%)	25.00	25.00	100.00	SANGAT TINGGI	masih rendahnya kualitas tata kelola dan manajemen koperasi, belum terpenuhinya persyaratan legalitas dan administrasi untuk menjalin kemitraan dan pembiayaan, lemahnya daya saing usaha koperasi, serta terbatasnya jejaring dan pendampingan sehingga akses terhadap pasar dan lembaga keuangan belum optimal	memperkuat pembinaan tata kelola dan manajemen koperasi, memfasilitasi pemenuhan legalitas dan kelengkapan administrasi, mendorong peningkatan kualitas dan daya saing usaha koperasi, serta memperluas jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan melalui pendampingan dan fasilitasi kerja sama agar akses pasar dan pembiayaan semakin meningkat.	
	2.17.07		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat (Persen)	5.00	5.00	100.00	SANGAT TINGGI	masih rendahnya kapasitas manajerial dan literasi keuangan pelaku usaha, keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan, belum optimalnya akses pasar dan digitalisasi, serta kendala dalam pemenuhan standar dan legalitas usaha. Selain itu, keterbatasan data yang akurat, minimnya pendampingan berkelanjutan, serta faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku dan daya beli masyarakat turut mempengaruhi kemampuan usaha kecil dalam meningkatkan omset secara signifikan.	Tindak lanjut yang dilakukan OPD meliputi penguatan pelatihan dan pendampingan usaha, fasilitasi akses pembiayaan dan legalitas, perluasan akses pasar termasuk digitalisasi, serta pemutakhiran data UMKM agar program lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan omset usaha kecil.	
	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
				Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan) (persen)	25.00	25.00	100.00	SANGAT TINGGI	Kegiatan Telah Dilaksanakan Sesuai dengan anggaran kas		
2.12	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		SATU PINTU									
	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.62	99.62	SANGAT TINGGI	Pengadaan peralatan dan mesin (Personal komputer, Laptop, printer, alat pendingin) ditunda karena adanya efisiensi anggaran setelah DPPA TA. 2025 ditetapkan.	Menyesuaikan dengan rencana kerja Perubahan tahun 2026 untuk memenuhi pengadaan peralatan dan mesin dimaksud.	
	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
				Persentase Perencanaan Investasi Sektor Unggulan yang ditindaklanjuti (Persen)	95.45	86.36	90.48	SANGAT TINGGI	1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM pelaksana, 2. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan data penyusunan perencanaan penanaman modal 3. Belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan kegiatan	1. Melakukan plotting staf khusus atau pelatihan teknis bagi SDM yang ada. 2. Membangun sistem sharing data yang lebih formal dengan pihak terkait 3. Melakukan penjadwalan koordinasi baik internal maupun dengan external untuk menyamakan persepsi.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase kegiatan usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal (Persen)	75.00	84.00	112.00	SANGAT TINGGI			
	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								
				Presentase Minat Pelaku Usaha Penanaman Modal (Persen)	75.00	119.95	159.93	SANGAT TINGGI	1. Belum optimalnya proses tindak lanjut minat investasi dari calon investor menjadi komitmen investasi yang nyata. 2. Segmentasi Audiens yang Kurang Presisi: Iklan di media massa (terutama TV) sering kali menjangkau audiens umum, sehingga pesan promosi investasi tidak selalu sampai secara eksklusif kepada kelompok investor strategis. 3. Kesiapan Proyek yang dipromosikan dalam forum belum sepenuhnya siap secara teknis (masalah pembebasan lahan atau perizinan dasar)	1. Digitalisasi Data Investasi (Single Repository): Membangun atau memperkuat sistem informasi investasi terpadu yang menyinkronkan data potensi dari seluruh kabupaten/kota di Banten agar informasi yang diberikan kepada investor selalu mutakhir dan akurat. 2. Memperkuat koordinasi dengan kementerian BKPM untuk memastikan insentif yang dijanjikan dalam promosi sejalan dengan regulasi terbaru Total peminatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										sd 2025 = 4.798 dengan target total 4.000	
	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
				Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan NSPK (Persen)	95.00	97.36	102.48	SANGAT TINGGI	1. Parameter pada sistem informasi (oss rba) belum ditampilkan 2. Update informasi pemutakhiran sistem oss rba tidak diketahui oleh PTSP daerah 3. Lambatnya respon oss rba atas permasalahan yang muncul yang dialami oleh petugas PTSP maupun pemohon perizinan berusaha	1. Berkordinasi dan konsultasi kepada BKPM RI maupun kementerian lembaga yang menerbitkan NSPK 2. Melakukan inventarisasi kendala dan masalah bersama dengan OPD teknis secara periodik	
	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Penanaman Modal (Persen)	75.00	77.26	103.01	SANGAT TINGGI	1. Pelaksanaan realisasi penanaman modal TW IV tidak di rilis pada TW IV tahun 2025. tetapi akan di rilis pada Bulan Januari 2026 2. Realisasi yang disampaikan adalah akumulasi realisasi TW I, TW II dan TW III tahun 2025	Realisasi TW IV 2025 akan disampaikan di bulan Januari tahun 2026, setelah pelaku usaha menyampaikan LKPM TW IV tahun 2025	
	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
				Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Persen)	75.00	71.70	95.59	SANGAT TINGGI			
2.13	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA										
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA									
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA (UNIT INDUK)									
	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.99	99.99	SANGAT TINGGI	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang terdampak efesiensi anggaran terutama pada sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan rapat persiapan dan belanja rutin dalam rangka mendukung pelayanan dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										yang terkait dengan aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025	
	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
				Persentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan (%)	16.38	16.38	100.00	SANGAT TINGGI	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran seperti pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi	Sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan rapat persiapan dan belanja kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan dinas yang terkait dengan aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025	
				Persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan (%)	27.00	27.00	100.00	SANGAT TINGGI	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran khususnya pada kegiatan organisasi kepemudaan	Pada Triwulan IV terdapat event Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) yang melibatkan beberapa organisasi kepemudaan dan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										masyarakat	
	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
				Persentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga (%)	46.00	46.00	100.00	SANGAT TINGGI	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran dan adanya beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan menunggu jadwal kementerian pemuda dan olahraga	Sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan rapat persiapan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan daya saing keolahragaan yang terkait dengan aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025	
				Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga (%)	5.00	10.00	200.00	SANGAT TINGGI	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran dan adanya beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan menunggu jadwal kementerian pemuda dan olahraga khususnya pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan	Sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan rapat persiapan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan daya saing keolahragaan yang terkait dengan aktivitas penunjang yang	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									Organisasi Olahraga	terdampak efesiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025	
				Persentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional (%)	11.00	11.00	100.00	SANGAT TINGGI	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran dan adanya beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan menunggu jadwal kementerian pemuda dan olahraga khususnya pada kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Pada triwulan IV terdapat event POPNAS dengan hasil pada event popnas meraih peringkat 5 (lima) Nasional	
	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								
				Persentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan (Persen)	86.00	86.00	100.00	SANGAT TINGGI	Adanya efesiensi anggaran pada beberapa kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang mendukung program kepramukaan pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi sehingga	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										pelayanan kepada anggota pramuka sesuai dengan target 2025	
		UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga									
	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	72.54	72.54	SEDANG	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran	Sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan rapat persiapan dan belanja rutin dalam rangka mendukung pelayanan dinas yang terkait dengan aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025	
	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
				Persentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (%)	30.70	30.70	100.00	SANGAT TINGGI	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran dan adanya beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan menunggu jadwal	akan ditindaklanjuti sesuai arahan pada catatan diatas dengan selalu berkoordinasi dan konsultasi terlebih dahulu	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									kementerian pemuda dan olahraga khususnya pada kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Olahraga		
2.14	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN									
	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
2.15	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN									
	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Persen)	74.60	59.04	79.14	TINGGI	adanya pembaruan standar penilaian Indeks KAMI, yang sebelumnya di tahun 2024 menggunakan indeks KAMI ver. 4.3 menjadi Indeks KAMI ver 5.0. Perubahan Struktur Penilaian: Kontrol: Meningkat dari 141 menjadi 185 kontrol. Area Penilaian: Bertambah dari 6 menjadi 7 area. Nilai Maksimal: Naik dari 645 menjadi 918.	Melakukan pemetaan ulang terhadap 185 kontrol baru. perlu mengidentifikasi kontrol mana saja yang sudah terpenuhi dan mana yang belum, terutama pada area ke-7 yang baru ditambahkan.	
2.16	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (UNIT INDUK)									
	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
				Kualitas pengembangan kebudayaan (Kinerja)	91.00	91.72	100.79	SANGAT TINGGI			
	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
				Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola (Persen)	95.00	195.00	205.26	SANGAT TINGGI	seluruh cagar tingkat provinsi telah dilestarikan, satu cagar provinsi yang terdaftar sebelumnya meningkat	Meningkatkan jumlah cagar budaya peringkat provinsi dan mengoptimalkan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									menjadi cagar nasional.	pengelolaan dan pelestarian cagar budaya peringkat provinsi.	
		UPTD Taman Budaya dan Museum									
	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	86.32	86.32	TINGGI	Beberapa realisasi aktivitas terlambat dilaksanakan sedangkan sistem membaca hanya pada bulan berjalan saja	mempersiapkan template laporan dan percepatan dalam penyusunan laporan	
	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								
				Pertumbuhan Jumlah Pengunjung museum dan Taman Budaya provinsi (Persen)	20.00	20.00	100.00	SANGAT TINGGI			
2.17	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.36	99.36	SANGAT TINGGI	ketcapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah belanja dilakukan sesuai kebutuhan.	Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
				Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Persen)	21.00	21.00	100.00	SANGAT TINGGI	target penambahan koleksi buku pada tahun 2025 sebanyak 1.720 eksemplar. capaian sampe dengan triwulan IV sebnyak 5.773 eksemplar/1791 judul, presentase penambahan koleksi buku tahun 2025 mencapai 3,8% dari target 3,00% sudah melebihi target. dengan rumus perhitungan adalah Jumlah koleksi tahun n - Jumlah koleksi tahun n-1/jumlah koleksi tahun n-1 x 100 = 1.791 ÷ 1.725= 66/1.725 x 100 = 3,8%	1. Penyusunan kebutuhan koleksi berbasis kebutuhan pengguna 2. Penyesuaian pengadaan dengan standar dan kebijakan koleksi 3. Peningkatan kualitas seleksi dan verifikasi koleksi	
2.18	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
				Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi (Persen)	21.00	21.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target tahun 2025 sebesar 24% atau 4002 arsip. capaian tahun 2025 sebesar 4002 arsip atau 24% sesuai target perencanaan. rumus perhitungan sebagai berikut: Jumlah arsip statis dan	meningkatkan pengelolaan arsip pada depo arsip	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									terjaga terprservasi / Jumlah Arsip statis dan terjaga x 100% = 117.665 / 117.665 x 100% = 100		
	2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								
				Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media (Persen)	24.00	29.80	124.17	SANGAT TINGGI	target triwulan IV sebesar 6% dari capaian tahun lalu sebesar 58.624 yaitu 3.517, capaian triwulan IV sudah mencapai target sebesar 6% atau 3.517 arsip. total capaian tahun 2025 melebihi target sebesar 25,25% atau 14.714 arsip dari capaian tahun lalu sebesar 58.624. dengan rumus perhitungan : Jumlah arsip statis yang dialih media / Jumlah Arsip statis didepo arsip x 100% = 72.978 / 117.665 x 100% = 62,02%	1. meningkatkan pengelolaan alih media arsip statis 2. Penguatan sistem penyimpanan dan pengamanan arsip digital 3. Peningkatan kapasitas SDM kearsipan	

Tabel.3.6
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
3	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.1	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT INDUK)									
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.70	99.70	SANGAT TINGGI	Target capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi di triwulan 4 ini sejumlah 23,51 tercapai dengan jumlah realisasi sebesar 23,51. pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terkena pembatasan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan arahan BPKAD.	akan ditindaklanjuti dengan peningkatan kinerja pelayanan organisasi dan kegiatan yang tepat waktu sesuai target program penunjang urusan pemerintah daerah	
	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PULAU-PULAU KECIL								
				Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi (hektar) (Hektar)	2.00	2.00	100.00	SANGAT TINGGI	Capaian program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil berupa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi pada triwulan IV seluas 2 Ha telah tercapai	Tidak ada	
	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
				Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan (Rekom) (Rekom)	125.00	212.00	169.60	SANGAT TINGGI	Target capaian program perikanan tangkap tw IV pada sub kegiatan Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan (Rekom) dengan target 35 rekom, sedangkan realisasi 72 rekomendasi	capaian di tw IV sudah melebihi target artinya data kapal perikanan di Banten sudah sebagian hampir memiliki izin	
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	84.093.66	83.860.85	99.72	SANGAT TINGGI	Target produksi perikanan tangkap pada triwulan IV sebesar 24.182,32ton dengan rincian Oktober 6.839,76 ton, November 7.949,75 ton dan Desember 9.392,81ton	program dapat berjalan dengan baik	
	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani Produksi Perikanan Budidaya (Unit)	120.00	271.00	225.83	SANGAT TINGGI	Tidak ada permasalahan, Target Kinerja Program Triwulan IV yaitu 30 Unit Usaha Terlayani, Dan realisasi capaian kinerja program Triwulan IV yaitu 22 unit Pembudidaya dengan Rincinan : 1. Oktober 0 Unit Pembudidaya 2. November 22 Unit Pembudidaya (Keg. Fasilitas Izin dan Keg. Penyediaan Data) 3. Desember 0 Unit Pembudidaya Target tidak tercapai karena efisinesi anggaran di bulan Oktober yaitu Keg. Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin usaha Perikanan Budidaya dengan target 20 Pembudidaya	Evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan capaian kinerja selanjutnya	
	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
				Luas Laut yang terawasi pelaku usaha perikanan yang terawasi (Mill)	550.00	527.66	95.94	SANGAT TINGGI	Capaian program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa pengawasan secara rutin dimana target triwulan IV seluas 140mil laut yang terawasi telah tercapai, hal tersebut didukung oleh kinerja triwulan IV berupa pengawasan patroli laut	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									dengan menggunakan KP. Latimeria di perairan Provinsi Banten.		
				pelaku usaha perikanan yang terawasi (Unit Usaha)	80.00	76.00	95.00	SANGAT TINGGI	capaian program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berupa pengawasan secara rutin dimana target triwulan IV sebanyak 20 pelaku usaha yang terawasi tercapai. Hal tersebut didukung oleh kinerja triwulan IV berupa pengawasan dan pembinaan secara langsung ke lokasi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan baik yang berada di perairan maupun di darat	Tidak ada	
	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
				Jumlah sertifikat usaha pemasaran dan pengolahan perikanan Jumlah hasil uji mutu perikanan (Sertifikat)	180.00	599.00	332.78	SANGAT TINGGI	- Target Kinerja Program Triwulan IV adalah 45 Sertifikat dan realisasi capaian kinerja program pada Triwulan IV adalah 53 Sertifikat dengan Rincian : bulan Oktober 28 Sertifikat, bulan November 19 Sertifikat dan bulan	- Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kinerja dan pergub yang berlaku	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									Desember 6 Sertifikat. - Target fisik pada TW IV sebesar 19,06 % telah tercapai dan sesuai.		
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara									
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	87.09	87.09	TINGGI	Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada TW IV adalah 9,58% dengan realisasi sebesar 9,58%. Hasil pencapaian kegiatan: 1. Administrasi umum perangkat daerah 100% (1 laporan) 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% (2 paket) 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% (6 laporan) 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% (8 unit)	Tidak ada karena semua kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sudah selesai dilaksanakan	
	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAA								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			N KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
				Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi (hektar) (Hektar)	2.00	2.00	100.00	SANGAT TINGGI	Capaian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi berupa luasan sejumlah 2 hektar berada di triwulan 4 atau akhir tahun dengan realisasi 2 hektar yang didukung kegiatan berupa penanaman vegetasi Pantai, Transplantasi terumbu karang dan Pelakasnaan kegiatan pelatihan atraktor cumi dan sekolah lapang pesisir.	Perlunya rehabilitasi berkelanjutan berbasis Masyarakat yang mandiri dengan pemanfaatan CSR di sekitar lingkungan pesisir setempat serta pemantauan dan pelaporan berbasis data spasial sehingga realtime kondisi ekosistem pesisir terpantau.	
	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	125.00	125.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target capaian program pengelolaan perikanan tangkap di wilayah utara berupa produksi perikanan tangkap Pelabuhan perikanan di triwulan 4 ini sejumlah 25.228,10 tercapai dengan jumlah realisasi produksi perikanan tangkap Pelabuhan perikanan di wilayah utara sebesar 24182,32 yang tersebar di beberapa Pelabuhan perikanan diantaranya yaitu Pelabuhan Perikanan Cituis, Kronjo, Tanjung Pasir, Lontar, Terate, Wadas,	Berkaitan dengan capaian program produksi perikanan tangkap maka diperlukan dukungan pendataan produksi perikanan tangkap Pelabuhan perikanan yang efektif. Oleh karena itu maka telah dilakukan pengelolaan data pusat informasi Pelabuhan perikanan di wilayah utara serta integrasi dengan system informasi data kelautan dan perikanan provinsi Banten (SISIK IKAN)	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									Pulokali dan Anyer.		
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan									
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.71	99.71	SANGAT TINGGI	Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada TW IV adalah 47,94% dengan realisasi sebesar 34.02%. hal ini terjadi karena ada pembatasan anggaran, sehingga: 1. Administrasi umum perangkat daerah 76,17% 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49,77% 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30,22% (hanya	mengoptimalkan anggaran yang dapat dilaksanakan hingga mendapatkan hasil yang maksimal.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									kendaraan, gedung lainnya tidak dilaksanakan		
	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
				Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi (hektar) (Hektar)	2.00	2.00	100.00	SANGAT TINGGI	Capaian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi berupa luasan sejumlah 2 hektar berada di triwulan 4 atau akhir tahun dengan realisasi 2 hektar yang didukung kegiatan berupa penanaman vegetasi Pantai, Transplantasi terumbu karang, sosialisasi mitigasi bencana, dan identifikasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Perlunya rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berbasis kelompok Masyarakat dengan pemanfaatan CSR/NON APBD di sekitar lingkungan pesisir setempat serta pemantauan dan pelaporan berbasis data spasial sehingga realtime kondisi ekosistem pesisir terpantau.	
	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			TANGKAP								
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	125.00	125.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada TW 3 dengan indikator produksi perikanan tangkap adalah 25.228,10 ton dengan realisasi 3786.61 ton Hal ini dikarenakan Rendahnya capaian disebabkan (angin kencang dan gelombang tinggi di bulan 10 s.d 12) yang membatasi aktivitas melaut. Adapun target kinerja fisik pada Tw 4 adalah 95,34% dengan capaian sebesar 95,34% Hal ini disebabkan, subkeg Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan sudah dilaksanakan	Sebagai tindak lanjut dari capaian produksi perikanan tangkap di wilayah selatan pada Triwulan IV diperlukan langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja positif ini pada periode selanjutnya	
		UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan									
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	76.10	76.10	TINGGI	Target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada TW IV adalah 12,14% dengan realisasi sebesar 12,14%. Hasil pencapaian kegiatan: 1. Administrasi umum perangkat daerah 100% (2 paket, 1 laporan) 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% (3 laporan) 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% (6 unit AC Split dan 1 Unit Lift)	Tidak ada karena semua kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sudah selesai dilaksanakan	
	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
				Jumlah hasil uji mutu perikanan (Sampel)	300.00	300.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target program Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan pada TW IV dengan Indikator Kinerja Program Jumlah hasil uji mutu perikanan adalah target 75 sampel dengan realisasi 102 sampel. Adapun target kinerja fisik TW IV adalah 69,23 % dengan capaian sebesar 68,23% , disebabkan adanya sisa transport perjalanan dinas dan sisa kontrak.	Tidak ada karena semua kegiatan pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sudah selesai dilaksanakan	
		UPTD Produksi dan Pengembangan									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Perikanan Budidaya									
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	77.22	77.22	TINGGI	Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada TW IV adalah 14,75% dengan realisasi sebesar 14,75%. Hasil pencapaian kegiatan: 1. Administrasi umum perangkat daerah 100% (1 laporan) 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% (2 paket) 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% (3 laporan) 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% (8 unit)	TIDAK ADA KARENA SEMUA KEGIATAN PADA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUDAH SELESAI DILAKSANAKAN	
	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	124,044.00	122,457.19	98.72	SANGAT TINGGI	Target Program pengelolaan perikanan budidaya pada TW 4 dengan target satuan adalah 37.213.20 Ton namun realisasi 34.559.36 Ton. Dari realisasi satuan terlihat belum memenuhi target, status data merupakan angka sementara dikarenakan data yang masuk belum lengkap dari kab/kota. Adapun target kinerja fisik pada Tw 4 adalah 49,95% dengan capaian sebesar 41,89% Hal ini disebabkan, subkeg penjaminan laut dan subkeg penyediaan sarana darat belum optimal dalam melaksanakan kegiatan	Melakukan koordinasi dengan validator satu data kabupaten dan kota. Akan dilakukan pembaharuan instrumen pengendalian administrasi kegiatan dengan sub bagian keuangan OPD	
		UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan									
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	84.16	84.16	TINGGI	Target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada TW IV adalah 18,81% dengan realisasi sebesar 18,81%. Hasil pencapaian kegiatan: 1. Administrasi umum perangkat daerah 100% (2 paket, 1 laporan) 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% (2 laporan) 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% (2 unit Roda Empat dan 3 Unit Roda Dua)	Tidak ada, karena semua kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sudah selesai dilaksanakan	
	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	125.00	125.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada TW 3 dengan indikator produksi perikanan tangkap adalah 25.228,10 ton dengan realisasi 3786.61 ton Hal ini dikarenakan Rendahnya capaian disebabkan (angin kencang dan gelombang tinggi di bulan 10 s.d 12) yang membatasi aktivitas melaut. Adapun target kinerja fisik pada Tw 4 adalah 30,24Sudah melaksanakan Kegiatan fasilitasi	Berkaitan dengan capaian program produksi perikanan tangkap maka diperlukan dukungan pendataan produksi perikanan tangkap Pelabuhan perikanan yang efektif. Oleh karena itu maka akan dilakukan pada triwulan 4 untuk validasi dan rekon data pusat informasi Pelabuhan perikanan di PPP Labuan serta integrasi dengan system informasi data kelautan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									pengolahan data	dan perikanan provinsi Banten (SISIK IKAN)	
3.2	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
		DINAS PARIWISATA									
	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.82	99.82	SANGAT TINGGI		Target 14 Laporan/Dokumen yang ditetapkan dalam Triwulan IV seluruhnya telah dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik sebagai data penunjang urusan pelaksanaan kegiatan pada pemerintahan daerah	
	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata (persen)	100.00	82.27	82.27	TINGGI	Terdapat target dalam triwulan IV sebanyak 19 lokasi penataan dan pengembangan yang dikerjakan namun karena ada permasalahan terkait legalitas lahan (sertifikat) yang bermasalah serta adanya Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dari penyedia pekerjaan yang sudah expired sehingga hanya 13 lokasi saja yang dapat dilaksanakan sehingga perhitungan bobotnya 23,94 dan capaian kinerjanya mencapai 68,40 %	Menyesuaikan berdasarkan rencana dan realisasi yang terukur	
				Rata-Rata Lama inap (hari)	1.78	1.32	74.16	SEDANG		Pada bulan Oktober 2025, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) gabungan (Asing dan Indonesia) pada hotel bintang di Banten mencapai 1,32 malam, atau naik 0,03 malam dibandingkan bulan September 2025. Peningkatan RLMT gabungan bulanan ini disebabkan oleh naiknya RLMT Asing selama 0,15 malam dan RLMT Indonesia selama 0,02 malam. Data baru s.d bulan Oktober 2025 (sumber data diperoleh dari BPS Perwakilan Banten laporan Triwulan III)	
	3.26.03		PROGRAM								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PEMASARAN PARIWISATA								
				Persentase Jumlah Promosi Wisata (persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI		Target jumlah promosi wisata 2025 adalah sebanyak 3 kegiatan dan seluruh kegiatan terlaksana	
				Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan (persen)	5.00	33.06	661.20	SANGAT TINGGI		Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2025 adalah sebanyak 29.402.528 sementara jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 adalah sebanyak 22.097.351 orang sehingga selisihnya adalah 7.305.177 orang sehingga tingkat pertumbuhan dari 2024 ke 2025 adalah sekitar 33,06%.	
	3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
				Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi (persen)	25.00	25.00	100.00	SANGAT TINGGI		Target telah dipenuhi pada triwulan sebelumnya	
				Rata-Rata Pengeluaran	5.511.176.	5.866.042.	106.44	SANGAT		Perhitungan Rata-Rata	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Wisatawan (Rupiah)	00	00		TINGGI		Pengeluaran Wisatawan sumber informasi diperoleh dari Laporan Akhir Sumber Daya Manusia dan Konsumsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2025 yang mengabil data perhitungan rata - rata pengeluaran di tahun 2024. Perhitungan dokumen ini merupakan konsep penyusunan pengganti Dokumen NESPADA dimana di dalamnya telah memuat perhitungan rata - rata pengeluaran wisatawan	
	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
				Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Persen)	100.00	77.51	77.51	TINGGI	Target Bidang Pengembangan SDM Parekraf pada tahun 2025 adalah sebanyak 365 orang sementara yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 315 orang hal ini disebabkan kegiatan sertifikasi pelaku Multimedia dengan jumlah peserta 50 orang terkena kebijakan efisiensi /	mengukur dan menghitung target capaian yang telah dilaksanakan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									prognosis dari BPKAD		
3.3	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
		DINAS PERTANIAN									
		DINAS PERTANIAN (UNIT INDUK)									
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak ada	Tidak ada	
	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Produktivitas Pertanian (kw/Ha)	5.00	5.18	103.60	SANGAT TINGGI	Pada Tahun 2025, produksi padi Provinsi Banten mencapai 1.804.002 ton Gabah Kering Giling (GKG) (Angka Sementara BPS 2025) dengan luas panen 347.700 Ha, sehingga Produktivitas padi = $1.804.002 \text{ ton} / 347.700 = 5,188 \text{ Ton} = 51,88 \text{ kuintal/ha}$ permasalahan terdapat kekeliruan dalam menentukan target awal yang seharusnya 5,00 dengan satuan ton, kakan tetapi terinput 5,00 dengan satuan Kuintal/hektar	target yang seharusnya adalah 5,00 Ton per hektar dan realiasi produktivitas adalah 5,118 ton per hektar, catatan : untuk pelaksanaan program tahun 2026 disesuaikan untuk penentuan Target Peningkatan Produktivitas Pertanian di tentukan dengan satuan kuintal per hektar	
	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
				Peningkatan Infrastruktur Pertanian (Km)	36.00	36.00	100.00	SANGAT TINGGI	Biaya yang bersumber dari APBD terbatas biayanya sehingga bantuan pada Bantuan Sumur Bor dari 26 Kelompok Tani dan Sprinkler 4 Kelompok Tani dengan panjang pipanisasi dan selang dengan jumlah panjang 5.92 Meter	Dengan Tugas Pembantuan (TP) yang Sumber Anggaran APBN mengenai Program Optimasi Lahan (OPLAH) Non Rawa terdiri dari Kabupaten Pandeglang 192 Kelompok Tani dengan panjang 28800 meter dan Kabupaten Lebak 230 kelompok tani dengan panjang 50850 meter Jumlah total 79650 Meter	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
				Jumlah kasus Penurunan penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Jumlah)	18.00	18.00	100.00	SANGAT TINGGI	Berdasarkan data iSIKHNAS di Provinsi Banten pada Triwulan IV tahun 2025 ada 3 laporan kasus penyakit mulut dan kuku dan 1 laporan kasus HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) (Laporan terlampir). Target Program Triwulan IV sebesar 33,76% tercapai realisasi 33,44%	Realisasi pengendalian penyakit hewan menular strategis telah dilaksanakan sesuai target	
	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
				Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (%)	95.00	95.00	100.00	SANGAT TINGGI	Pengadaan Pestisida jenis Topdor untuk Pengendalian Insektisida dan Sidarat untuk Racun Tikus dilaksanakan pada bulan september yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober karena kebutuhan Insidentil untuk penanganan OPT	Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan di triwulan IV yaitu 1). Untuk Kegiatan OPT Meaksanakan Pengadaan Pestisida untuk Pengendalian OPT Jenis Wereng Batang Cokelat (WBC) padi, Penggerek Batang, Racun Tikus dan Insektisida lainnya 2). Untuk Kegiatan DPI Meaksanakan pembuatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										Sumur Bor sebanyak 6 Unit 3). Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	
	3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								
				Rekomendasi izin usaha pertanian (Rekomendasi)	271.00	271.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak ada Permasalahan	Tidak Ada Tindak Lanjut	
	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani dari madya ke utama (Kelompok)	286.00	286.00	100.00	SANGAT TINGGI	Peningkatan status Kelembagaan Petani (Kelompok Tani atau Gapoktan) dari kelas Madya ke kelas Utama merupakan tantangan besar karena melibatkan transisi dari sekadar kelompok sosial menjadi entitas ekonomi yang profesional. Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan status diantaranya adalah lambatnya regenerasi pengurus (pengurus didominasi oleh petani usia lanjut), hal tersebut memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan status dari	Berdasarkan kendala tersebut, maka pada tahun anggaran 2026 akan dilaksanakan kegiatan yang mendukung regenerasi pengurus melalui kegiatan Petani Milenial	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									madya ke utama		
		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target program pada triwulan 4 dgn indikator penunjang urusan pemerintahan adalah 67,70% dengan realisasi adalah 53,37%. Hal Ini disebabkan pada kegiatan adum, Penyediaan jasa, pengadaan dan pemeliharaan belum optimal melaksanakan kegiatan karena adanya kendala teknis.	Menyesuaikan dengan perubahan rencana anggaran kas target kinerja	
	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			AN SARANA PERTANIAN								
				Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih (Sertifikat)	478.00	484.00	101.26	SANGAT TINGGI	Tidak ada masalah	-	
		UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target program pada triwulan 4 dgn indikator penunjang urusan pemerintahan adalah 31,50% dengan realisasi adalah 30,81%. Hal Ini disebabkan subkeg penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan subkeg penyediaan pelayanan umum kantor belum optimal melaksanakan kegiatan karena adanya kendala teknis.	1. Pada TW 4 telah dilaksanakan hutang kinerja triwulan 3 sehingga capaian fisik dan kinerja telah tercapai. 2. Menyesuaikan dengan perubahan rencana anggaran kas target kinerja	
	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Produktivitas Padi (kw/Ha)	5.00	5.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN pada TW 4 dengan indikator Peningkatan Produktivitas Padi adalah 5 kw/ Ha, dengan realisasi 5 kw/Ha. Kegiatan penanaman padi telah dilaksanakan dan sudah panen, Adapun target kinerja fisik pd TW4 adalah 32,79% dgn capaian sebesar 32,79%. dan pada Sub keg. Perbanyak Benih Bersertifikat Tan. Pangan Berbentuk Biji/Benih terdapat kegiatan yg blm dilaksanakan pada TW 3 dan menjadi hutang kinerja pada TW 4 telah dilaksanakan pada TW 4.	1. pada TW 4 telah dilaksanakan hutang kinerja TW 3 sehingga capaian Fisik dan Kinerja telah tercapai. 2. Telah menyesuaikan dengan perubahan rencana anggaran kas target kinerja	
	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
				Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (%)	95.00	95.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Banten di UPTD BPTPHP pada TW IV Ta. 2025 adalah 95% Hal ini dikarenakan pada Ke 2 Sub tsb ada Pengurangan Volume Pada Keg Tsb dan Terjadi Pembatal	Agar Fasilitas Keg. Berbasis Fasilitas Berbiaya Lebih di Prioritaskan kepada Lokasi Kelompok Tani/ Petani yang mendukung Program/ Kegiatan Bidang Saran Dinas Pertanian Provinsi Banten Program/	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									Pelaksanaan	Kegiatan Luas Tambah Tanaman (LTT) di Kab/ Kota Percepatan Tanam dan Peningkatan Produksi Padi Lokasi Optimalisasi lahan Pertanaman Peningkatan Produksi Padi	
		UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak									
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	arget capaian kinerja fisik tw IV adalah 51.16 % & realisasinya tercapai 41.11%. Capaian kinerja tw IV: Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Terbayarnya Jasa surat menyurat, terbayarnya Listrik dan Telepon/Internet, terbayarnya Honor Non ASN di Periode TW IV di Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pada kegiatan Pemeliharaan , telah dilaksanakan pemeliharaan kendaraan Operasional Dinas	kordinasi ke Aparatur terkait	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
				Tersedianya bibit ternak ruminansia bemutu (Ekor)	381.00	381.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target program pengembangan sarana pertanian t tw 4 target program 381 ekor Sudah tercapai. Capaian kinerja fisik kegiatan pengendalian dan produksi benih/ bibit ternak dan Hijauan pakan ternak serta pakan ternak kewenangan Provinsi pada tw IV 55.59 % tercapai 46.71%. Hal ini dikarenakan ada efisiensi.	Koordinasi Ke Aparatur Terkait	
		UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner									
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target program TW IV dengan Indikator Penunjang Urusan Pemerintahan adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% capaiannya 100%. Namun terdapat efisiensi nilai kontrak serta sisa pembayaran listrik dan telepon	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan target 2025	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
				Peningkatan Infrastruktur Pertanian (Km)	36.00	36.00	100.00	SANGAT TINGGI	Pada triwulan 4 telah direalisasikan seluruh pengadaan peralatan RSH . Realisasi hingga anggaran TW 4 sebesar : Rp. 820.577.800,- (96,20%). Sisa anggaran merupakan sisa penawaran kontrak.	Sisa anggaran menjadi silpa.	
	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
				Jumlah kasus Penurunan penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Jumlah)	18.00	18.00	100.00	SANGAT TINGGI	Berdasarkan data iSIKHNAS di Provinsi Banten pada Triwulan IV tahun 2025 ada 3 laporan kasus penyakit mulut dan kuku dan 1 laporan kasus HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) (Laporan terlampir). Target Program Triwulan IV sebesar 33,76% tercapai realisasi 33,44%	Target program triwulan 4 dan tahunan tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.	
3.4	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		DAN KEHUTANAN									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)									
	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
				Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (Persen)	25.00	25.00	100.00	SANGAT TINGGI	Realisasi kegiatan tidak mengalami kendala. Pelaksanaan program Pengelolaan Hutan dengan indikator Persentase Pencapaian Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada pada TW IV memenuhi target dengan indikator tersebut sebesar 25% .	Capaian realisasi ini diperoleh dengan terlaksananya Kegiatan Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hutan serta Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan HHBK.	
	3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
				Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun (Persen)	28.00	28.00	100.00	SANGAT TINGGI	Pelaksanaan program Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan indikator Meningkatnya Fungsi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting pada pada TW IV memenuhi target dengan indikator tersebut sebesar 28% . Capaian realisasi ini diperoleh karena terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kawasan	terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dengan capaian jumlah lokasi melebihi target yaitu sebanyak 15 lokasi		
	3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
				Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok)	52.00	52.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak ada kendala, semua kegiatan sudah terlaksana sesuai angkas. Untuk Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial terkait pemberian bantuan dlm pembuatan demplot menjadi 2, yaitu bibit tanaman & pupuk organik & alat pendukung kegiatan pertanian. Pada triwulan IV sudah terlaksana pemberian bantuan untuk masyarakat di 4 lokasi kegiatan dengan 7 kelompok berada di Kec.Cirinten, Kec.Gunung	Pelaksanaan monitoring penanaman bibit di lokasi demplot dan koordinasi dengan pendamping perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Lebak.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									Kencana,Kec.Cijaku,Kec.Wanasalam di Kab.Lebak.Untuk pelaksanaan monev KTH telah dilaksanakan di 12 lokasi yg berbeda		
	3.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
				Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun (Persen)	20.00	60.00	300.00	SANGAT TINGGI	Secara keseluruhan, target program sebesar 20% dapat tercapai pada Triwulan IV. Adapun pada Triwulan IV telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan DAS di kab Lebak, Kab Pandeglang dan Kota Serang, serta Rapat Forum Komunikasi DAS Cidanau.	Pelaksanaan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menunjukkan realisasi diatas target yang telah ditetapkan. Target capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 20%, hingga triwulan IV realisasi yang berhasil dicapai mencapai 60%,	
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang									
	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
				Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan	2.500.00	4.906.00	196.24	SANGAT TINGGI	Tidak ada permasalahan	1. Koordinasi dengan BAPPEDA dan DLHK Provinsi Banten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				tangerang (Ha)							
	3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
				Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Kelompok)	12.00	12.00	100.00	SANGAT TINGGI	Secara keseluruhan target tahun 2025 sebanyak 12 kelompok dapat tercapai di triwulan IV, dengan pengendalian dan pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar serta penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan teknis dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 120 orang	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting di wilayah Lebak dan Tangerang	
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon									
	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
				Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi seluas 2.500 Hektar pertahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Ha)	2.500.00	1.442.71	57.71	RENDAH	1. Masih Rendahnya koordinasi/pelaporan antar stakeholder terkait dalam rangka pencapaian target program	1. Perhitungan capaian realisasi program baru dapat dilihat setelah triwulan IV berdasarkan monitoring pencapaian penanaman dan perhitungan prosentase tumbuh tanaman yang ditanam. 2. melakukan koordinasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										dan sinkronisasi yang optimal dengan stakeholder terkait (UPT Kementerian, swasta dan masyarakat) dalam rangka pencapaian target program yang telah ditetapkan (2500 Ha)	
	3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
				Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon (Kelompok)	12.00	12.00	100.00	SANGAT TINGGI	belum semua kelompok terlibat dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	akan dilakukan inventarisasi jumlah kelompok yang ada di wilayah CDK PSC supaya dapat terlibat dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	
		UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan									
	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
				Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat (Persen)	90.00	83.40	92.67	SANGAT TINGGI	Banyaknya permintaan dari masyarakat hanya untuk tanaman buah sementara produksi lebih banyak tanaman hutan dikarenakan tujuan utama dari penanaman adalah rehabilitasi lahan,	Kegiatan pelayanan masih dilaksanakan hingga akhir Desember 2025 sehingga masih memungkinkan adanya penambahan jumlah bibit yang akan didistribusikan dikarenakan masih ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									masyarakat umum menginginkan variasi yang banyak untuk jenis tanaman yang di produksi.	permintaan dari kelompok tani utk penanaman.	
		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten									
	3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY A								
				Persentase Pengelolaan TAHURA Banten (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target program Pengelolaan Tahura Banten dgn Indikator Persentase Pengelolaan Tahura Banten pd TW IV adlh 48,43 dan target sebesar 100% telah tercapai. Hal ini disebabkan karena seluruh target capaian kinerja pad TW ini telah terealisasi secara fisik, realisasi anggaran masih terus berjalan hingga penutupan buku pada akhir tahun	Capaian kinerja yang telah tercapai hingga 100% Tahun Anggaran 2025 perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengelolaan Tahura Banten di T.A. 2026	
3.5	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	3.29.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	102.34	102.34	SANGAT TINGGI	Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Triwulan 4 tidak tercapai karena pada pembentuk capaian target Program terdapat beberapa kegiatan (PEP dan Keuangan) yang tidak tercapai targetnya dikarenakan sampai dengan Input Realisasi Program untuk kegiatan PEP output DPA 2026 masih pada tahap RKA Finalisasi dan masih menunggu hasil revidi Kemendagri, untuk Kegiatan Keuangan output Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Bulan Desember belum dapat dilaksanakan.	Untuk penyusunan DPA 2026 dan Realisasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN masih menunggu arahan selanjutnya.	
	3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (Persen)	83.20	83.20	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak terdapat permasalahan karena capaian Program Pengelolaan Aspek Kegeologian sesuai dengan Definisi Operasionalnya dengan output pembentuk pada level Kegiatan berupa Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah seluruhnya tercapai pada Triwulan IV.	Untuk realisasi Keuangan yang tidak mencapai 100%, menjadi bahan evaluasi pada Tahun Anggaran berikutnya (Tahun n+1), agar potensi Silpa bisa dikeluarkan pada saat penyusunan Anggaran Perubahan (Tahun n+1).	
	3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								
				Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (Persen)	80.98	192.02	237.12	SANGAT TINGGI	Capaian Program Pengelolaan Mineral dan Batubara sesuai dengan Definisi Operasionalnya ada pada Triwulan Akhir (TW IV) belum tercapai 100% karena output pembentuk pada level salah satu Kegiatan terjadi penambahan 2 target output terkait penambahan anggaran setelah perubahan untuk Tim SATGAS pengendalian/pengawasan aktifitas pertambangan yang sampai dengan Input Realisasi Program masih dalam pelaksanaan.	Output penambahan 2 Target pada level Kegiatan akan diupload evidencinya setelah kegiatan selesai dilaksanakan.	
	3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			TERBARUKAN								
				Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (Persen)	75.00	75.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak terdapat permasalahan karena capaian Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan sesuai dengan Definisi Operasionalnya dengan output pembentuk pada level Kegiatan berupa Informasi dan pelayanan pemanfaatan langsung EBT seluruhnya tercapai pada Triwulan IV.	Untuk realisasi Keuangan yang tidak mencapai 100%, menjadi bahan evaluasi pada Tahun Anggaran berikutnya (Tahun n+1), agar potensi Silpa bisa dikeluarkan pada saat penyusunan Anggaran Perubahan (Tahun n+1).	
	3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								
				Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (Persen)	90.08	90.08	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak terdapat permasalahan karena capaian Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Indikator Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar sesuai dengan Definisi Operasionalnya terealisasi seluruhnya Triwulan IV.	Untuk realisasi Keuangan yang tidak mencapai 100%, menjadi bahan evaluasi pada Tahun Anggaran berikutnya (Tahun n+1), agar potensi Silpa bisa dikeluarkan pada saat penyusunan Anggaran Perubahan (Tahun n+1).	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS) (RTS)	17,000.00	14,626.00	86.04	SANGAT TINGGI	Capaian Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Indikator Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS) dengan target Resntra sebanyak 17.000 RTS tidak tercapai karena pada saat penyusunan Renja Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2025 kemampuan Anggaran Daerah tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada Renstra, Kemampuan Anggaran pada Tahun 2025 yang dapat dipenuhi sebanyak 7.000 RTS dan seluruhnya telah terealisasi pada Triwulan IV.	Untuk realisasi Keuangan yang tidak mencapai 100%, menjadi bahan evaluasi pada Tahun Anggaran berikutnya (Tahun n+1), agar potensi Silpa bisa dikeluarkan pada saat penyusunan Anggaran Perubahan (Tahun n+1).	
3.6	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT INDUK)									
	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan (Persen)	80.00	93.18	116.48	SANGAT TINGGI	Penerbitan rekomendasi teknis telah menggunakan sistem berbasis online sehingga mempermudah dan mempersingkat waktu proses pelayanan dan penerbitan rekomendasi teknis.	Proses survey ke lapangan yang diwajibkan sebagai syarat sebelum penerbitan rekomtek terkadang berbenturan dengan aktivitas pekerjaan lain.	
	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
				Laju Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	7.39	16.28	220.30	SANGAT TINGGI	Faktor Pendorong: Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan di Provinsi Banten dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain infrastruktur logistik, jaringan distribusi, teknologi informasi dalam distribusi dan kondisi ekonomi regional. Pada tahun 2025, jumlah sarana distribusi perdagangan adalah 3435 unit sedangkan pada tahun 2024 berjumlah 2954 unit. Sehingga, laju pertumbuhan sarana distribusi perdagangan adalah 16,28%.	Disperindag Provinsi Banten telah menyusun rencana kerja untuk mengoptimalkan distribusi barang kebutuhan pokok melalui penguatan sistem informasi logistik, peningkatan efisiensi dan efektivitas jaringan distribusi, implementasi pasar lelang komoditas dan sistem resi gudang.	
	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PENTING								
				Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok (Persen)	5.00	7.74	154.80	SANGAT TINGGI	Beberapa barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga seperti Bawang Merah Konde Askip, Bawang Merah Rogol Askip, Cabe Merah Biasa, Cabe Merah Kriting, Cabe Rawit Hijau dan Cabe Rawit Merah. Fluktuasi harga dipengaruhi oleh cuaca tidak menentu yang mempengaruhi musim tanam dan musim panen sehingga pasokan berkurang serta inkonsistensi kebijakan impor	dalam waktu triwulan IV ini Disperindag melaksanakan program stabilisasi harga melalui pemantauan harga dan pemantauan stok barang kebutuhan pokok di 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	
				Persentase kinerja realisasi pupuk (Persen)	79.49	75.29	94.72	SANGAT TINGGI	- Dimana Alokasi yang telah ditetapkan pada Awal Tahun 2025 berjumlah 170,502 Ton yang terdiri dari 82,904 Ton Pupuk Urea, 72,129 Ton Pupuk NPK dan 15,469 Ton Pupuk Organik. - Untuk Alokasi pada Bulan November 2025 ada ReAlokasi pupuk sebanyak 147.590 Ton yang terdiri dari 82.604 Ton Pupuk Urea, 58.129 Ton Pupuk NPK dan 6.857 Ton Pupuk Organik.	Realisasi sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 (tertanggal 14 Desember 2025) berjumlah 111.116,60 Ton (75,29%) yang terdiri dari : - 57.802,50 Ton Pupuk Urea atau sekitar (69,98%) - 52.594,90 Ton Pupuk NPK atau sekitar (90,48%) Catatan Verifikatur sudah diklarifikasi bahwa Indikator Kinerja Pupuk sudah tidak ada di tahun 2026	
	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pertumbuhan nilai ekspor non migas (Persen)	27.33	25.13	91.96	SANGAT TINGGI	Secara umum, di Banten Ekspor Non Migas Oktober 2025 mencapai US\$ 1,175,94 juta, naik 3,33 persen dibanding Oktober 2024. Dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor non migas terbesar Januari â€œ Oktober 2025, komoditas yang mengalami peningkatan terbesar adalah kakao/coklat (HS 18) sebesar US\$475,63 juta (131,51 persen), sementara yang mengalami penurunan terbesar adalah alas kaki (HS 64) sebesar US\$ 508,86 juta (37,05 persen)	Pada Triwulan IV, Program Pengembangan Ekspor yang dilaksanakan Disperindag meliputi Pendataan Pelaku Usaha Ekspor ke Kabupaten dan Kota, Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025. Kemudahan penerbitan Hak Akses dan Surat Keterangan Asal bagi eksportir juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan nilai ekspor non migas di Provinsi Banten.	
	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
				Persentase penyelesaian aduan konsumen yang dilayani dan ditangani (Persen)	60.00	98.96	164.93	SANGAT TINGGI	Pada penyelesaian sengketa konsumen masih ditemukan pelaku usaha sebagai termohon yang tidak kooperatif dalam proses mediasi ataupun persidangan.	Hingga saat ini, pengaduan konsumen yang diterima oleh BPSK WKP I berjumlah 63 Pengaduan, yang sudah dinyatakan selesai 62 pengaduan, selebihnya masih dalam proses kajian, mediasi dan/atau persidangan dan WKP II berjumlah 23 pengaduan dan sudah selesai semuanya. LPKSM berjumlah 10 Pengaduan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Persen)	40.04	82.52	206.09	SANGAT TINGGI	- Pengawasan Barang Beredar pada TW. IV (Bulan Okt dan Nov) dilaksanakan sebanyak 16 lokus fokus pada Pengawasan Depot Air Minum (DAM). - Pengawasan Perbatasan sudah dilaksanakan pada Bulan Nov 2025, pada 3 Pelaku usaha diwilayah Perbatasan Banten Jabar (Sukabumi), yaitu 1 (satu) Pelaku Usaha Bahan Berbahaya yaitu Distrubutor (DT2) yang berdomisili di Sukabumi Jawa Barat akan tetapi memiliki wilayah pemasaran ke Prov Banten serta Pengawasan ke Pelaku Retail di Wilayah Sukabumi sebanyak 2 Lokus.	akumulasi barang beredar yang diawasi dari TW I sampai dengan TW IV adalah sebanyak 143 barang dan yang sesuai ketentuan sebanyak 118 barang.	
	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri (Persen)	30.00	41.67	138.90	SANGAT TINGGI	Faktor Penghambat : Ketersediaan lokasi Pameran, terutama untuk kegiatan Mall to Mall dimana spot lokasi utama memiliki area dan kapasitas terbatas serta dan saat peak season banyak digunakan untuk kegiatan atau event yang lainnya. Faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi, palagi ditambah adanya bencana seperti banjir di sekitar lokasi Pameran yang menyebabkan frekuensi pengunjung rendah. Mobilisasi produk milik pelaku usaha terbatas pada volume angkut kendaraan yang digunakan.	Mall to Mall (sudah dilaksanakan pada tanggal 23-29 Juni), Partisipasi Pameran Tingkat Nasional (semula, 2x pameran, 1x pameran dalam Forum MPU (batal dilaksanakan karena Disperindag Jabar efisiensi anggaran) 1x pameran, Indonesia Tourism dan Trade Investmenst Expo 2025 pada Bulan 24-27 Juli 2025 di Cihampelas Mall, Bandung, Jawa Barat, Partisipasi Pameran Pangan Nusa (sudah dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan TEI pada bulan Oktober).	
		UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang									
	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
				Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (Persen)	14.00	100.00	714.29	SANGAT TINGGI	Sudah dilakukan pengujian terhadap dua sampel yaitu kopi dan gula aren.	Alat yang belum ada akan dilengkapi di tahun 2026, oleh karena itu untuk saat ini parameter yang diuji dari komoditi gula aren dan kopi adalah BDKT (berat dalam keadaan terbungkus)	
3.7	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG										

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	PERINDUSTRIAN										
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT INDUK)									
	3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	97.70	97.70	SANGAT TINGGI	Sub Kegiatan dilaksanakan sesuai ROK dan Kebijakan mengenai Efisiensi Anggaran. Namun untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yaitu mesin fotokopi tidak direalisasikan karena biaya sparepart suku cadang utama dan biaya jasa teknisi lebih memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan awal pada saat penyusunan anggaran	sehingga realisasi s.d hanya 74 Unit dari target 75 Unit	
	3.31.02		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
				Persentase Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi (Persen)	0.24	11.71	4.879.17	SANGAT TINGGI	Masih terdapat perusahaan yang tidak patuh melaporkan perusahaannya dalam SHINAS. Jumlah industri besar yang tercatat pada SHINAS 2024 (Des): 1811 perusahaan	- Kemudahan pengajuan perizinan usaha industri - Penguatan jaringan pemerintah dengan perusahaan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									Jumlah industri besar yang tercatat pada SIINAS (Des 2025): 2023 perusahaan		
	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								
				Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar,izin perluasan industri (IPUI) Bagi Industri Besar, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan in (Persen)	100.00	105.71	105.71	SANGAT TINGGI	Pada Triwulan 4, jumlah perusahaan yang diterbitkan rekomtek IUI sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan. Secara kumulatif (Jan-Des) 2024, jumlah perusahaan yang diterbitkan rekomtek IUI 35 perusahaan dan telah dipantau adalah 37 perusahaan. Ketidaklengkapan berkas pengajuan perizinan berdampak pada lambatnya penerbitan rekomtek izin usaha industri dan ketidakpahaman para pelaku industri selain di OSS harus mengupload permohonan di SIINas juga.	- Kemudahan proses penerbitan rekomtek izin usaha industri - Penyesuaian indikator kinerja pada Renstra periode berikutnya sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.	
	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan indus (Persen)	65.00	79.98	123.05	SANGAT TINGGI	Masih terdapat perusahaan yang tidak patuh untuk melaporkan informasi produksi dan operasi secara berkala. Rasio data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri adalah 100%, dengan rincian data sbb: - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/energi - Informasi tenaga kerja - Informasi investasi	Optimalisasi pengawasan perusahaan industri secara berkala dan menyampaikan kepada para pelaku usaha jika belum terdaftar di siinas untuk segera membuat akun SIINas dan mengingatkan untuk menyampaikan laporan produksi per Triwulan pada SIINas.	
		UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang									
	3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	98.22	98.22	SANGAT TINGGI	Tidak ada	Ketercapaian seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Periode Januari-desember pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Tahun Anggaran 2025	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri									
	3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	89.30	89.30	TINGGI	Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sesuai ROK	Ketercapaian Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Periode Januari-Desember 2025 pada UPTD PTSI	
	3.31.02		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI								
				Cakupan Pelayanan Pengembangan teknologi dan Standarisi Industri (Persen)	65.00	153.85	236.69	SANGAT TINGGI	UPTD PTSI belum memiliki Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang, dan hanya memiliki satu ruang lingkup yang sudah terakreditasi (kuat tekan paving block)	1. Proporsi anggaran mensupport Disperindag untuk melakukan pelayanan fasilitasi bagi pelaku usaha/IKM; 2. Disperindag Kab/Kota membantu pendataan IKM potensial	

Tabel.3.7
Pelaksanaan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
4	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.1	4.01 SEKRETARIAT DAERAH										
		SEKRETARIAT DAERAH									
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah									
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	90.88	90.88	SANGAT TINGGI	adanya perubahan status dari Non ASN ke PPPK yang mempengaruhi capaian target pelayanan umum kantor	Anggaran dialihkan ke Biro Umum	
	4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								
				Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	- Dukungan terkait GWPP masih belum optimal karena adanya efisinsi anggaran dari pemerintah pusat	- Koordinasi dengan kemendagri terkait GWPP - Pembentukan sekretariat GWPP di tahun 2026	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	- OPD kesulitan memperoleh data eviden IKK LPPD yang bersumber dari urusan lain atau data dari instansi yang lain - Penyerahan aset kab Serang ke kota Serang masih terkendala karena belum selesanya pembangunan Pusat Pemerintahan Kab Serang	- Koordinasi dan pembinaan terkait IKK LPPD tahun 2026 agar lebih baik - Akan dilaksanakan rapat antar pimpinan (stake holder) di tahun 2026	
				Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	- Masih banyak kerjasama yang baru mencapai tahap MoU	- Akan dilaksanakan fasilitasi lanjutan terkait kerjasama yang belum mencapai kesepakatan (PKS) di tahun 2026	
	4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								
				Cakupan realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	- Anggaran Petugas Haji Daerah (PHD) tidak terserap seluruhnya karena keterbatasan kuota dari KEMENAG - Hibah terhadap lembaga masih diprioritaskan untuk lembaga keagamaan yang besar	- Akan dikoordinasikan untuk Kuota PHD Tahun 2026 - akan dianggarkan bantuan untuk ijin bangunan pesantren di tahun 2026	
				Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Kebijakan yang dihasilkan baru Surat Edaran Gubernur bagi OPD terkait	Untuk tahun 2026 akan diupayakan lebih implementatif terkait kebijakan pelayanan dasar	
				Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Rumusan kebijakan masih berupa policy brief	Untuk tahun 2026 akan diupayakan lebih implementatif terkait kebijakan Non pelayanan dasar	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelayanan Dasar (Persen)							
		Biro Hukum									
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak Ada	Tidak Ada	
	4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								
				Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Persentase Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi									
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Adanya 1 orang Pegawai Non ASN pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada bulan Oktober sudah ditetapkan menjadi PPPK Penuh waktu, sehingga adanya silpa pembayaran gaji selama 3 bulan.	Silpa	
	4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Honorarium narasumber hanya dapat di serap 50% karena sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk honorarium narasumber internal hanya dapat dibayarkan 50%.	Silpa dan Evaluasi untuk selanjutnya.	
				Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Honorarium narasumber hanya dapat di serap 50% karena sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk honorarium narasumber internal hanya dapat dibayarkan 50%.	Silpa dan evaluasi untuk kedepannya	
				Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	pada Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik pada perubahan anggaran Tahun 2025 mendapat tambahan anggaran sebesar 200.000.000 diperuntukan bagi kegiatan Survey Provinsi Banten Face to Face Interview tidak dapat direalisasi dikarenakan waktu pekerjaan tidak mencukupi.	Silpa dan menjadi evaluasi selanjutnya	
				Persentase cakupan kegiatan reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Honorarium narasumber hanya dapat di serap 50% karena sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk honorarium narasumber internal hanya dapat dibayarkan 50%.	Silpa dan Evaluasi untuk selanjutnya.	
		Biro Umum dan Perlengkapan									
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan	100.00	98.22	98.22	SANGAT TINGGI	Penyesuaian Efisiensi		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)							
				Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA (Persen)	100.00	99.95	99.95	SANGAT TINGGI	Penyesuaian Efisiensi		
				Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA (Persen)	100.00	98.77	98.77	SANGAT TINGGI	Penyesuaian Efisiensi		
				Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha (Persen)	100.00	87.44	87.44	TINGGI	Penyesuaian Efisiensi		
		Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	tidak ada	tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								
				B. Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	35.56	40.00	112.49	SANGAT TINGGI	Tidak Ada	Tidak Ada	
				C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Nilai)	27.39	26.09	95.25	SANGAT TINGGI	tidak ada	tidak ada	
				A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	30.00	27.54	91.80	SANGAT TINGGI	Tidak ada	Tidak ada	
		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan									
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	70.00	100.72	143.89	SANGAT TINGGI		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat daerah 4. Jasa Penunjang	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	4.01.06		PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNA N								
				Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian (Dokumen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI		1. SK GUB Penerapan LABKESDA Provinsi Banten 2. SK GUB Penerapan BLUD SMK 3 Tangerang 3. SK Penerapan BLUD RS CILONGRANG DAN RS LABUAN 4. SK TIM Pembentuk Nilai RS CILOGRAN dan RS LABUAN	
				Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Industrsi Jasa dan Ketenagakerjaan (Dokumen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI		1. SK TIM MBG 2. SK TIM TPKAD 2025	
				Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah (Dokumen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI		Tersedianya Perumusan Kebijakan : 1. Policy Brief Rakoor Pertanian 2. Policy Brief Rakoor Pertambangan 3. Policy Brief Rakoor Perikanan 4. Policy Brief	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										Rakoor Kelautan	
	4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								
				Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI		Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Pembangunan 1. Bahan Rapat Pimpinan	
				Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Administrasi Pembaangunan (Dokumen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI		Tersedianya Perumusan Kebijakan Administrasi Pembaangunan 1. Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 2. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Dokumen Pelaksanaan Pembangunan	
		Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol									
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			AN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	98.81	98.81	SANGAT TINGGI			
				Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persen)	100.00	96.87	96.87	SANGAT TINGGI			
				Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan (Persen)	100.00	97.33	97.33	SANGAT TINGGI			
4.2	4.02 SEKRETARIAT DPRD										
		SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN AN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.48	99.48	SANGAT TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
				Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan, Kehumasan Dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD (Persen)	100.00	99.14	99.14	SANGAT TINGGI			
				Persentase capaian layanan kinerja fungsi DPRD (Persen)	100.00	99.11	99.11	SANGAT TINGGI			

Tabel.3.8
Pelaksanaan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
5	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.1	5.01 PERENCANAAN										
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	98.48	98.48	SANGAT TINGGI			
	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
				Persentase dokumen Pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai target dalam satu tahun	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				(Persen)							
				Persentase dokumen perencanaan yang disahkan (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
				Persentase Ketersedian data perencanaan pembangunan (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
				Persentase pengelolaan sistem informasi pembangunan dan pengendalian daerah (Persen)	90.00	90.00	100.00	SANGAT TINGGI			
				Presentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD (Persen)	95.00	95.00	100.00	SANGAT TINGGI			
	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
				Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)							
				Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/RPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
				Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
5.2	5.02 KEUANGAN										
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat anggaran pendidikan dan pelatihan yang tidak direalisasikan dikarenakan tidak ada usulan yang diajukan dari bidang teknis untuk Diklat/Khursus yang ditawarkan 2. Tarif diklat/khursus berbayar pada SHS tidak sesuai (Lebih Kecil) dengan tarif yang ditawarkan penyelenggara diklat/khursus external.	Agar mengusulkan penyesuaian tarif pada SHS dengan tarif yang ditawarkan di tahun berikutnya.	
	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
				Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. Perda No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA. 2025 2. Pergub No 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025 3. Perda No.6 Tahun 2025 tentang APBD TA. 2026 4. Pergub No. 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA. 2026	Penyusunan Perda dan Pergub tentang Perubahan APBD TA 2025 dan APBD TA 2026 tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten/Kota telah selesai dievaluasi sebanyak 8 Kab./Kota 2. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi APBD Tahun 2026 Kabupaten/Kota telah selesai dievaluasi sebanyak 8 Kab./Kota	Pelaksanaan telah selesai sesuai waktu yang telah di tetapkan	
				Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	Berdasarkan LHP BPK No. 10.A/LHP/XVIII. SRG/04/2025, tanggal 29 April 2025 bahwa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara Wajar	Capaian Realisasi sebesar 100% atau sesuai yang ditargetkan	
				Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien (Persen)	100.00	77.70	77.70	TINGGI	1. Target SP2D sd Triwulan IV sebanyak 20.000 Lembar, Realisasi sebanyak 17.679 lembar atau 88.40% 2. Terbitnya SE No 6/2025 tentang Pergeseran Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, terdapat Kegiatan dan Subkegiatan dilakukan efisiensi anggaran sehingga berpengaruh jumlah SPP, SPM dan SP2D yang diterbitkan	Penyesuaian anggaran Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan SE No 6/2025 tentang Pergeseran Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	
	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			BARANG MILIK DAERAH								
				Capaian Database Aset Provinsi Banten (Persen)	24.50	24.50	100.00	SANGAT TINGGI	1. Aplikasi ATISISBADA Modul Inventarisasi dan Sensus terkendala pelaporan hasil sensus dari OPD atas sensus KIB A Tanah dan KIB B Peralatan dan Mesin (Ektrakomptabel) masih terhambat dikarenakan jumlah barang yang di sensus volumenya cukup besar sehingga diperlukan waktu lebih lama 2. Kegiatan Rekonsiliasi BMD Triwulan IV Tahun 2025 terkendala realisasi anggaran belanja modal dan belanja persediaan pada OPD belum sesuai antara jumlah inputan pada aplikasi ATISISBADA dan aplikasi SIAP	1. Optimalisasi pelaksanaan inventarisasi dan sensus tahap II Tahun 2025 terhadap Aset Tanah (KIB A) Peralatan dan Mesin (KIB B) Ektrakomptabel pada OPD dilakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan secara berjenjang Progres prosentase inventarisasi dan sensus kepada Pengelola Barang 2. BPKAD melakukan kompilasi data untuk laporan BMD Triwulan IV Tahun 2025 Aset dan Persediaan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	
				Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten (Persen)	25.00	25.00	100.00	SANGAT TINGGI	Masih terdapat bidang tanah yang bermasalah untuk di SKK dengan Kejati diatarannya: 1. SMAN 1 Pandeglang 2. SMAN 8 Pandeglang 3. SMKN 2 Kota Tangerang 4. Tanah DINSOS di Kab. Lebak	Penyelesaian Permasalahan aset yang bermasalah dengan SKK dengan Kejaksanaan Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten (Persen)	17.50	17.50	100.00	SANGAT TINGGI	1. Sampai dengan triwulan IV telah tersertifikasi bidang tanah sebanyak 1.234 sertifikat dari target 1.528 atau 80,75% 2. Sisa sebanyak 294 Sertifikat dengan kondisi masih belum lengkapnya dokumen tanah yang akan di daftarkan pengukuran ke BPN	Sisa Sertifikat sebanyak 294 bidang akan di selesaikan di tahun berikutnya	
				Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten (Persen)	22.00	22.00	100.00	SANGAT TINGGI	Draft Pergub Pelaksanaan Pemanfaatan BMD masih tahap Pembahasan dengan Biro Hukum dan Inspektorat	Pembahasan akan di lanjutkan pada Tahun berikutnya	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH									
		BADAN PENDAPATAN DAERAH (UNIT INDUK)									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.51	99.51	SANGAT TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	
				Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	4.57	13.95	305.25	SANGAT TINGGI	Tidak ada permasalahan	Penguatan koordinasi antara Bapenda dengan OPD Penghasil dan para Stakeholder	
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Serang									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.95	99.95	SANGAT TINGGI			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.		
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciruas									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.79	99.79	SANGAT TINGGI			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	110.60	110.60	SANGAT TINGGI	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	-	-	SANGAT RENDAH			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.59	99.59	SANGAT TINGGI			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.		
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	94.95	94.95	SANGAT TINGGI			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program	100.00	87.94	87.94	TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)							
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program	100.00	100.04	100.04	SANGAT TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)							
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	114.60	114.60	SANGAT TINGGI			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.		
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	76.33	76.33	TINGGI			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program	100.00	97.88	97.88	SANGAT TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)							
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua									
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	95.94	95.94	SANGAT TINGGI			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5.35	(14.35)	(268.22)	SANGAT RENDAH	1. Target pada 2025 belum memperhitungkan kebijakan opsen karena diproyeksi di tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Renstra 2025-2029; 2. PKB: meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat, penurunan tarif kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum dari 1% menjadi 0,5%; 3. BBNKB: tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya	1. Akan dilakukan penagihan pada kendaraan yang tertunggak secara optimal	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.		
5.3	5.03 KEPEGAWAIAN										
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	99.55	99.55	SANGAT TINGGI			
	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
				Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	4.99	5.00	100.20	SANGAT TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				(Nilai)							
				Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja (Nilai)	7.50	28.47	379.60	SANGAT TINGGI			
				Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi (Nilai)	19.00	22.37	117.74	SANGAT TINGGI			
				Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai (Nilai)	39.50	40.00	101.27	SANGAT TINGGI			
				Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai (Nilai)	39.50	40.00	101.27	SANGAT TINGGI			
				Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi (Nilai)	23.00	22.00	95.65	SANGAT TINGGI			
				Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi (Nilai)	36.00	37.50	104.17	SANGAT TINGGI			
				Nilai Kriteria Pengembangan Karier (Nilai)	75.00	65.00	86.67	TINGGI			
				Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja (Nilai)	79.00	72.50	91.77	SANGAT TINGGI			
				Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian,	36.00	37.50	104.17	SANGAT TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penghargaan dan Disiplin (Nilai)							
				Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan (Nilai)	15.50	16.00	103.23	SANGAT TINGGI			
5.4	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
	5.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
				Persentase Capaian pemantauan dan evaluasi, sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi (Persen)	100.00	99.99	99.99	SANGAT TINGGI	-	-	
				Rasio ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikasi (Persen)	90.00	100.01	111.12	SANGAT TINGGI	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	-	-	
				Rasio peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan,serta Kompetensi Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL (Persen)	90.00	100.01	111.12	SANGAT TINGGI	-	-	
				Rasio peserta pengembangan kompetensi teknis umum, substantif, dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL. (Persen)	90.00	100.00	111.11	SANGAT TINGGI	-	-	
5.5	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
				Persentase hasil kelitbangan lingkup Sosial dan	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Kependudukan yang dihasilkan (Persen)							
				Persentase Kegiatan Fasilitas Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Hasil Kelitbangan (Persen)	100.00	95.00	95.00	SANGAT TINGGI			
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
5.6	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG										
		BADAN PENGHUBUNG									
	5.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI			
	5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								
				Cakupan Koordinasi Badan Penghubung terhadap Pemerintah	3.00	3.00	100.00	SANGAT TINGGI	Target Survei sudah sesuai target, akan tetapi Responden survei tidak mencakup	Akan memperbaiki cara melakukan survei, dengan menyampaikan survei langsung kepada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Daerah (Indeks)					semua yang sudah terlayani, hanya sebagian kecil	penerima layanan	

Tabel.3.9
Pelaksanaan Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
6	6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6.1	6.01 INSPEKTORAT DAERAH										
		INSPEKTORAT									
	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah Provinsi (Persen)	100.00	95.62	95.62	SANGAT TINGGI	ada 1 Kinerja yang belum di laksanakan yaitu DPA Murni 2026 sebanyak 1 dokumen karen karena masih menunggu hasil evaluasi kemendagri	koordinasi dengan BPKAD jadwal DPA 2020	
	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
				Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti (Persen)	100.00	97.80	97.80	SANGAT TINGGI	kinerja yang belum dilaksanakan pada TW 3 dilaksanakan pada TW 4 yaitu Pengawasan Urusan 6 laporan	segera menyelesaikan kinerja yang masih berjalan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									dan monev dana desa 4 laporan dan di TW 4 masih ada kinerja yang masih berjalan yaitu Laporan SPM sebanyak 6 Laporan		
				Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti (persen)	80.00	84.86	106.08	SANGAT TINGGI	masih ada beberapa yang masih proses penyelesaian tindak lanjut	rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut	
	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
				Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Persen)	100.00	100.00	100.00	SANGAT TINGGI	tidak ada masalah		

Tabel.3.10
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
7	8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
7.1	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100	98.11	98.11	SANGAT TINGGI			
	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								
				Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (Persen)	100	100	100	SANGAT TINGGI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
				Nilai IDI Pada poin hak-hak politik (Nilai)	68	66.77	98.19	SANGAT TINGGI	Mengalami penurunan pada indikator Kinerja Lembaga legislatif, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah dan transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar nilai pada indikator tersebut meningkat	
	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Persen)	100	100	100	SANGAT TINGGI			
	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
				Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil (Nilai)	89	81.74	91.84	SANGAT TINGGI	Penurunan pada indikator : 1. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan 2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan 3. Pemenuhan hak-hak pekerja sumber data : Hasil data IDI BPS Tahun 2024		
	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
				Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah (Persen)	100	100	100	SANGAT TINGGI			

Untuk rincian kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan diuraikan sebagaimana terlampir.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

Kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan target pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Kebijakan strategis yang ditetapkan memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Banten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten telah menetapkan kebijakan strategis dengan menetapkan peraturan daerah sebanyak 6 (enam) peraturan daerah. Selain itu, juga telah ditetapkan sebanyak 61 (enam puluh satu) kebijakan strategis melalui peraturan kepala daerah. Adapun uraian kebijakan strategis tersebut diuraikan pada tabel berikut;

Tabel 3.11
Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
Peraturan Daerah			
1.	Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah 2025-2029	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025-2029
2.	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Memberikan dasar hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menyesuaikan APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap perkembangan kebijakan fiskal, kebutuhan daerah, dan dinamika pelaksanaan program Pembangunan
4.	Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah	Memberikan dasar hukum penyertaan modal daerah guna memperkuat struktur permodalan BUMD, meningkatkan kinerja usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Banten (Perseroda) Terbuka	
5.	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Menjamin perlindungan sosial bagi tenaga kerja melalui penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman pekerja
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan pembiayaan pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan
Peraturan Gubernur			
1.	Pajak dan Retribusi Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sebagai aturan dasar pelaksanaan teknis dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Pajak Kendaraan Bermotor	Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024	Sebagai dasar acuan dalam penentuan nilai besaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat Tahun 2024
3.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4.	Kearsipan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusutan Arsip	Sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan penyusutan arsip
5.	Penataan Regulasi dan Upaya Deregulasi	Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Banten	Sebagai bentuk kepastian hukum dalam melaksanakan penataan regulasi dan deregulasi untuk

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Bidang Keuangan Daerah, Bidang Kepegawaian Daerah dan Bidang Pertanahan	mengatasi masalah obesitas regulasi
6.	Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan pemilihan anggota unsur pengarah pada badan penanggulangan bencana daerah
7.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
8.	Tunjangan Hari Raya	Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Sebagai dasar normatif dalam pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya tahun 2025 kepada Pegawai Pemerintah Provinsi Banten
9.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sebagai dasar normatif dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
10.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Sebagai uraian dan penjabaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
11.	Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur	Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur	Menjadi dasar hukum pengaturan biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur guna menjamin tertib administrasi, akuntabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
			undangan.
12.	Bantuan Keuangan Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten	Menyempurnakan pedoman pengelolaan bantuan keuangan Provinsi Banten agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Bantuan Keuangan Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten	Menyesuaikan petunjuk teknis pengelolaan bantuan keuangan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
14.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Memberikan dasar penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15.	Pendidikan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Sekolah Gratis Bagi Murid di Sekolah Tingkat Menengah Swasta dan Sederajat Serta Sekolah Khusus Swasta.	Menjamin pelaksanaan program sekolah gratis bagi murid sekolah menengah swasta dan sekolah khusus swasta guna meningkatkan akses, pemerataan, dan keberlanjutan layanan pendidikan.
16.	Kearsipan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip	Menetapkan jadwal retensi arsip sebagai instrumen pengendalian siklus hidup arsip guna mewujudkan tertib arsip dan efisiensi pengelolaan arsip daerah.
17.	Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Peningkatan Konektivitas Pembangunan di Wilayah	Mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah melalui perencanaan pembangunan terpadu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Provinsi Banten	daerah.
18.	Perkebunan Berkelanjutan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2030	Menjadi pedoman pelaksanaan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
19.	Manajemen Aparatur Sipil Negara	Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2025 tentang Syarat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Administrator Dan Pengawas	Menetapkan persyaratan jabatan secara jelas dan terukur guna menjamin profesionalisme, kompetensi, dan kinerja aparatur sipil negara.
20.	Kuangan Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Bagi hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengatur mekanisme bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin keadilan fiskal dan kesinambungan pendanaan daerah.
21.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025	Menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan dinamika kebutuhan daerah.
22.	Standar Harga Satuan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa	Menetapkan standar harga satuan barang dan jasa sebagai acuan penganggaran untuk menjamin efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas belanja daerah.
23.	Standar Harga Satuan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan	Memberikan kepastian harga satuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna mencegah pemborosan dan ketidakwajaran belanja.
24.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan	Mendorong penguatan koperasi desa/kelurahan sebagai pilar ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Merah Putih	kesejahteraan masyarakat.
25.	Manajemen ASN	Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 tentang Tahun 2025 Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	Menetapkan ketentuan pakaian dinas ASN sebagai bagian dari pembinaan disiplin, etika, dan identitas aparatur pemerintah daerah.
26.	Organisasi dan SDM	Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah	Menyesuaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan proporsional.
27.	Perumahan dan Permukiman	Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin	Memberikan pedoman pelaksanaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan sosial.
28.	BUMD dan Pengadaan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah	Mengatur pengadaan barang/jasa pada BUMD agar dilaksanakan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kinerja usaha.
29.	Perencanaan Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025	Menyesuaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
30.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026	Menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2026 secara terarah dan terukur.
31.	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran	Menjabarkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk akuntabilitas

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	pengelolaan keuangan daerah.
32.	Perencanaan Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2026	Menjadi acuan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2026.
33.	Pengawasan Internal	Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah	Menyesuaikan kedudukan dan fungsi Inspektorat Daerah guna memperkuat pengawasan internal pemerintahan.
34.	Perencanaan Strategis	Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Menjadi pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025–2029.
35.	Pelayanan Kesehatan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ciligrang	Mengatur tata kelola BLUD RSUD Ciligrang guna meningkatkan mutu, aksesibilitas, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.
36.	Pelayanan Kesehatan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit	Mengatur tata kelola BLUD RSUD Labuan untuk menjamin standar pelayanan minimal dan kualitas layanan kesehatan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Umum Daerah Labuan	
37.	Anggaran Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menjabarkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai penyesuaian kebijakan fiskal daerah.
38.	Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah	Menetapkan kedudukan dan fungsi Sekretariat Daerah guna meningkatkan efektivitas koordinasi pemerintahan.
39.	Standar Harga Satuan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025	Menyesuaikan standar harga satuan barang/jasa Tahun Anggaran 2025 sesuai dinamika harga dan kebutuhan.
40.	Standar Harga Satuan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan	Menyempurnakan standar harga satuan untuk menjamin efisiensi dan kewajaran belanja daerah.
41.	Standar Harga Satuan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa	Menyelaraskan standar harga satuan barang/jasa agar konsisten dan akuntabel.
42.	Pelayanan Kesehatan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah di	Mengatur tata cara kerja sama BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Lingkungan Dinas Kesehatan	
43.	Anggaran Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menyesuaikan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai perkembangan kebijakan.
44.	Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Daerah	Menyesuaikan struktur dan tata kerja badan daerah agar lebih efektif dan responsif.
45.	Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Menata kembali kedudukan dan tata kerja cabang dinas dan UPTD sesuai kebutuhan pelayanan.
46.	Pembangunan Berkelanjutan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2030	Menjadi pedoman pelaksanaan rencana aksi daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025–2030.
47.	Pengelolaan Aset Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas	Mengatur pengelolaan kendaraan dinas guna menjamin tertib administrasi dan efisiensi penggunaan aset.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
48.	Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah	Menyesuaikan kedudukan dan fungsi dinas daerah agar selaras dengan kebutuhan organisasi.
49.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Menjabarkan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan daerah.
50.	Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Trans Banten	Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Trans Banten	Menjadi dasar penyelenggaraan angkutan umum massal Trans Banten guna meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman dan terjangkau.
51.	Tanggung Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan	Sebagai dasar penyesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan agar lebih efektif, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat Provinsi Banten.
52.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah	Menetapkan pola tata kelola, rencana strategis, dan standar pelayanan minimal BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan efektivitas pengelolaan layanan.
53.	Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti	Sebagai pedoman tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah guna menjamin perlindungan aset daerah, kepastian hukum, dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Kerugian Daerah	akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
54.	Sarana dan Prasarana Peternakan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan	Memberikan pedoman pemberian bantuan sarana dan prasarana peternakan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan peternak, serta mendukung ketahanan pangan daerah.
55.	Rumah Singgah Pasien	Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Rumah Singgah Pasien Peduli Masyarakat Banten	Memberikan bantuan tempat singgah serta layanan antar/jemput kepada masyarakat Banten yang membutuhkan rujukan pengobatan ke rumah sakit di Jakarta guna meningkatkan akses layanan kesehatan.
56.	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tangerang	Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tangerang	Menetapkan pola tata kelola, standar pelayanan minimal, dan rencana strategis BLUD SMK Negeri 3 Tangerang guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan layanan sekolah yang profesional.
57.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Peraturan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2025 tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029	Sebagai acuan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah Tahun 2025–2029 guna mendorong inovasi, daya saing, dan pembangunan berbasis riset di Provinsi Banten.
58.	Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Bendungan Karian	Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Bendungan Karian	Menetapkan rencana pengembangan kawasan strategis Bendungan Karian guna mendukung pengelolaan sumber daya air, penguatan ekonomi wilayah, serta pemerataan pembangunan daerah.
59.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran	Sebagai pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 guna menjamin tertib administrasi, efisiensi belanja, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		2026	
60.	Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029	Peraturan Gubernur Banten Nomor 60 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029	Menetapkan rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal Tahun 2025–2029 guna memastikan terpenuhinya pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dan berkualitas.
61.	Dukungan Hak Asasi terhadap Penyandang Disabilitas	Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029	Menetapkan rencana aksi daerah penyandang disabilitas Tahun 2025–2029 guna menjamin pemenuhan hak asasi, aksesibilitas layanan publik, serta peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Sumber: Biro Hukum, Setda Provinsi Banten

3.3. TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI BANTEN ATAS LKPJ GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun 2024, dari hasil pembahasan Pansus LKPJ tersebut diperoleh sejumlah rekomendasi yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Banten. Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa Rekomendasi DPRD Provinsi Banten tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya. Adapun tindaklanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor: 100.3.3.7.-05 tahun 2025 tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada tabel berikut;

Tabel 3.12
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Banten

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1	Rekomendasi DPRD pada LKPJ baik yang berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya ditindaklanjuti secara serius, menjadi bagian dalam penyusunan perencanaan dan anggaran serta kebijakan strategis kepala daerah sebagaimana amanat dari peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Rekomendasi DPRD pada LKPJ baik yang berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti secara serius dan menjadi bagian dalam penyusunan perencanaan dan anggaran serta kebijakan strategis Gubernur Banten		
2	Upaya dalam pembenahan dan peningkatan mutu pendidikan			
a	Dengan adanya temuan BPK terkait pengelolaan dana bos di Banten, pengelolaan dana ini harus mengutamakan transparansi dan akuntabel serta database penerima yang benar	Penerima dana BOS berdasarkan data cut off Dapodik per 31 Agustus tahun sebelumnya atau tahun 2023 Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi penatausahaan pengelolaan BOSP tahun 2025 kepada kepala Sekolah dan Bendahara	Pengelolaan dana BOS dengan berbasis data Dapodik Kementerian Pendidikan akan menjamin keakuratan data menjamin transparansi, Hal ini bertujuan untuk peningkatan standar pelayanan minimal pendidikan dan akses pendidikan secara lebih luas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
b	Penataan kembali/revitalisasi SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) Pandeglang sesuai dengan semangat awal pembentukannya dan mempersiapkan CMBBS menjadi salah satu sekolah garuda yang merupakan program kerja Presiden	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan penataan dan revitalisasi SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS), meliputi evaluasi tata kelola, penguatan sistem pembelajaran berasrama, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyesuaian program akademik dan non-akademik agar kembali selaras dengan semangat awal pendiriannya. SMAN CMBBS telah diusulkan dan dipersiapkan untuk memenuhi kriteria sebagai Sekolah Garuda Transformasi melalui penyusunan roadmap pengembangan, penguatan budaya sekolah dan karakter peserta didik, serta peningkatan sarana prasarana pendukung sesuai dengan program prioritas Presiden.	Peningkatan akses pendidikan menengah berkualitas yang ditujukan bagi siswa dengan kemampuan akademik tinggi yang dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
c	Memperkuat sosialisasi serta penegasan Kembali terhadap fungsi utama komite sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, yaitu sebagai mitra strategis dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan di satuan pendidikan. dprd mendorong pemerintah Provinsi Banten untuk menyusun pedoman teknis atau surat edaran tentang batasan peran, struktur, dan tatacara kerja komite sekolah dalam semangat menjaga iklim	1) Memperkuat implementasi melalui sosialisasi dan penegasan kembali fungsi utama Komite Sekolah sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 30 tahun 2027 tentang Komite Sekolah sebagai mitra strategis dalam peningkatan mutu dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. 2) Selain itu, Dinas akan menyusun pedoman teknis atau surat edaran sebagai acuan bagi sekolah dan Komite Sekolah terkait batasan peran, struktur keanggotaan, serta tata kerja komite, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor yang demokratis, akuntabel, dan mendukung terciptanya iklim pendidikan yang sehat, adil, dan berkualitas di Provinsi Banten.	Penguatan fungsi utama Komite Sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui partisipasi masyarakat, memberikan saran kepada sekolah, dan mengawasi pelaksanaan program pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	pendidikan yang sehat, adil, dan berkualitas di Provinsi Banten			
d	Perlu dilakukan transparansi terhadap penerimaan siswa baru, guna menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik.	- Memperkuat transparansi dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui penyempurnaan regulasi, penyediaan informasi yang jelas dan terbuka untuk masyarakat, serta pemantauan pelaksanaan SPMB di seluruh satuan pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses yang adil, akuntabel, dan dapat diakses oleh seluruh calon pesertadidik. - Keputusan Gubernur Banten Nomor 261 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada satuan pendidikan negeri di Provinsi Banten untuk Tahun Ajaran 2025/2026 yang mengatur pedoman dan mekanisme penerimaan siswa baru, mencakup jalur pendaftaran (domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi)	Peningkatan transparansi terhadap penerimaan siswa baru dengan penguatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
e	Mendorong pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat minat baca serta budaya literasi masyarakat melalui pengembangan program-program literasi yang terarah dan berkelanjutan, diantaranya melalui pemberian buku kepada perpustakaan dilingkungan masyarakat.	Dinas Pendidikan Provinsi Banten menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memperkuat budaya literasi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus melalui penyediaan buku teks muatan lokal serta bahan bacaan pendukung. Selain itu, Dinas mendorong pengembangan program literasi sekolah dan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah untuk memperluas akses bacaan, sehingga turut mendukung peningkatan minat baca di lingkungan masyarakat. DPK Provinsi Banten sudah melakukan program literasi yang berkelanjutan melalui berbagai kegiatan diantaranya: Layanan Perpustakaan baik offline maupun online, Layanan Mobil Internet Keliling dan Mobil Pintar, Dongeng dan Crafting, Pemutaran film edukasi, berbagai perlombaan literasi, dan Layanan library tour. Untuk pemberian buku kepada masyarakat belum dapat diberikan karena ketersediaan anggaran pengadaan buku masih berfokus kepada pengadaan koleksi buku internal DPK yang juga belum terpenuhi sesuai standar	peningkatan minat baca budaya di lingkungan masyarakat dengan memperkuat dan meningkatkan akses bacaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
f	Membuat program beasiswa kepada mahasiswa /pemuda/masyarakat / pegawai berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih lanjut	Kami akan menyelenggarakan kegiatan Banten Emas Camp, yaitu program pembekalan bagi siswa agar lebih siap bersaing mendapatkan beasiswa LPDP dan beasiswa luar negeri. Program ini menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Banten.	Perluasan akses beasiswa dalam dan luar negeri	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
g	Memperhatikan kecukupan kebutuhan tenaga pendidik dan mendorong redistribusi tenaga pendidik baik sekolah negeri	Melakukan perhitungan, pemetaan, serta pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan agar kebutuhan di setiap satuan pendidikan dapat terpenuhi secara lebih efisien dan tepat guna. Selain itu, langkah ini juga mendukung upaya	Pemerataan penyebaran guru di seluruh wilayah agar setiap sekolah memiliki tenaga pengajar kompeten.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	maupun swasta agar lebih efisien dan tepat guna serta meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)	peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui penataan formasi yang lebih proporsional dan sesuai kebutuhan lapangan.		
h	Untuk mengoptimalkan keanekaragaman kebudayaan yang menjadi kekhasan daerah, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan, pelestarian, dan pembinaan kebudayaan. selain itu, untuk pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, pemerintah daerah perlu menginisiasi program dan kegiatan yang terarah, yang disesuaikan dengan pokok pikiran dan strategi pemajuan kebudayaan daerah.	Memperkuat peran aktif dalam pengelolaan, pelestarian, dan pembinaan kebudayaan daerah melalui program-program yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan mengacu pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan strategi pemajuan kebudayaan, termasuk pengembangan kegiatan pelestarian tradisi, dukungan terhadap komunitas budaya, serta pemanfaatan kekayaan budaya sebagai sumber edukasi dan identitas daerah. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan keanekaragaman budaya Banten sekaligus memperkuat karakter dan kebanggaan masyarakat daerah.	mengoptimalkan keanekaragaman budaya Banten, memperkuat karakter dan kebanggaan masyarakat daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Upaya dalam pembenahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan			
a	Upaya pembenahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan baik sarana maupun prasarana kepada masyarakat terus ditingkatkan secara berkelanjutan	RSUD Malingping melakukan peningkatan sarana prasarana berupa renovasi gedung IGD dan Kebidanan Renovasi Gedung Instalasi Gizi pada RSUD Malingping Pengadaan Alat Kesehatan Alat Kedokteran Jantung, Alat Kedokteran Anak dan Inkubator pada RSUD Banten Pengadaan alat kedokteran umum pada RSUD Labuan Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran pada RSUD	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Labuan Belanja Alat Kedokteran dan Laboratorium pada RSUD Ciligrang Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran pada RSUD Ciligrang Belanja Peningkatan SIM RS pada RSUD Ciligrang		
b	Peningkatan jumlah tenaga medis profesional (dokter spesialis) di RSUD-RSUD milik Provinsi Banten sesuai kebutuhan, agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan responsif	Melalui jalannya operasional pada RSUD Ciligrang maka akan menambah 19 Dokter Spesialis Operasional RSUD Labuan menambah 18 Dokter Spesialis	Peningkatan pelayanan kesehatan dengan pemenuhan tenaga medis sesuai kebutuhan	
c	BPJS sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional (JKN) perlu peningkatan sistem administrasi yang lebih transparan, sederhana dan efisien. Pemerintah Provinsi Banten mendorong kabupaten/kota mengevaluasi penetapan jumlah penerima bantuan iuran (PBI) agar distribusinya lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan	Saat ini Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan koordinasi baik melalui surat maupun pertemuan-pertemuan untuk mengevaluasi kepesertaan PBI dan PBPU BP Pemda baik dari segi jumlah, proporsi pembiayaan dan kriteria masyarakat yang akan menjadi peserta dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kepesertaan PBI, sehingga data kepesertaan lebih valid dan tepat sasaran. Pembiayaan Kepesertaan PBPU BP Pemda diatur minimal 21% dari jumlah penduduk sesuai kemampuan daerah dan Kriteria berdasarkan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional)	Penguatan data kepesertaan JKN lebih valid dan tepat sasaran	
d	Dalam rangka menekan prevalensi stunting di Provinsi Banten, agar mengoptimalkan program-program yang sudah berjalan, sehingga intervensi spesifik maupun sensitif dapat lebih tepat sasaran,	Penguatan program dan kegiatan dalam upaya penurunan prevelansi stunting dengan melibatkan lintas sektor serta fokus pelaksanaan kegiatan di wilayah-wilayah yang angka stuntingnya masih tinggi	Optimalisasi Program Prevalensi Stunting yang tepat sasaran dan terintegrasi	DP3AKKB

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	terintegrasi lintas sektor, dan mampu menjangkau wilayah-wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.			
4	Upaya Penanganan Kemiskinan Dan Pengangguran			
a	Memperluas dan meningkatkan program penerimaan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berada di Provinsi Banten khususnya daerah yang membutuhkan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.	Dalam rangka pemenuhan masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di Provinsi Banten, maka dilaksanakan pekerjaan peningkatan kualitas dan rehabilitasi/perbaikan rumah tidak layak huni.	Peningkatan kualitas dan rehabilitasi/perbaikan rumah tidak layak huni sesuai kriteria yang dipersyaratkan	DPRKP
b	Merekomendasikan pembentukan satuan tugas (Satgas) akibat banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan pemberantasan praktik percaloan dan mafia tenaga kerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tidak membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dengan beberapa pertimbangan, antara lain: 1) Fungsi penanganan PHK telah melekat pada struktur organisasi yang ada, serta penanganan PHK yang bersifat kasus per kasus. 2) Selain itu, pertimbangan efisiensi anggaran, dominannya kewenangan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemantauan dan penanganan langsung di lapangan, serta pendekatan kebijakan yang lebih mengutamakan pencegahan dibandingkan penindakan turut menjadi dasar tidak dibentuknya Satgas PHK. Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas sektor tetap dilakukan secara ad hoc sesuai dengan kebutuhan dan	peningkatan koordinasi lintas sektor dan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan penguatan Tim Deteksi Dini Hubungan industrial	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		karakteristik permasalahan yang dihadapi. 3) Pemerintah Provinsi Banten telah mengedepankan pendekatan pencegahan dini melalui keberadaan Tim Deteksi Dini Hubungan Industrial yang secara fungsional telah menjalankan peran strategis dalam mengantisipasi potensi terjadinya PHK. Tim Deteksi Dini Hubungan Industrial berfungsi sebagai sistem peringatan awal (<i>Early Warning System</i>) yang melaksanakan pemantauan, analisis, serta pembinaan terhadap dinamika hubungan industrial di perusahaan sebelum permasalahan berkembang menjadi perselisihan terbuka atau berujung pada terjadinya PHK. Tim Deteksi Dini Hubungan Industrial tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, didukung oleh penganggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, serta melibatkan tim lintas instansi di tingkat provinsi, antara lain Kepolisian Daerah, Komando Resor Militer, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan Intelijen Negara Daerah.		
c	Pemerintah Provinsi Banten berkerjasama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri secara legal, serta melakukan upaya pencegahan terhadap pengiriman tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi melalui kegiatan ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait melakukan sosialisasi menempatkan tenaga kerja ke luar negeri sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sosialisasi ini berlokasi di desa dan kecamatan yang merupakan kantong pekerja	Penguatan kerjasama, pelayanan penyelesaian permasalahan pekerja migran dan peningkatan pengawasan dan pembinaan calon pekerja migran	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	ilegal melalui pengawasan, edukasi, dan pembinaan calon pekerja migran secara terpadu	migran indonesia, selain itu dinas melakukan pelayanan penyelesaian permasalahan calon pekerja migran indonesia atau pekerja migran indonesia		
d	Dalam rangka penguatan usaha ekonomi produktif (UEP) perlu diberikan bantuan permodalan	Telah dilaksanakan pemberian UEP kepada masyarakat di anggaran 2025 dan dilanjutkan di 2026 yang langsung disalurkan kepada masyarakat prasejahtera penerima manfaat untuk mendorong kemandirian ekonomi dan menciptakan lebih banyak UMKM baru ditingkat lokal.	penguatan usaha ekonomi produktif (UEP)	DINAS SOSIAL
e	Dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Provinsi Banten, agar pemerintah daerah memberikan kemudahan perizinan bagi para investor, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.	Guna memberikan kemudahan perizinan bagi investor, Pemerintah Provinsi Banten melalui DPMPTSP Provinsi Banten: 1) Melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Aproach (OSS RBA) dan Sistem Pelayanan Elektronik Terbuka (SIPEKA) 2) Menyelenggarakan Diseminasi perizinan berusaha di 8 (delapan) Kab/Kota 3) Menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha <i>on the spot</i>	peningkatan pelayanan perizinan berusaha	DPMPTSP
5	Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Pengelolaanserta Pemanfaatan Aset Daerah			

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
a	Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), merekomendasikan agar pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah-langkah strategis dalam pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, guna mendukung peningkatan PAD secara riil dan berkelanjutan	Membentuk UPT. Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Peningkatan aset daerah bermanfaat dalam mendukung kemandirian keuangan daerah	BPKAD
b	Pemerintah provinsi diharapkan menyusun <i>Business Plan</i> (rencana bisnis) yang menyeluruh dan berbasis potensi ekonomi daerah dengan pemanfaatan aset. Diantaranya <i>Banten International Stadium</i> (BIS) dan aset lainnya yang tersebar di wilayah Provinsi Banten	Melakukan kegiatan <i>Hight Best Use</i> (HBU) atau penggunaan tertinggi dan terbaik dan penilaian harga wajar sewa atas beberapa titik lokasi aset <i>idle</i> /tidak digunakan OPD	Memberikan jaminan kepastian dalam pemanfaatan aset pemerintah daerah bagi pihak lain dalam rangka meningkatkan PAD	BPKAD
c	Perlu dimanfaatkan aset potensial, seperti dengan mengupayakan distribusi air bersih melalui pembangunan SPAM Regional dari Bendungan Sindangheula Dan Waduk Karian, baik untuk wilayah di dalam maupun luar provinsi banten melalui skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU)	Telah dilaksanakan Reviu DPPT Karian Timur untuk pelaksanaan penyediaan lahan SPAM Karian Timur. Pada APBD Murni telah dianggarkan untuk Pengadaan Lahan SPAM Regional namun dibatalkan karena kebijakan efisiensi.	Penguatan pengelolaan air bersih untuk masyarakat dan meningkatkan kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	DPUPR

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
d/e	Untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, diperlukan percepatan Pembangunan gedung kantor UPT/SAMSAT induk dan kerjasama dengan pemerintah kab/kota dalam penyediaan layanan gerai samsat. sehingga layanan perpajakan dapat berlangsung secara optimal, permanen, dan terintegrasi dengan baik Serta memanfaatkan teknologi informasi dalam perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. dengan mengoptimalkan aplikasi seperti signal dan sambat, diharapkan proses pembayaran pajak di provinsi banten menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh Masyarakat	Bapenda Banten melalui Bidang PSI dan EPD telah memiliki Sistem Informasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik meliputi aplikasi utama dan aplikasi penunjang. Aplikasi utama meliputi: 1) Sistem Samsat Online, Sistem terintegrasi untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor dan penerbitan SKPD. Didukung oleh 3 kanal pembayaran eSamsat: SIGNAL, SAMBAT, SAMSAT CERIA 2) SITAPAP, Sistem Informasi Tagihan Pajak Air Permukaan untuk pengelolaan dan pemantauan pajak penggunaan air permukaan di wilayah Banten. 3) SIREDA, Sistem Informasi Retribusi Daerah yang mengelola berbagai jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah. 4) PBBKB, Sistem pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang memantau dan mengelola pajak dari penjualan bahan bakar di wilayah Banten. dan 5) SimPAB. Sistem Informasi Pajak Alat Berat yang mengelola perpajakan untuk penggunaan alat-alat berat di wilayah Provinsi Banten. 6) Sedang dibangun juga aplikasi penerimaan Opsen MBLB. Aplikasi Penunjang terdiri dari aplikasi administrasi dan aplikasi monitoring.	Penguatan pelayanan publik berbasis digital dan peningkatan PAD	BAPENDA

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
f	Segera melakukan penjualan atau pelelangan terhadap kendaraan dinas yang sudah tidak layak operasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. langkah ini penting untuk efisiensi pengelolaan aset daerah, mengurangi beban biaya pemeliharaan, serta dapat menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	Telah melakukan lelang kendaraan dalam rangka penghapusan barang milik daerah	Peningkatan tata kelola aset daerah	BPKAD
g	Mengoptimalkan fungsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penguatan unit-unit usaha produktif berbasis keahlian, kemitraan industri, serta inovasi layanan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja	Pada Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan seleksi administrasi sebagai tahapan awal penetapan calon SMK BLUD Tahun 2027.	peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan bagi sekolah untuk mengelola hasil praktik siswa (Teaching Factory/TeFa) secara mandiri. Ini meningkatkan kualitas lulusan yang kompeten	Dinas Pendidikan Kebudayaan
h	Mendorong pemerintah provinsi banten untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya, antara lain dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak bagi hasil pusat dan daerah, meningkatkan pendapatan dari	Bidang PSI dan EPD telah menyediakan aplikasi: 1. SIREDA, Sistem Informasi Retribusi Daerah yang mengelola berbagai jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah. 2. SImPAB; Sistem Informasi Pajak Alat Berat yang mengelola perpajakan untuk penggunaan alat-alat berat di wilayah Provinsi Banten.	Peningkatan PAD melalui sumber lainnya yang tidak hanya terbatas pada Pajak kendaraan	BAPENDA

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	pajak air permukaan dan pajak alat berat, serta mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil dalam rangka peningkatan retribusi daerah			
6	Upaya Pembinaan Olahraga & Pemberdayaan Pemuda			
a	Mendorong adanya program pembinaan atlet yang terencana secara berjenjang, dari tingkat daerah hingga nasional. potensi atlet banten yang telah terbukti di berbagai ajang, perlu didukung dengan perhatian yang konsisten, termasuk pembinaan, fasilitas, dan penghargaan yang layak	Dalam pembinaan atlet secara berjenjang, Dispora Banten telah melakukan sesuai kewenangan, yaitu dengan melatih atlet pelajar setingkat SMA dengan terlebih dahulu dilakukan seleksi terhadap calon atlet potensial. Setelah direkrut, atlet tersebut dilakukan pembinaan dan pelatihan sesuai dengan cabang olahraga secara terarah dan berkesinambungan oleh pelatih yang telah disiapkan Dispora Banten. Selama proses pembinaan dan pelatihan, atlet tinggal di asrama yang representatif telah disiapkan oleh Dispora Banten dan untuk sarana dan prasarana olahraga juga telah disediakan oleh Dispora Banten. Dalam proses pembinaan, atlet berprestasi diberikan penghargaan, seperti atlet berprestasi pada PON, PEPARNAS, POPNAS, PEPARPENAS, hingga Kejuaraan tingkat Dunia seperti OLIMPIADE.	peningkatan prestasi olahraga dan peningkatan pembinaan atlet berestasi	Dinas Pemuda Dan Olahraga

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
b	Lebih aktif dan progresif dalam merancang program pembinaan kepemudaan dengan program yang terarah, inovatif, dan berbasis potensi lokal yang tumbuh di setiap wilayah. program yang mampu membuka ruang ekspresi, mengembangkan bakat serta minat generasi muda, sekaligus memperkuat daya saing pemuda Banten dalam berbagai bidang, baik olahraga, seni, teknologi, maupun kewirausahaan.	Dispora Banten telah berikhtiar dalam melakukan pembinaan kepada pemuda diantaranya: 1) Pelatihan kewirausahaan pemuda 2) Seleksi pemuda pelopor 3) Seleksi wirausaha muda 4) Seleksi pertukaran pemuda antar negara (PPAN) 5) Dialog kepemudaan	peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah	Dinas pemuda dan olahraga
c	Memaksimalkan pengelolaan <i>sport center</i> sebagai upaya pembangunan olahraga masyarakat di Provinsi Banten dan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Olahraga Banten dengan nilai 0,289 dimana nilainya masih dibawah angka nasional	Capaian IPO Tahun 2024 berdasarkan pengukuran secara mandiri sebesar 0,530. Saat ini, Sport Center yang sudah tersedia adalah Banten International Stadium yang sudah digunakan baik untuk latihan klub sepak bola ataupun untuk pertandingan sepak bola berskala nasional. Adapun untuk pengelolaan sport center ada pada dinas PUPR	Peningkatan pembudayaan olahraga ke masyarakat melalui sarana dan prasarana yang optimal	Dinas pemuda dan olahraga
7	Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik			
a	Pemerintah Provinsi Banten perlu penataan pegawaiscara terencana dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya penyegaran dan	Melaksanakan proses mutasi dan promosi dengan menerapkan manajemen talenta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	penguatan implementasi manajemen talenta bagi ASN di Provinsi Banten	BKD

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	penyehatan organisasi. Rotasi pegawai perlu dilaksanakan secara optimal, guna mendorong dinamika kerja yang sehat serta meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah.			
b	Selain itu, pengembangan kompetensi dan jenjang karier fungsional penyetaraan, perlu disusun polakarier yang adil, transparan, dan berorientasi pada profesionalisme. Hal ini penting untuk menjamin kepastian karier bagi ASN, mendorong peningkatan kinerja, serta memperkuat kualitas pelayanan publik	1. Melaksanakan pembinaan pada Pejabat Fungsional Penyetaraan 2. Menyusun program pendidikan dan pelatihan untuk fungsional penyetaraan melalui BPSDMD 3. Memfasilitasi pengembangan karir fungsional penyetaraan kedalam jabatan struktural 4. Meningkatkan pemetaan potensi dan kompetensi untuk seluruh jabatan	Penguatan implementasi manajemen talenta dan sistem merit bagi para ASN di Provinsi Banten	BKD
c	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan sistem pelayanan publik.	Mengintegrasikan berbagai aplikasi dan atau sistem layanan publik pada satu Portal Layanan Publik Terpadu serta didukung oleh penguatan infrastruktur digital (penyediaan server dan lisensi keamanan sistem)	peningkatan digitaslisasi pemerintah yang semakin terintegrasi	Dinas Kominfo
		1. Fasilitasi Pembinaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. 2. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Banten Tahun 2025 3. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten/Kota 4. Pembinaan, Monitoring, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 5. Survei Kepuasan Masyarakat	peningkatan pelayanan publik berbasis digital	Biro Organisasi

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
8	Untuk mengoptimalkan keanekaragaman kebudayaan yang menjadi kekhasan daerah, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pengelolaan, pelestarian, dan Pembinaan kebudayaan. Selain itu, untuk pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, pemerintah daerah perlu menginisiasi program dan kegiatan yang terarah, yang disesuaikan dengan pokok pikiran dan strategi pemajuan kebudayaan daerah.	Memperkuat peran aktif dalam pengelolaan, pelestarian, dan pembinaan kebudayaan daerah melalui program-program yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan mengacu pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan strategi pemajuan kebudayaan, termasuk pengembangan kegiatan pelestarian tradisi, dukungan terhadap komunitas budaya, serta pemanfaatan kekayaan budaya sebagai sumber edukasi dan identitas daerah. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan keanekaragaman budaya Banten sekaligus memperkuat karakter dan kebanggaan masyarakat daerah.	Mengoptimalkan keanekaragaman budaya Banten, memperkuat karakter dan kebanggaan masyarakat daerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9	Dalam rangka mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), agar dilakukan percepatan penanganan wilayah-wilayah yang belum memiliki akses layanan digital yang layak, termasuk wilayah <i>blank spot</i> (tanpa jaringan) di Provinsi Banten. upaya ini penting untuk menunjang kemajuan di sektor pendidikan, ekonomi, serta meningkatkan partisipasi sosial secara inklusif dan merata.	Perluasan jangkauan titik akses internet untuk unit kerja dan sekolah SMA/SMK/SKH di kabupaten/kota, semula di tahun 2024 hanya 3 kab/kota yaitu kota Serang, kab Serang dandan kota cilegon menjadi 5 Kab/Kota yaitu kota Serang, kab Serang, kota cilegon, kab lebak dan kab pandeglang di tahun 2025.	pemerataan akses digital bagi kawasan atau wilayah blank spot untuk kemajuan pendidikan dan penguatan perekonomian	DINAS KOMINFO
10	Rehabilitasi kawasan pesisir yang selama ini mengandalkan	Tindaklanjut pelaksanaan Kegiatan hanya sebatas penanaman mangrove di Wilayah Utara dan Selatan	peningkatan pengelolaan lingkungan yang aman bagi warga	DKP

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	penanaman mangrove dinilai kurang efektif. Mendorong penggunaan metode alternatif berupa pengedaman berbasis batu yang lebih tahan lama dan mampu menahan abrasi dengan optimal	melalui Peran KCD Selatan dan KCD Utara. Untuk pembangunan breakwater di wilayah pesisir sudah mengusulkan ke PUPR Provinsi Banten sesuai kewenangannya, karena untuk DKP Banten hanya sebatas breakwater sebagai sarpras Pelabuhan Perikanan.	pesisir	
11	Perlu segera menindaklanjuti rencana pembangunan dan mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten	Anggaran untuk pembangunan TPST Regional ditiadakan karena adanya kebijakan efisiensi.	Penguatan dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman	DPUPR DAN DLHK
12	Melakukan evaluasi dan perencanaan ulang terhadap proyeksi kebutuhan energi listrik, khususnya untuk sektor pemukiman, wilayah belum berkembang dan wilayah pertumbuhan baru dengan target pemasangan 20.000 RTS (Rumah Tangga Sasaran Wilayah Provinsi Banten)	Target pada Renstra 2023-2026 adalah sebanyak 17.000 RTS pada Tahun 2025, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025 menjadi 7.000 RTS.	Peningkatan rasio elektrifikasi daerah terutama bagi warga miskin di Banten	DESDM
13	Memanfaatkan lahan-lahan terlantar yang tersebar di wilayah Banten guna mendukung ketahanan pangan daerah. pemanfaatan lahan ini perlu dilakukan melalui	Aktif dalam Gugus Tugas Reformasi Agraria, diantaranya memohon hibah tanah kepada Bank Tanah di Kementerian ATR/BPN terhadap HGU Perkebunan yang terlantar di Provinsi Banten	Peningkatan tata kelola aset dan pemanfaatan aset daerah	BPKAD

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	kolaborasi dengan masyarakat, kelompok tani, serta pemilik lahan, agar dapat diolah menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas pangan strategis secara berkelanjutan			
14	Pemerintah Provinsi Banten perlu segera menyediakan rumah singgah yang strategis dan layak bagi warga Banten yang membutuhkan layanan rujukan kesehatan dan pendidikan di Jakarta	Pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 telah dianggarkan untuk Kegiatan Rumah Singgah	Peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan	BADAN PENGHUBUNG
15	Pemerintah Provinsi Banten perlu menetapkan dan mengembangkan indeks zona integritas pada sekolah & unit-unit pelayanan publik sebagai instrumen untuk mengukur tingkat penerapan prinsip anti-korupsi, transparansi, dan akuntabilitas	Secara bertahap Inspektorat akan mengembangkan indeks zona integritas pada sekolah dan unit-unit pelayanan publik dan mengusulkan untuk ditetapkan oleh kepada Kepala Daerah, sebagai instrumen untuk mengukur tingkat penerapan prinsip anti-korupsi, transparansi, dan akuntabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dalam pelayanan publik di masyarakat	INSPEKTORAT
16	Penataan dan penertiban sepadan jalan milik provinsi khususnya di Ibukota Provinsi Banten	Telah dilakukan penataan jalan di Kota Serang melalui pelebaran jalan dengan menambah lajur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan terutama memperindah wilayah Ibukota Provinsi Banten	DPUPR
17	Penataan dan Penertiban Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), penataan ini diperlukan untuk memastikan kawasan KP3B tetap tertib, aman, bersih, dan dapat digunakan secara	Telah dilaksanakan pemeliharaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)	Peningkatan infrastruktur kawasan strategis provinsi dalam rangka menjaga ketertiban dan keindahan terutama pada wilayah KP3B.	PUPR

No	Rekomendasi LKPJ	Tindak lanjut	Masalah yang diselesaikan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	optimal baik untuk fungsi pemerintahan maupun untuk kegiatan sosial masyarakat, dengan tetap menjaga marwah sebagai pusat administrasi pemerintahan daerah			

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, diolah 2026

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGASPEMBANTUANKAN

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Selain melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya meliputi sebagian urusan pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN mencakup salah satunya pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah otonom berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Selain itu, alokasi dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

4.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp72.003.268.000,- dengan realisasi Rp69.870.874.003 atau setara 97,04 persen dari 6 (enam) Kementerian/Lembaga.

Kementerian/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan di Provinsi Banten, diuraikan sebagaimana Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Kementerian dan Realisasi Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2025

No	Nama K/L	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Blokir (Rp)
			Rp	(%)	
1	Kementerian Pertanian	56.643.771.000	56.274.246.600	99,35	
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	135.942.000	1.500.000	1,10	134.440.000
3	Kementerian Pekerjaan Umum	12.515.638.000	12.494.040.982	99,83	
4	Kementerian Perindustrian	444.576.000	-	0	444.576.000
5	Kementerian Perdagangan	175.989.000	-	0	175.990.000
6	Kementerian Transmigrasi	2.087.352.000	1.101.086.421	52,75	
JUMLAH		72.003.268.000	69.870.874.003	97,04	755.006.000

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Kementerian Keuangan RI

4.1.3. Satuan Kerja (Satker) yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Banten dilaksanakan oleh 5 (lima) Perangkat Daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) Satker. Capaian Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Satker Provinsi Banten diuraikan sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2025

No	Nama K/L	Perangkat Daerah	Satuan Kerja (Satker)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi keuangan		Blokir (Rp)
						Rp	(%)	
1	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian			56.643.771.000	56.274.246.600	99,35	
			Dinas Pertanian (299380)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	105.000.000	104.430.000	99,46	
				Program Dukungan Manajemen	304.610.000	304.570.000	99,99	
			Dinas Pertanian (299383)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	121.000.000	119.675.000	98,90	
				Program Dukungan Manajemen	97.418.000	72.095.000	74,01	
			Dinas Pertanian (299387)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.475.020.000	7.468.620.000	99,91	
				Program Dukungan Manajemen	500.000.000	499.643.000	99,93	
			Dinas Pertanian (691343)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	48.011.443.000	47.675.933.600	99,30	
				Program Dukungan Manajemen	29.280.000	29.280.000	100	
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan			135.942.000	1.500.000	1,10	134.440.000
			Dinas Kelautan dan Perikanan (291035)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	96.000.000	-	0	96.000.000
				Program Dukungan Manajemen	38.442.000	-	0	38.442.000
			Dinas Kelautan dan Perikanan (299391)	Program Dukungan Manajemen	1.500.000	1.500.000	100	1.500.000

No	Nama K/L	Perangkat Daerah	Satuan Kerja (Satker)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi keuangan		Blokir (Rp)
						Rp	(%)	
3	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			12.515.638.000	12.494.040.982	99,83	
			Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (693780)	Program Infrastruktur Konektivitas	12.354.333.000	12.350.829.982	99,97	
				Program Dukungan Manajemen	161.305.000	143.211.000	88,78	
5	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			444.576.000	-	0	444.576.000
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan (690770)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	398.056.000	-	0	398.056.000
				Program Dukungan Manajemen	46.520.000	-	0	46.520.000
4	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			175.989.000	-	0	175.990.000
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan (691137)	Program Perdagangan Dalam Negeri	175.989.000	-	0	175.989.000
6	Kementerian Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			2.087.352.000	1.101.086.421	52,75	
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (694582)	Program Transmigrasi	2.047.108.000	1.065.162.421	52,03	
				Program Dukungan Manajemen	40.244.000	35.924.000	89,27	
JUMLAH					72.003.268.000	69.870.874.003	97,04	755.006.000

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Kementerian Keuangan RI

4.1.4. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Bawahnya

Pemerintah Daerah Provinsi Banten tidak memberikan penugasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2025.

4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Pada Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan terdapat beberapa permasalahan yang dapat kami sampaikan, diantaranya :

1. Banyak satuan kerja yang masih memiliki blokir anggaran, total mencapai Rp755.006.000 atau 1,05 persen dari total pagu keseluruhan.
2. Pada program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, kendala yang dihadapi di lokasi adalah 1) keterlambatan pengadaan material pada beberapa lokasi yang jauh dari jalan utama serta tantangan teknis pada topografi dan kondisi lahan tertentu, 2) kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam implementasi system *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas* (UPLAND).
3. Pada program Transmigrasi terealisasi 52,3 persen, dikarenakan keluarga yang akan diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi hanya sebanyak 15 Keluarga dari total target 43 Keluarga, hal ini disebabkan oleh daerah tujuan transmigran belum selesai disiapkan terkendala rumah yang belum selesai dibangun dan lahan garapan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan diiringi dengan konsistensi dan kepatuhan pada Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan strategis untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan Swasembada Pangan diharapkan terus ditingkatkan di Provinsi Banten terutama bangunan infrastruktur Pertanian dan Pembangunan pendukung penyediaan air irigasi di tingkat kelompok tani.

3. Penguatan kelembagaan petani perlu diperkuat melalui pelatihan dan pembelajaran lainnya serta didukung dari segi materiil untuk dapat mandiri dan membentuk entiti usaha yang berkelanjutan.
4. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Desa terkait Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam rangka penyiapan daerah tujuan transmigran untuk Keluarga yang berasal dari Provinsi Banten yang akan diberangkatkan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. LKPJ disusun sesuai dengan amanat regulasi baik UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 13 Tahun 2019, maupun Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pembangunan daerah. Laporan ini telah memuat hasil kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2025, tahun Pertama RPJMD Tahun 2025-2029. Hasil kinerja telah tersaji dalam pembahasan mengenai kebijakan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan. LKPJ ini disusun di samping dalam rangka memenuhi amanat regulasi, juga sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2025 telah merepresentasikan refleksi, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun. Capaian pembangunan tersebut telah diukur melalui kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas dalam mencapai sasaran pemerintah daerah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan berorientasi pada hasil.

Secara umum pelaksanaan urusan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan secara optimal, yang tentunya hal ini merupakan pencapaian bersama sebagai bentuk sinergi antara Gubernur, Wakil Gubernur dan DPRD selaku unsur Penyelenggara Pemerintahan. Indikasi atas pencapaian hal tersebut, antara lain didukung dengan kondisi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja indikator makro daerah, yang antara lain dilihat dari realisasi IPM Provinsi Banten Tahun 2025 sebesar 77,25 poin. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,63 persen melebihi dari target yang ditetapkan dan menunjukkan kinerja baik dengan turun 0,1 poin dari sebelumnya, Persentase Penduduk Miskin realisasi sebesar 5,51 persen lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya dengan kinerja baik dengan turun 0,19 poin, realisasi gini ratio sebesar 0,312 dimana ini menunjukkan

kinerja lebih baik dibanding realisasi sebelumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi tumbuh sebesar 5,37 persen terjadi kenaikan sebesar 0,58 poin.

2. Pada APBD Provinsi Banten TA 2025, bahwa dari target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 sebesar **10.467.550.487.735** terealisasi sebesar **9.749.656.227.905** atau sebesar 93,14 persen. Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 dialokasikan sebesar **10.773.538.029.147,00** dengan realisasi sebesar Rp **10.016.797.195.542** atau Sebesar 92,98 persen.
3. Pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun 2025 dari total alokasi anggaran sebesar Rp72.003.268.000,00,- dengan realisasi Rp69.870.874.003,00 atau setara 97,04 persen dari 6 (enam) Kementerian/Lembaga.

Sebagai penutup, penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2025 ini merupakan laporan pelaksanaan yang menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya dalam periode RPJMD 2025-2029, capaian tahun pertama pada RPJMD Banten ini masih perlu ditingkatkan dan diberikan catatan kritis terhadap hambatan dan tantangan yang telah dihadapi. Capaian tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan prioritas pembangunan, tematik pembangunan, kolaborasi dan inovasi agar pencapaian sasaran daerah dapat tercapai lebih baik lagi.

Selanjutnya Apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD atas kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan untuk pencapaian target pembangunan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan “**Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi**” .